

T  
345.072  
SAM  
t c1



**TINJAUAN TERHADAP PERSIDANGAN  
PERKARA PIDANA ANAK  
MENCARI MODEL SIDANG ANAK YANG IDEAL**

**TESIS**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat  
Magister pada Program Studi S-2 bidang Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh :

**Nandang Sambas, SH  
NPM. B.102.94.0069**

Di Bawah Bimbingan :

**Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH., MH.**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM STUDI S-2 (MAGISTER) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**1996**



## **TINJAUAN TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ANAK MENCARI MODEL SIDANG ANAK YANG IDEAL**

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji pada tanggal 7 Desember 1996 dan dinyatakan LULUS dengan predikat (memuaskan, sangat memuaskan, cum laude).

Menyetujui:  
Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH., MH.**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

**Prof. H. Purwahid Patrik, SH.**

## MENSAHKAN

### TIM PENGUJI

1. Prof. H. Purwahid Patrik, SH.
2. Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH.
3. Dr. I.S. Susanto, SH.
4. Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH., MH.

*[Handwritten signatures of the four members of the examination team, corresponding to the list on the left.]*

Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Pascasarjana (S-2) Universitas Diponegoro



*[Handwritten signature of Prof. H. Purwahid Patrik, SH.]*  
Prof. H. Purwahid Patrik, SH.

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 7 Desember 1996.

## KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang paling pantas pertama kali penulis ungkapkan pada kesempatan ini selain Puji syukur kehadiran Illahirabi, karena berkat Rahmat-Nya hingga saat ini penulis masih diberi kenikmatan yang tiada terhingga yakni nikmat Iman dan Islam. Dan berkat kemurahan-Nya pula kesehatan rohani dan jasmani selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan Tesis ini.

Secara lahiriyah dengan penuh kerendahan hati ingin pula penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH., MH. selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini. Sebagai seorang pakar hukum yang sangat penulis kagumi, dengan penuh kesabarannya disela kesibukan-kesibukannya beliau telah banyak mencurahkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga, sehingga dengan segala kerelaannya penulisan juga dapat mewujudkan tesis ini.

Menyadari akan pentingnya memperhatikan generasi penerus yang akan menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat, adanya sebagian kecil tindakan anak-anak kita yang terperangkap dengan kondisi hukum pidana yang ada menyebabkan mereka harus menjalani birokrasi penegakan hukum. Oleh karena itu upaya mencari jalan keluar untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan masyarakat merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Atas dasar hal tersebut dengan segala keterbatasan kemampuan penulis mencoba mencari solusi melalui suatu karya tulis ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNDIP yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti pendidikan pada program yang dibinanya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. H. Muladi, SH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH. serta seluruh pembina program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak mencurahkan perhatiannya untuk membina dengan mencurahkan semua ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Kepada Rektor Universitas Islam Bandung, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang juga telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan ini, penulis sampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga. Kepada Bapak Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH. Penulis menyampaikan pula terima kasih yang sebesar-besarnya, karena di samping selaku dosen pembina penulis dalam membina perkuliahan di Fakultas Hukum UNISBA, beliau juga telah banyak mendorong dan meluangkan waktu memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkonsultasi. Begitu juga rekan-rekan staf pengajar Fakultas Hukum UNISBA, rekan-rekan sesama mahasiswa pada Program Pascasarjana yang juga telah banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberikan saran-sarannya, penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga keimanan, kesabaran, dan kesuksesan selamanya Tuhan limpahkan kepada kita semua, amin yarabul alamin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Ketua Pengadilan Negeri I Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung beserta staf, Bapak Didi Gunadi, SH, Ibu Rosmala Sitorus, SH, Bapak Pupung Rusnariman, SH, serta Bapak Gunawan, SH.

Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Jaksa Tatang, SH. Kapolwiltabes Jabar, Ka.Ur.Bin.Op. Kunto Prasetyo, SH, Serse Warsiman beserta jajaran Reserse Bandung yang telah banyak memberi bantuan penulis dalam menghimpun bahan-bahan yang penulis perlukan selama penelitian.

Dengan do'a yang tulus penulis panjatkan pula semoga kedua orang tua yang telah lama kembali kehadirat Illahi mendapat ampunan atas dosa-dosanya, serta mendapat imbalan atas semua amal baik yang telah dilakukannya. Atas asuhan dan bimbingan, serta petuah-petuah semasa beliau hidup penulis terdorong untuk terus menimba dan mengamalkan ilmu.

Akhirnya tidak ada kata-kata yang pantas kusampaikan selain ungkapan rasa bahagia dan terima kasih atas semua dorongan serta pengorbanan istriku yang tercinta Rini Chaerani, Kakak serta adik-adikku. Kepada anak-anak yang kusayangi Gilang Ginanjar serta Dwi Maulana yang selalu menjadi inspirasi dalam menyelesaikan tulisan ini hanya do'a yang selalu kupanjatkan semoga menjadi anak yang saleh serta selamanya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin.

Harapan penulis semoga tulisan yang sederhana ini walaupun sangat kecil dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi siapa saja yang masih mendambakan kehidupan yang baik bagi anak-anak kita dimasa yang akan datang.

Semarang, Nopember 1996

Penulis,

**Nandang Sambas, SH.**

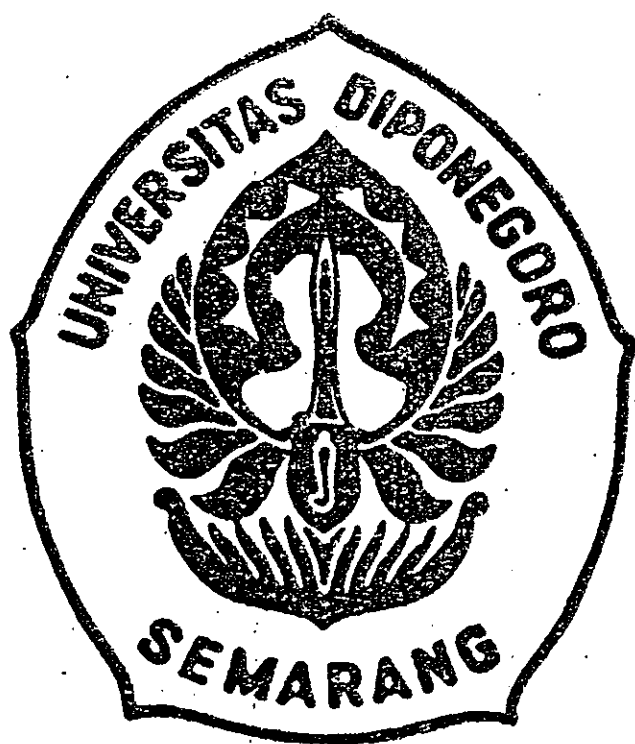
# DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	x
Abstrak .....	xi
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Kegunaan Penelitian .....	17
E. Kerangka Teori .....	17
F. Metode Penelitian .....	26
G. Jadwal Kegiatan .....	30
H. Sistematika Penulisan .....	30
BAB II. Tinjauan Pustaka	
A. Batasan dan Pengertian Anak .....	32
1. Usia dan Pengertian Anak .....	32
1.1 Pengertian Anak Menurut Kajian Sosiologis.....	32
1.2 Pengertian Anak Menurut Kajian Psikologis .....	35
1.3 Pengertian Anak Menurut Kajian Yuridis .....	39
B. Tindak Pidana Anak .....	45
C. Batas Usia Anak dalam Pertanggungjawaban Pidana .....	59
D. Perkembangan Peradilan Anak .....	67
1 Perkembangan Peradilan Anak di Beberapa Negara .....	67

2 Perkembangan Peradilan Anak di Indonesia .....	75
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Persidangan .....	78
1. Instrumen Internasional tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana .....	78
2. Perlindungan Hukum dalam Persidangan Perkara Pidana Anak ..	92
BAB III. Analisis Terhadap Penegakan Hukum dalam Perkara Pidana Anak di Wilayah Hukum Ibu Kota Propinsi Jawa Barat.....	101
A. Peraturan Perundang-undangan sebagai Alas Hukum dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Anak di Indonesia .....	101
1. Eksistensi Sidang Anak di Indonesia .....	101
2. Kajian terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak.....	109
2.1 Tinjauan terhadap aspek Hukum Pidana Materiil dalam Rancangan Undang-undang Peradilan Anak .....	109
2.2 Tinjauan terhadap Aspek Hukum Pidana Formal .....	118
B. Analisis terhadap Persidangan Perkara Pidana Anak di Wilayah Hukum Propinsi Jawa Barat .....	122
1. Kecenderungan penerapan Peraturan Perundang-undangan .....	123
2. Aparat Yang terlibat Dalam Persidangan .....	137
3. Sarana dan Prasarana sebagai Penunjang Persidangan Perkara Pidana Anak .....	143
4. Aspek Kemasyarakatan .....	146
C. Model Sidang Anak yang Ideal sebagai suatu Konsep Dasar .....	149
1. Pendekatan Kebijakan Kriminal sebagai upaya Pembaharuan Hukum Pidana (Anak) .....	149
2. Persidangan yang dapat memberikan Perlindungan Hukum bagi Anak yang disangka telah melakukan suatu Tindak Pidana .....	160
3. Kendala-kendala yang dihadapi .....	163
a. Aspek Perundang-undangan .....	164
b. Aspek Penegak Hukum .....	166



c. Aspek Sarana/Fasilitas .....	170
d. Aspek Budaya Masyarakat .....	171
 BAB IV. Kesimpulan dan Saran .....	174
1. Kesimpulan .....	174
2. Saran .....	181
Daftar Pustaka .....	183
Lampiran	



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Perkara Tindak Pidana Anak di PN Negeri I Bandung dan PN Bale Banduing pada Tahun 1991-1995 .....	123
Tabel 2 : Jenis Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Ibu Kota Propinsi Jawa Barat Tahun 1991-1995 .....	125
Tabel 3 : Data Perkara pidana Anak yang didampingi Penasihat Hukum .....	127
Tabel 4 : Data Penahanan Sementara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	128
Tabel 5 : Vonis Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana .....	130
Tabel 6 : Masa Pidana Penjara yang dijatuhkan .....	132
Tabel 7 : Kelompok Umur Anak Pelaku Tindak Pidana .....	132

## ABSTRAK

Bagi negara-negara yang baru berkembang sebagaimana halnya negara Indonesia pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan berbagai problema sosial. Satu hal yang menjadi kekhawatiran semua kalangan adalah kecenderungan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebagai negara yang masih mengandalkan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan, memanfaatkan sistem hukum (termasuk di dalamnya struktur, substansi maupun budaya) peninggalan kolonial, ternyata manfaat yang diharapkan justru sebaliknya. Kondisi demikian, terungkap dari berbagai kajian baik terhadap sarana perundang-undangan yang ada yang terbukti secara yuridis formal belum memberikan alas hukum yang baik, dari segi aplikasinya pun menggambarkan kondisi yang dapat memperburuk perkembangan jiwa anak.

Untuk mengungkapkan proses penegakan hukum tersebut di samping mengkaji ulang berbagai ketentuan yang ada juga mengkaji kecenderungan persidangan yang secara empiris dilakukan di wilayah hukum Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun dari hasil survei di lapangan diidentifikasi dan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Analisis yuridis normatif dipergunakan untuk mengkaji dokumen serta perundang-undangan, sedangkan yuridis empiris dipergunakan untuk mengungkapkan relevansi antara peraturan perundang-undangan dengan aplikasi dalam persidangan. Dari gambaran tersebut dapat diformulasikan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang secara mendasar mempunyai karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan penegakan hukum bagi orang dewasa yaitu model sidang perkara pidana anak yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Dilihat secara yuridis formal landasan hukum yang dapat memberikan perlindungan adalah adanya undang-undang yang memenuhi unsur politis, sosiologis, praktis dan adaptif. Sedangkan dalam proses penegakkannya persoalan yang sangat mendasar serta yang harus selalu mendapat perhatian adalah memperhatikan aspek perundang-undangan, penanganan oleh sumber daya manusia yang handal, tersedianya fasilitas yang memadai, serta masalah aspek kemasyarakatan. Dengan demikian, persidangan terhadap anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan kondisi anak baik secara fisik maupun psikis.

Karena persoalan tindak pidana anak merupakan permasalahan yang sangat kompleks, usaha penanganannya tidak hanya dapat diatasi melalui penerapan hukum pidana melainkan perlu mengintegrasikan antara pemanfaatan sarana penal (penegakan hukum pidana) dengan sarana nonpenal (memperbaiki kondisi sosial masyarakat dengan upaya prepreventif yang ditempuh sejalan dengan kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional). Untuk itu dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana di samping berpijak kepada kondisi perkembangan masyarakat, perhatian terhadap kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada masyarakat internasional merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan.

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai generasi yang pada suatu saat nanti akan menjadi pemimpin bangsa memiliki karakteristik tersendiri, dimana fisik dan mentalnya belum matang dan dewasa. Atas dasar kenyataan tersebut, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya terhadap anak perlu adanya perlindungan dan perawatan khusus dengan jalan membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraannya.

Apabila kita perhatikan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, pertumbuhan jumlah anak dan pemuda hingga tahun 1990 telah mencapai 84.554.143 jiwa. Dari jumlah tersebut diproyeksikan hingga tahun 2000 yang akan datang akan mencapai jumlah 86.730.200 jiwa anak. Dengan demikian pertumbuhan anak tiap tahun kurang lebih mencapai 217.606 jiwa anak, atau meningkat rata-rata sekitar 0,26 % per tahun. Pertumbuhan jumlah anak tersebut meliputi anak usia 0-4 tahun mencapai 21.822.800, anak usia 5-9 tahun mencapai 21.400.400, anak usia 10-14 tahun mencapai 21.177.000, dan anak usia 15-19 tahun mencapai 22.330.000 jiwa<sup>1</sup>.

Melihat Kenyataan demikian, sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, maka di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 telah disusun kebijaksanaan mengenai Pembinaan dan Perlindungan Hukum bagi Anak dan

---

<sup>1</sup>. Biro Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 1900-2000.

Remaja yang diupayakan dengan cara meningkatkan kesejahteraan anak dan remaja. Dalam GBHN itu pula diamanatkan bahwa Pembangunan Jangka Panjang II Pembinaan Pemuda sebagai generasi penerus bangsa diarahkan untuk mengembangkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa, sikap keteladanan dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dilaksanakan sedini mungkin di lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

Pembinaan terhadap generasi muda telah ditegaskan pula dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang secara tegas dinyatakan bahwa khusus dalam sektor Generasi Muda tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan generasi muda secara nasional, menyeluruh, terpadu, serta dimulai sedini mungkin untuk meningkatkan kualitasnya.
2. Membentuk pemuda Indonesia menjadi kader bangsa yang tangguh, yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh.
3. Meningkatkan pendidikan politik di kalangan pemuda dalam rangka lebih memantapkan perwujudan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap tantangan masa depan.<sup>2</sup>

Demikian pentingnya mengedepankan perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi perhatian bangsa Indonesia, namun telah mendorong masyarakat bangsa-bangsa di dunia selalu berupaya memberikan komitmen akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Perhatian dunia internasional tentang perlindungan anak diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tahun 1924, tentang Hak-Hak Anak yang diakui dalam Deklarasi PBB *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Deklarasi tersebut mendasari disahkannya Deklarasi Hak-Hak Anak

<sup>2</sup>. TAP.MPR-RI Nomor II/MPR/1988, *Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab VI sub. C (i)*.

(*Declaration on The Rights of The Child*) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1958.<sup>3</sup>

Dalam Deklarasi tersebut antara lain dinyatakan bahwa:

*"Whereas the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth. (Mengingat karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan)".<sup>4</sup>*

Pernyataan yang sama tercantum pula dalam Konvensi Hak-Hak Anak, tanggal 20 Nopember 1989<sup>5</sup> yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

"Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu, oleh negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri".<sup>6</sup>

Dari berbagai pernyataan tersebut, nampak bahwa memberikan perhatian terhadap anak merupakan upaya yang perlu mendapat prioritas, sehingga anak

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 108.

<sup>4</sup> Resolusi PBB 1386 (XIV), *Declaration on The Rights of The Child*, 20 November 1958.

<sup>5</sup> Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, "the child, by the reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as will as after birth", (Mengingat bahwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "anak karena ketidak-matangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran"). Konsideran Resolusi PBB Nomor. 44/25, 20 November 1989, *Convention On The Rights Of The Child*, UNICEF.

<sup>6</sup> Penjelasan Umum UU No.4 tahun 1979, *Tentang Kesejahteraan Anak*, Lembara Negara RI No. 3143.

terlaksananya hukum dan keadilan, agar adanya jaminan bahwa penyelesaian dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, terhadap anak bermasalah perlu diselesaikan oleh suatu badan, yaitu lembaga peradilan.

Ditanganinya anak pelaku tindak pidana (*juvenile offender*) melalui proses peradilan dapat kita lihat beberapa kasus seperti: dipenjarakannya Abdilah (10) dan Ubadilah (9) oleh PN. Denpasar, Bali pada bulan Juni 1984 karena mereka melakukan penganiayaan; dipenjarakannya seorang gadis cilik berusia enam tahun oleh PN. Purwokerto pada bulan Desember 1988<sup>8</sup>; mencuatnya kasus Andang Pradika di Yogyakarta<sup>9</sup>; dipenjarakannya kakak beradik Muhtar (16) dan Anco (9) yang terjadi di Ujung Pandang. Kasus Edi Sartono (14) dan Fajar (15) yang dituduh melakukan perkosaan oleh PN. Bantul<sup>10</sup>; adanya putusan bebas murni bagi Muhamad Arif Budi yang dituduh merampok sopir taksi<sup>11</sup>; kasus pembantaian keluarga Rohadi yang menyeret Al (15), Lam (12) serta Clem (13) ke muka sidang pengadilan, serta kasus-kasus lain yang tidak sempat diketahui oleh masyarakat luas.

Adanya kasus-kasus kenakalan anak yang ditangani melalui sistem peradilan pidana, sudah tentu memerlukan penanganan dan perhatian khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan seorang anak didasarkan oleh latar belakang yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.

---

<sup>8</sup>. Pelita, 12 Juli 1995, hal. 4.

<sup>9</sup>. Perum Keadilan, edisi Juni 1995.

<sup>10</sup>. Suara Merdeka, 28 Desember 1995, hal. 5.

<sup>11</sup>. Kompas, 29 April 1995, hal. 10.



yang dalam kondisi baik secara fisik maupun jiwanya belum matang dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang terlindungi dari berbagai gangguan.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat, serta semakin cepatnya perkembangan informasi sebagai akibat arus globalisasi, telah membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan umat manusia. Kenyataan tersebut nampak pada kondisi masyarakat Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dimana perubahan pola hidup masyarakat telah membawa kepada semakin renggangnya hubungan diantara keluarga. Terjadinya kegoncangan sendi-sendi struktur keluarga, pada umumnya merupakan sebagai salah satu dampak dari pelaksanaan pembangunan yang lebih menitik beratkan kepada tingkat pertumbuhan ekonomi. Disadari atau tidak hal tersebut membawa pengaruh pula terhadap tingkat kenakalan anak (*Juvenile delinquency*) yang pada kenyataannya tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang (*deviance*) sebagaimana halnya tindak kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Terjadinya tingkat kenakalan (kejahatan) anak tersebut bukan saja merupakan satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban semata-mata, melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.

Walaupun diakui bahwa penanganan anak bermasalah sejauh mungkin dihindarkan dari campur tangan sistem peradilan<sup>7</sup>, namun tanpa mengabaikan

<sup>7</sup>. Secara umum asas-asas umum UNSMR-JJ (*Beijing Rule*), menyatakan tentang perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak. Dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, kerugian-kerugian pada diri anak akibat campur tangan sistem dapat dicegah. Langkah yang perlu dilakukan untuk itu adalah pemberian perhatian dan pengambilan tindakan pada anak dan remaja sebelum mereka terlibat perilaku penyimpangan atau kejahatan. *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice*, Department of Public Information, New York, 1986.

Dalam praktik proses peradilan perkara pidana terdapat manifestasi ambivalensi sebagai konsekuensi perkembangan hukum modern yang formal (prosedural), birokratis dan rasional. Dimana dalam sistem hukum modern prosedur dan substansi sudah dipadukan menjadi satu, sehingga kesalahan prosedural berakibat pula kepada kegagalan substansial. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis.<sup>12</sup>

Dalam proses peradilan yang demikian, aparat penegak hukum (terutama hakim) dalam menyelesaikan setiap perkara, pemikirannya selalu didasarkan kepada menggunakan logika undang-undang (*legal sense*). Walaupun disadari bahwa hukum sebagai karya manusia hanya dapat berjalan melalui manusia. Manusia yang menciptakan hukum, namun hukum yang telah diciptakan tidak secara otomatis dapat bekerja dengan sendirinya, melainkan diperlukan campur tangan manusia pula. Namun demikian tidak berarti manusia sebagai penegak hukum harus bersifat rigid/kaku. Kekakuan terhadap penerapan hukum justru akan menghasilkan keadilan yang bersifat formal bukan keadilan yang bersifat substansial.

Terlepas dari pandangan yang kontradiksi atas dasar proses *stigmatisasi* dan *victimisasi*<sup>13</sup>, namun hal yang sangat menarik dikemukakan Romli Atmasasmita,

<sup>12</sup>. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980. hal. 74.

<sup>13</sup>. Menanggapi pernyataan Prof. Mardjono Reksodipoetro, Romli Atmasasmita, SH., LL.M. berpendapat bahwa walaupun tahap adjudikasi adalah tahap yang penting namun bukan sebagai peran yang dominan. Selanjutnya ia mengatakan: "Sekalipun memang benar bahwa pada tahap ini -dari sudut hukum- masing-masing pemeran utama (penasihat hukum/terdakwa dan penuntut umum) memiliki kedudukan yang sederajat akan tetapi pada tahap ini-dilihat dari sudut kriminologi dan victimologi-proses stigmatisasi dan victimisasi struktural sudah berjalan, bahkan sejak tahap penangkapan dan penahanan. Pada tahap adjudikasi inilah -antara lain karena sidang dinyatakan terbuka untuk umum-proses stigmatisasi dan viktimsiasi struktural mencapai puncaknya sehingga patut dipersoalkan tentang arti dan makna diberikannya kesempatan "kedudukan hukum yang sederajat/sama"

bahwa pada tahap adjudikasi dalam kenyataannya tidak jarang -sekalipun masing-masing pihak memperoleh kesempatan yang sama dan adil- menghasilkan putusan yang justru tidak dirasakan adil atau bahkan sama sekali menghasilkan suatu ketidakadilan sebagai hasil dari suatu "rekayasa"<sup>14</sup>.

Karena sangat dominannya tahap adjudikasi serta adanya indikasi menghasilkan suatu putusan yang tidak mencapai rasa keadilan, maka otoritas dan kewibawaan hakim sebagai pihak yang memegang peranan penting benar-benar sangat menentukan. Terlebih lagi dalam menghadapi proses persidangan perkara pidana anak dimana anak yang melakukan kejahatan itu bukan karena ia memiliki sifat jahat, tetapi karena anak tersebut berada dalam keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari sebab-sebab yang datang dari diri si anak itu sendiri maupun yang berasal dari luar, yaitu keadaan serta lingkungan yang mengelilinginya.<sup>15</sup> Dengan demikian, dihadapkannya seorang anak pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan bukan bertujuan untuk mengadilinya, melainkan usaha untuk mendorong agar anak dapat menginsafi atas perbuatan salah yang telah dilakukannya.

Dalam proses persidangan perkara pidana anak, bukan hanya bertumpu kepada menggunakan logika undang-undang (*legal sense*) melainkan diperlukan pula kajian yang didasarkan kepada menggunakan logika umum (*common sense*). Proses persidangan perkara pidana anak semata-mata harus ditujukan demi

---

dibandingkan dengan efek negatif yang sudah terbentuk dari proses stigmisasi dan viktimisasi struktural yang telah dialami sorang terdakwa sejak tahap penyidikan. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. "Sistem Peradilan Pidana", Binacipta, Bandung, 1996, hal. 43.

<sup>14</sup>. Ibid.

<sup>15</sup>. Loebby Loqman, *Perkembangan Kebijakan Legislatif Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP, 1995. hal.1-2.

perlindungan anak. Hal tersebut didasarkan kepada adanya pertimbangan khusus yaitu bahwa seorang anak jiwanya masih labil. Apabila terjadi sesuatu dalam kehidupannya, selamanya akan selalu mengalami trauma. Oleh karena itu dilaksanakannya persidangan perkara pidana anak harus ditujukan kepada perlindungan kesejahteraan anak baik fisik maupun mental.

Anak dalam perkembangannya belum mempunyai sesuatu pemahaman yang keluar dari pikirannya sendiri, melainkan keluar dari keadaan alamiah. Dengan demikian terhadap anak harus ada penanganan tersendiri, sehingga dapat dibedakan antara tindakan/perilaku yang didasarkan pada pikiran yang jahat sebagaimana layaknya dilakukan orang dewasa dengan tindakan yang karena sifat seorang anak. Atas dasar hal tersebut dalam proses persidangan perkara anak:

1. Harus memperhatikan anak-anak secara khusus;
2. Jangan memperlakukan anak seperti orang dewasa atau mengukur pribadi seorang anak dengan ukuran orang dewasa;
3. Trauma yang dialami oleh seorang anak apalagi dialami dalam pengalaman pertamanya, akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama masa hidupnya.<sup>16</sup>

Bertolak dari kenyataan tersebut, persoalan yang sangat penting dalam proses persidangan perkara pidana anak tidak hanya masalah formal prosedural -proses persidangan yang harus dilakukan menurut prosedur, asas dan doktrin yang telah ditetapkan, sehingga keadilan yang diperoleh bukan diukur dari segi substansinya tetapi dari prosedur formal yang digunakan- melainkan lebih

---

<sup>16</sup>. Loebby Loqman, *Hukum Pidana Anak*, Bahan Kuliah Pada Program Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum UNDIP, 1996, hal. 1.

mendasarkan kepada proses persidangan yang ditujukan kepada hakikat yang melatar belakangnya, yakni adanya sifat-sifat yang khusus dari seorang anak. Dengan demikian ditanganinya anak pelaku tindak pidana melalui peradilan benar-benar ditujukan demi perlindungan dan kesejahteraan anak.

Munculnya berbagai kasus anak pelaku tindak pidana yang ditangani melalui proses peradilan dengan berbagai perlakuan yang secara konsisten sesuai dengan persepsi yuridis prosedural, nampaknya ada suatu kebutuhan untuk mengkaji kembali peraturan-peraturan yang hingga kini dijadikan landasan operasional penyelenggaraan sidang anak. Kenyataan tersebut karena sampai saat ini undang-undang tentang peradilan anak yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk mencapai kesejahteraan bagi anak masih dalam proses pembentukan. Dilain pihak, adanya kasus-kasus sebagaimana diungkapkan di atas menyadarkan pada kita bahwa ternyata perilaku menyimpang yang dilakukan anak memang bersifat kriminal secara yuridis.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan Sudarto<sup>17</sup>, mengatakan bahwa:

"Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataupun pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataupun tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat". Namun demikian, secara tegas diungkapkan pula bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.

---

<sup>17</sup>. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal.140.

Demikian pentingnya mengedepankan kesejahteraan anak, secara tegas Arief Gosita, menyatakan bahwa:

"Penghalangan 'pengadaan' kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur sepirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor *kriminogen* (menimbulkan kejahatan) dan *Victimogen* (menimbulkan korban)".<sup>18</sup>

Pengakuan adanya komitmen dari masyarakat bangsa-bangsa untuk memberikan jaminan khusus bagi anak-anak generasi penerus bangsa di bidang hukum dan peradilan, terlihat melalui Kongres-Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian khusus terhadap masalah perlindungan hukum bagi anak. Sebagaimana dalam Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kajahatan ke IX (*Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) yang diselenggarakan pada tanggal 29 April - 8 Mei 1995 di Kairo, Mesir, menekankan pula perlunya diperhatikan tiga instrumen internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Anak Bermasalah dalam bidang hukum. Salah satu instrumen penting yang menyangkut penyelenggaraan peradilan anak (*Juvenile Justice*) adalah *UN Standard Minimum Rule for the Administraton of Juvenile Justice* Resolusi PBB Nomor 40/33 atau yang lebih dikenal dengan *Beijing Rules*.

Hal-hal yang mengatur tentang hak-hak anak (*Rights of Juvenile*), antara lain menyatakan bahwa selama dalam proses peradilan hak-hak anak harus benar-benar dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami tuduhan,

---

<sup>18</sup>. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, 1989, hal. 33.

hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua atau wali, hak untuk bertemu berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya, serta hak untuk banding. Di samping itu, untuk menghindarkan *stigmatisasi* selama dalam proses peradilan, *privacy* anak harus dilindungi serta dihindarkan dari pemaparan oleh media massa.<sup>19</sup>

Hal lain yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks sistem peradilan anak adalah sangat besarnya peranan pembimbing kemasyarakatan atau lebih dikenal dengan BISPA. Sesuai dengan apa yang diatur dalam rule 16, *Beijing Rules*, dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.06-UM.01.06.1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak diatur pula dalam Pasal 12. Dalam ulasan/komentar rule 16<sup>20</sup>, antara lain dikatakan bahwa:

"Laporan-laporan penyelidikan sosial adalah suatu bantuan yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam proses persidangan yang melibatkan anak-anak. Pihak yang berkompeten harus memberikan informasi terhadap fakta-fakta yang relevan tentang anak yang bersangkutan seperti latar belakang sosial dan keluarga, prestasi sekolah, pengalaman pendidikan dan lain sebagainya..."

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI, laporan sosial tersebut antara lain berisi tentang:<sup>21</sup>

1. Keadaan anak, baik fisik, psikis, sosial maupun ekonomi;
2. Keadaan rumah tangga orang tua atau wali atau orangtua asuh serta penghuni lainnya;
3. Keterangan mengenai kelakuan anak di sekolah atau di tempat pekerjaan;
4. Hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungan seperti RT, Kepramukaan dan sebagainya.

<sup>19</sup>. SMR-JJ (Beijing Rules). Rule. 7-8. Op.cit. Hal. 6.

<sup>20</sup>. Beijing Rule, Loc.cit. Rule 16, Commentary.

<sup>21</sup>. Peraturan Menteri Kehakiman. Op.cit. Pasal 12 ayat (3).

Dengan adanya informasi laporan sosial tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bagi hakim tentang apa yang menjadi penyebab anak melakukan kejahatan. Selanjutnya hakim dapat memilih kemungkinan sanksi yang paling tepat yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 KUHP.

Menurut Arif Gosita, perlunya hak-hak anak sebagai pelaku diberi perhatian khusus selama proses peradilan, karena proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Oleh karena itu, selama proses persidangan hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan meliputi:

1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tatacara persidangan dan kasusnya.
2. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikutserta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transpor, perawatan kesehatan).
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya



atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP (Pasal 1 ayat 22).

7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.<sup>22</sup>

Karena persoalan peradilan anak pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi hak-hak anak guna mewujudkan kesejahteraan anak, yang merupakan bagian integral dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial, maka persoalan yang sangat mendasar dari kesemuanya itu akan bertitik tolak kepada masalah kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan komponen dari ilmu hukum pidana modern, adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>23</sup>

Menyangkut persoalan Sistem Peradilan Pidana dengan berpijak kepada UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) yang di dalamnya menganut sepuluh prinsip, di dalam praktik tidak lepas dari desain prosedur sistem peradilan pidana yang meliputi tiga tahap, yakni tahap sebelum peradilan (*pre-adjudication*), tahap sidang pengadilan (*adjudication*), dan tahap setelah pengadilan (*post-adjudication*). Pada tahap

<sup>22</sup>. Arif Gosita, *Pengembangan Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*: (Beberapa Catatan), Rajali, Jakarta, 1986, hal. 51-54.

<sup>23</sup>. Marc Ancel, *Social defence, A Modern Approach to Criminal Problem*, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penulisan Buku dalam rangka Kerjasama Indonesia-Belanda Bidang Hukum, 1995-1996, hal. 24.

adjudikasi merupakan tahap yang “dominan” dalam seluruh proses. Hal tersebut didasarkan kepada KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan kepada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang”, sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seorang warga negara yang menjadi terdakwa, akan paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap adjudikasi inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.<sup>24</sup>

Atas dasar hal tersebut di atas, penulis mencoba melakukan suatu kajian akademik ilmiah tentang Persidangan Perkara Pidana Anak. Sehingga diperoleh rumusan dan aplikasi model sidang anak yang Ideal, yakni sidang anak yang mampu memberikan gambaran tentang cara menangani anak pelaku tindak pidana, yang dapat menumbuhkan pengertian kepada anak, dimana anak dalam kondisi jiwanya yang labil tidak tergoyahkan karena proses persidangan. Kajian tersebut dilakukan melalui suatu penelitian yang dijadikan suatu bentuk tesis dengan judul:

**“TINJAUAN TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ANAK  
MENCARI MODEL SIDANG ANAK YANG IDEAL”**

## **B. Perumusan Masalah**

Walaupun perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana baik yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa tidak mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil, namun karena anak mempunyai karakteristik tersendiri maka

<sup>24</sup> Mardjono Reksodipoetro, *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Menegakan Hukum dalam batas-batas toleransi)"*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 13.

pendekatan dan tujuan dari proses persidangan pidananya berbeda dengan proses persidangan pidana untuk orang dewasa. Bila dalam sistem peradilan pidana (dewasa) sub-sistem-subsistemnya terdiri atas (a) Kepolisian; (b) Kejaksaan; (c) Pengadilan; (d) Pemasyarakatan (termasuk BISPA), dan (e) Penasihat Hukum, dalam sistem peradilan anak unsur pendukung sistem (subsistem)nya pun tidak berbeda, yaitu (1) Kepolisian, (2) Kejaksaan, (3) Pengadilan Anak, (4) Lembaga Pendidikan Anak Negara (LPAN) termasuk di dalamnya BISPA, dan (5) Penasihat Hukum. Hanya peranan BISPA dalam kontek sistem peradilan anak lebih besar bila dibandingkan dengan peranannya dalam sistem peradilan pidana (dewasa).<sup>25</sup>

Sebagai negara beradab yang turut aktif dalam percaturan dunia Internasional, merupakan suatu kewajiban bagi Indonesia untuk memberikan jaminan perlindungan bagi kesejahteraan anak sebagaimana yang telah disepakati bersama bangsa-bangsa di dunia. Berkenaan dengan jaminan perlindungan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana, adanya kesepakatan-kesepakatan Internasional perlu direfleksikan di dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur proses persidangan perkara pidana anak. Oleh karena itu untuk mendapatkan rumusan dan aplikasi tentang proses persidangan perkara pidana anak, penelitian akan dikembangkan dari permasalahan:

1. Apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi alas hukum dalam proses persidangan perkara pidana anak sudah dapat melindungi hak-hak anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana ?
2. Apakah sidang perkara pidana anak telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang disangka telah melakukan tindak pidana ?

<sup>25</sup>. Paulus Hadisuprpto, *Bispa, Subsistem Peradilan Anak*, Kompas 19 Juli 1995, hal. IV.

3. Model sidang anak yang bagaimana yang dapat mewujudkan persidangan anak yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang disangka telah melakukan tindak pidana, serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mengaplikasikannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauhmana ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi alas hukum dalam proses persidangan perkara pidana anak memberikan perlindungan kepada hak-hak anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kecenderungan model sidang yang dipakai dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana.
3. Untuk merumuskan model sidang anak yang ideal yakni sidang anak yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang akan dihadapi dalam implementasinya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak. Sedangkan secara praktis, diharapkan dapat memberi masukan kepada para penegak hukum, serta para pihak yang berkompeten dalam penanganan proses persidangan perkara pidana anak.

## E. Kerangka Teori

Salah satu bentuk penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan digunakannya hukum pidana, yang dijalankan melalui sistem peradilan pidana/penegakan hukum pidana (*Law enforcement*). Sistem peradilan pidana itu sendiri merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja suatu sistem dalam penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>26</sup> Hal lain yang tidak bisa dilepaskan dalam sistem peradilan anak adalah dilibatkannya lembaga BISPA. Dapat dikatakan bahwa peradilan anak meliputi segala kegiatan/aktivitas peradilan, yaitu pemeriksaan dan penuntutan perkara yang menyangkut kepentingan anak.<sup>27</sup>

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan satu-satunya tumpuan harapan, namun karena pada bidang penegakan hukum dipertaruhkan makna dari "Negara berdasarkan atas hukum", maka keberhasilannya sangat di harapkan.<sup>28</sup> Keberhasilan suatu sistem peradilan pidana bukan hanya diukur dari adanya seperangkat aturan/norma yang dijadikan landasannya, melainkan harus dilihat pula sampai seberapa jauh norma tersebut diaplikasikan dalam kenyataannya. Dengan kata lain untuk mengukur keberhasilan penegakan hukum harus terdapat sinkronisasi antara *das sein* dengan *das sollen*.

<sup>26</sup> Mardjono Reksodipoetro, 1993, Op.cit, hal. 1.

<sup>27</sup> Sudarto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung, 1977, hal. 83. Lihat pula Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal.129.

<sup>28</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 7.

Hukum pidana dalam pelaksanaannya menyentuh manusia secara luas, bukan hanya manusia sebagai pelaku kejahatan tetapi membawa konsekuensi keterlibatan aparat penegak hukum, korban, dan masyarakat bahkan kesejahteraan seluruh bangsa. Demikian kompleksnya persoalan yang ditimbulkan oleh hukum pidana, membawa pengaruh kepada upaya mempertahankan kewibawaan hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Kenyataan yang dihadapi dalam proses peradilan pidana terkadang bahkan seringkali orang yang disangka melakukan tindak pidana merasa telah diperlakukan secara tidak adil. Walaupun pidana yang dijatuhkan dapat diterima oleh pelaku, namun dirasakan olehnya bahwa pengadilan sama sekali tidak memahami mengenai perbuatannya, serta sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap masa depan dari hidupnya. Dengan demikian jalannya proses peradilan dalam pandangan terdakwa tidak lebih sebagai sesuatu yang menyempurnakan dari apa yang telah dimulai dalam pemeriksaan sebelumnya.

Apabila kita hubungkan dengan dua model sistem peradilan pidana yang didasarkan pada kondisi sosial, budaya dan struktural Amerika Serikat dari Packer<sup>29</sup>, kenyataan tersebut merupakan pencerminan dari model control kejahatan (*Crime Control Model*) yang merupakan lawan dari model hak untuk membela diri (*Due Process Model*). Model control kejahatan menetapkan premi dalam pemrosesan kasus-kasus melalui sistem yang merupakan suatu jalur majelis yang dibentuk peradilan *conveyor-belt* (semacam ban berjalan). Sebaliknya model hak untuk membela diri merupakan serangkaian rambu-rambu yang disusun untuk

<sup>29</sup>. Lebih lanjut lihat Herbert L.Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California, 1968, p. 150-153.

mempersulit mengajukan tertuduh ke jalur majelis yang lebih mengutamakan nilai individu dan pembatasan kekuasaan negara. Kedua model tersebut oleh Pecker dipertimbangkan sebagai dua sistem nilai, model kontrol kejahatan yang menganggap penekanan kejahatan merupakan fungsi dari proses perkara pidana yang paling penting dan model hak untuk membela diri yang menganggap tertuduh tidak dirugikan kepentingannya dalam menekan kejahatan.

Menurut Mardjono<sup>30</sup>, *Due Proses Model* (proses hukum yang adil atau layak) merupakan model yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana. Namun model proses hukum yang adil seringkali hanya dikaitkan pada penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka. Sesungguhnya proses hukum yang adil lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan.

Berkenaan dengan penegakan hukum melalui proses peradilan pidana,

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa:

"Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia pada hakikatnya tidaklah mungkin. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan. Dan suatu pidana yang ditimpakan setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari orang yang berperkara, akan merupakan suatu penghancuran diri masa depan."<sup>31</sup>

Dari uraian tersebut nampak bahwa dalam proses peradilan pidana faktor kemanusiaan merupakan sesuatu hal yang harus melandasi pemikiran para

<sup>30</sup>. Mardjono, 1993. Op.cit, hal. 6.

<sup>31</sup>. Roeslan Saleh, *Mengadili adalah Proses yang terjadi antara Manusia dan Manusia*, Tanpa tahun, hal. 19.

penegak hukum teristimewa hakim. Walau bagaimanapun proses peradilan pidana sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian nestapa/penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya (teori pembalasan), melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pidana dan hukum pidana, yakni perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sebagai aspek perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari berbagai sudut, yang meliputi:

1. Perlindungan masyarakat terhadap perbuatan jahat (kejahatan);
2. Perlindungan masyarakat dari pelaku (orang jahat);
3. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi pidana;
4. Mempertahankan keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan.<sup>32</sup>

Walaupun dalam arti sempit konsepsi tentang kenakalan anak tidak ada bedanya dengan konsepsi tentang kejahatan atau pelanggaran,<sup>33</sup> namun dalam hal proses peradilan perkara pidana anak selain pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan anak sebagai pelaku merupakan prioritas yang utama. Artinya bahwa hakikat yang mendasari peradilan anak adalah adanya perlindungan hak-hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak, yang antara lain menyatakan:

*"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, court of law, administrative authorities or*

<sup>32</sup>. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994. hal. 92-95.

<sup>33</sup>. Dikatakan sebagai kenakalan, karena perbuatan pidana itu dilakukan oleh seorang anak. Jika hal tersebut dilakukan oleh seorang dewasa, maka disebut kejahatan atau pelanggaran. Dirdjosisworo, *Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1988, hal. 5.



*legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration* (Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).<sup>34</sup>

Dengan demikian, dalam penanganan anak pelaku tindak pidana diperlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Perlunya penanganan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana, menurut Haskell dan Yoblonsky didasarkan kepada faktor-faktor:

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun.
2. Anak delikuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya
3. Dalam menangani akan delikuen, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya.
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delikuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terafi daripada penghukuman.
5. Meskipun sudah terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitik beratkan pada aspek hukumnya, dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu (*informal and personalized procedure*).<sup>35</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>36</sup>, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap dalam berbagai pernyataan bahwa:

<sup>34</sup>. Resolusi PBB Nomor. 44/25, 20 November 1989, *Convention On Te Rights Of The Child*, United Nation Children's Fund.

<sup>35</sup>. Martin R Haskell & Lewis Yablonsky, *Criminology, Crime and Criminality*, Chicago, Rand McHally College Publishing Company, 1974, p. 223-224.

<sup>36</sup>. Muladi dan Barda Nawawi A, Op.cit. hal. 115.

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan *persuasif-edukatif* dan pendekatan kejiwaan (*psikologis*) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Atas dasar hal tersebut, titik berat dilaksanakannya sidang anak bukan didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan. Tujuan proses persidangan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang kongkrit.<sup>37</sup>

Berbagai pernyataan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum pidana dalam rangka perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana, merupakan sesuatu yang dapat dijadikan bahan masukan dalam melakukan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*). Apabila dilihat dari politik hukum yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat,<sup>38</sup> maka melaksanakan politik hukum pidana mengandung arti

<sup>37</sup>. Lela B. Costin, *The Child and the Court*, New York, McGraw.Hill Book Company, 1972. Dalam Suwantji Sisworahardjo, *Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 33.

<sup>38</sup>. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 150.

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>39</sup>

Dikemukakan pula oleh Sudarto, bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>40</sup> Sejalan dengan maksud tersebut, dinyatakan pula bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>41</sup>

Atas dasar pernyataan tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa apabila dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Hal tersebut sesuai dengan definisi *Penal Policy* sebagaimana yang dikemukakan Marc Ancel, dimana mempunyai arti yang sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.<sup>42</sup>

Politik hukum pidana dalam upaya penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, sangat relevan pula dengan apa yang dikemukakan A. Mulder, bahwa *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

<sup>39</sup> Sudarto, *ibid*, hal. 153.

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20, 93.

<sup>41</sup> Sudarto, *ibid*, 1983, hal. 109.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penulisan Buku Ex Kerjasama Indonesia-Belanda Bidang Hukum, 1996, hal. 29.

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Garis kebijakan tersebut erat kaitannya dengan permasalahan perubahan perundang-undangan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Loebby Loqman<sup>43</sup> masalah tersebut dapat ditempuh melalui tiga cara. *Pertama* mengadakan perubahan dengan sistem global, yaitu dengan membuat suatu aturan pidana tersendiri terhadap perbuatan tertentu, baik aturan substansinya maupun aturan formalnya. *Kedua* dengan cara evolusi, yaitu merubah atau menambah pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Dan *ketiga* dengan cara kompromi, yaitu dengan menambahkan bab baru dalam KUHP.

Dilihat dari permasalahan sentral kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, erat pula kaitannya dengan persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Menyangkut persoalan kriminalisasi, Sudarto memberikan penekanan untuk memperhatikan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Bahwa penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana ditujukan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

<sup>43</sup>. Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hal. 18-19.

2. Bahwa perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
3. Bahwa penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
4. Bahwa penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>44</sup>

Dengan demikian, dalam upaya melakukan kebijakan hukum pidana di samping diperlukan suatu perencanaan yang cukup matang, juga diperlukan kehandalan dalam penanganannya. Sehingga dapat memadukan antara kepentingan politik di satu pihak dan kepentingan/kesejahteraan masyarakat di lain pihak. Sangatlah tepat apa yang dikemukakan Marc Ancel bahwa *penal policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Ibu Kota Propinsi Jawa Barat, dengan asumsi bahwa sebagai salah satu Ibu Kota Propinsi yang berbatasan dengan Ibu

---

<sup>44</sup>. Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 36-40.

Kota Jakarta, di samping memiliki wilayah yang cukup luas juga memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dan heterogen. Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota dengan tingkat perkembangan pembangunan fisik yang sangat pesat, diikuti pula dengan pergeseran pola hidup masyarakat sebagai pengaruh dari berbagai kondisi sosial, ekonomi, politik, serta budaya. Kondisi demikian membawa dampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada kota-kota besar lainnya. Kenyataan tersebut nampak dengan relatif banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani melalui peradilan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkara-perkara pidana anak yang ditangani melalui pengadilan tercatat sebagai berikut: Tahun 1991 sebanyak 16 perkara, tahun 1992 sebanyak 16 perkara, tahun 1993 sebanyak 14 perkara, tahun 1994 sebanyak 17 perkara, dan tahun 1995 sebanyak 15 perkara.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, atas dasar berbagai pertimbangan kondisi, kemampuan, serta waktu yang dimiliki, lokasi penelitian dilakukan di wilayah Ibu Kota Propinsi Jawa Barat yang meliputi Pengadilan Negeri I Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung.

---

<sup>45</sup>. Sumber data dari Pengadilan Negeri I Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang dijadikan bahan dalam penelitian ini meliputi data skunder dan data primer. Namun demikian, data skunder merupakan data yang diutamakan, sedangkan data primer sebagai data pelengkap.<sup>46</sup>

Data Skunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik yang berupa data skunder yang bersifat publik, maupun data yang dipublikasikan yang merupakan data skunder dibidang hukum. Data Primer, yaitu data yang ada dan ditemukan di lapangan ( data empiris).

### b. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.<sup>47</sup> Untuk data sekunder, sumber data yang dipergunakan lebih dititik beratkan kepada berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, konsep Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah dibidang hukum khususnya yang berkenaan dengan masalah perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Sedangkan sumber data primer yang dipergunakan diperoleh melalui penelitian empiris di instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun lembaga BISPA yang ada di Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut bertitik tolak dari banyaknya perkara pidana anak yang tangani di Pengadilan Negeri I Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung,

---

<sup>46</sup>. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.9-10. Lihat juga Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal.12.

<sup>47</sup>. Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hal.11-12.

bila dibandingkan dengan beberapa pengadilan yang ada di Jawa Barat pada umumnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifat penelitian yang deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum skunder yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum skunder.<sup>48</sup> Antara lain yang berupa dokumen, risalah, ketentuan peraturan perundang-undangan, arsip maupun karya ilmiah para sarjana yang erat hubungannya dengan persoalan anak bermasalah. Hasil studi kepustakaan tersebut merupakan dasar analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Studi lapangan, yaitu melakukan riset pada instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta BISP. Baik yang berupa hasil wawancara dengan Penyidik, Jaksa, Hakim serta pekerja BISP yang menangani perkara pidana anak, dan atau hasil observasi dengan melakukan pengamatan pelaksanaan sidang. Hasil yang diperoleh dari studi lapangan tersebut dapat memberikan gambaran guna mendukung dan melengkapi bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

### 4. Metode Penyajian dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil studi lapangan, dikumpulkan dan diidentifikasi, kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penyajian analisis yuridis dilakukan

---

<sup>48</sup>. Ronny Hanitidjo Soemitro, *ibid*, hal. 12.



dengan mengkaji sampai sejauhmana peraturan perundang-undangan yang ada memberikan alas hukum untuk melaksanakan proses persidangan perkara pidana anak. Hal tersebut sesuai dengan maksud penelitian dimana bukan hanya ingin menggambarkan data semata-mata, melainkan ingin mengungkapkan realitas formulasi sidang anak yang ideal dengan tolak ukur kepada dokumen-dokumen yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Analisis yuridis-normatif dipergunakan untuk mengkaji dokumen serta peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi anak bermasalah. Sedangkan analisis kuantitatif bertitik tolak dari analisis yuridis empiris dengan dilengkapi analisis historis dan komparatif. Dari hasil analisis tersebut dipergunakan untuk menggambarkan dan mengungkapkan realitas kebijakan hukum pidana yang diformulasikan dalam perundang-undangan tentang Peradilan Anak, apakah kebijakan hukum pidana yang dilakukan telah dapat meletakkan alas hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Analisis Yuridis-empiris dipergunakan untuk mengungkapkan relevansi kebijakan hukum pidana yang diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Anak dengan perkembangan tindak kenakalan anak pada saat ini. Dengan demikian, dapat diungkapkan bagaimana peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Anak perlu diformulasikan sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diharapkan, dengan tetap berpegang teguh kepada konsistensi falsafah Pancasila dan UUD 1945.

### G. Jadwal Penelitian

	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
Persiapan Pendahuluan	*****					
Pengambilan data		*****	*****			
Pengolahan data			*****	*****		
Evaluasi					*****	
Penyajian laporan						*****

### H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, jadwal kegiatan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka

Dalam Bab tinjauan pustaka ini penulis mencoba menguraikan tentang batasan dan pengertian yang meliputi batasan usia dan pengertian anak, tindak pidana anak, batas usia dalam pertanggungjawaban pidana, perkembangan peradilan anak. Lebih

lanjut diuraikan pula dasar serta pedoman yang merupakan landasan yuridis dalam usaha melindungi anak pelaku tindak pidana. Landasan yuridis tersebut meliputi ketentuan-ketentuan instrumen internasional, maupun yang bersipat nasional. Bab ini diakhiri dengan uraian tentang perlindungan hukum dalam proses persidangan.

- Bab III : Analisis terhadap penegakan hukum dalam perkara pidana anak. Dalam Bab ini diuraikan mengenai proses persidangan perkara pidana anak, baik ditinjau dari segi peraturan perundang-undangannya maupun praktik pelaksanaan sidang. Dalam analisis ini didasarkan atas data yang berhasil dihimpun dari berbagai fakta yang terungkap selama peneliti berada di lapangan. Selanjutnya mencoba merumuskan model sidang anak yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dengan mengungkapkan pula
- Bab IV : kendala-kendala yang dihadapinya.

#### Kesimpulan dan Saran

Dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dalam Bab-bab sebelumnya diakhiri dengan suatu kesimpulan yang meliputi uraian yang berupa jawaban atas pokok-pokok permasalahan. Di samping itu penulis juga mencoba memberikan saran-saran yang erat relevansinya dengan berbagai permasalahan yang ditemukan.

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Batasan Dan Pengertian Tentang Anak**

##### **1. Usia dan Pengertian Anak**

Menurut pengetahuan umum yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale* adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan ukuran/kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, hingga saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam usia berapa seseorang dikategorikan sebagai seorang anak. Atas dasar kenyataan tersebut, untuk memperoleh rumusan yang jelas tentang pengertian anak, pembahasan akan dikaji dari aspek sosiologis, psikologis, maupun segi yuridis.

##### **1.1. Pengertian Anak Menurut kajian Sosiologis**

Dalam masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam

pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Dikemukakan oleh Ter Haar, bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>49</sup> Lebih jauh dikemukakan pula oleh Soepomo, bahwa:

“Tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa; hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. ‘Anak yang belum dewasa’ di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri; yang sungguh masih kanak-kanak. Kami tidak menemukan petunjuk bahwa hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur yang pasti, bilamana seorang dianggap telah dewasa sejak kuat gawe (dapat bekerja); sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dari ciri-ciri yang nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum; apakah ia sudah atau belum dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa, daerah atau lingkungannya.<sup>50</sup>

Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat khususnya hukum adat di Jawa Barat, dapat dilihat dari ciri-ciri:

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

<sup>49</sup>. Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, SH., *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. hal. 18.

<sup>50</sup>. Ibid. hal. 19.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis ukuran/kriteria yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan kepada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Di samping itu mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya, oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seorang anak diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa.

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. Seseorang dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah *baligh* apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa (*al-huluma*). Sedangkan bagi seorang wanita dikatakan sudah *baligh* apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.

Dalam pandangan hukum Islam seseorang yang dikategorikan memasuki usia *baligh* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain terhadap mereka yang telah *baligh* dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.<sup>51</sup>

## 1.2. Pengertian Anak Menurut Kajian Psikologis

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

Dalam hal fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, Zakiah Daradjat<sup>52</sup> menguraikan bahwa:

### 1. Masa kanak-kanak, terbagi dalam:

- a) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun. Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu atau ibu pengganti. Pada umur ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaannya, seperti disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara. Menurut Soesilowindradini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung pada orang dewasa, maka ia masih

<sup>51</sup>. Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan Dan Tantangan*. Ruhama Jakarta, 1994, hal. 11.

<sup>52</sup>. Zakiah Daradjat, *Faktor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*. Bina Cipta, Bandung, 1985, hal. 38-39.

mudah diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak yang lebih besar dari padanya akan senang kepadanya.<sup>53</sup>

b) Masa kanak-kanak pertama, yaitu umur antara 2-5 tahun.

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada umur ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.

c) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama serta berkumpul tanpa aturan sehingga biasa disebut dengan *gang age*. Pada tahap ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.<sup>54</sup>

2. Masa Remaja antara usia 13- 20 tahun.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap

<sup>53</sup>. Soesilowindradini, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*, Usaha Nasional, Surabaya,...hal. 71.

<sup>54</sup>. Pada usia sekolah ini perkembangan anak amat pesat. Karena lingkungan keluarga tidak lagi mampu memberikan fasilitas untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak, terutama fungsi intelektual dalam mengejar kemajuan jaman modern, maka untuk mengembangkan semua potensinya, seorang anak memerlukan satu lingkungan sosial baru yang lebih luas berupa sekolahan. Pada usia sekolah ini sikap hidup yang egosentris diganti dengan sikap yang *zakelijk* obyektif dan empiris berdasarkan pengalaman. Ketika menginjak usia 13-14 tahun, sikap tersebut berkembang menjadi logis rational. Emosionalitas anak menjadi berkurang, sedangkan unsur intelek dan akal budi (*ratio*, fikir) menjadi semakin menonjol. Minat yang obyektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Dengan demikian, masa sekolah rendah ini disebut pula sebagai periode intelektual. Kartini Kartono, *Psikologi Anak*. Alumni, Bandung, 1979, hal. 136-137.



sosial dan kepribadian. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa guncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

Sama halnya dengan apa yang dikemukakan Zakiah Daradjat, Soesilowindradini membagi masa remaja ke dalam masa remaja awal dan masa remaja akhir. Pada masa yang pertama adalah masa seorang anak menginjak usia 13 sampai 17 tahun. Dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Bahkan pada suatu waktu dia diperlakukan sebagaimana layaknya anak-anak. Sedangkan pada masa yang disebut terakhir adalah masa antara umur 17 sampai 21 tahun. Pada masa ini seorang anak telah menunjukkan kestabilan yang bertambah bila dibandingkan dengan masa remaja sebelumnya.<sup>55</sup>

### 3. Masa dewasa muda, antara umur 21 sampai 25 tahun.

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, namun dari segi kematangan agama dan ideologi masih dalam proses pematapannya.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam

<sup>55</sup>. Soesilowidradini, op.cit. hal. 71.

kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir, seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa melainkan baru menginjak remaja (*pubertas*). Pada masa remaja ini merupakan masa pertumbuhan, baik dari segi rohani maupun jasmani. Pada masa ini pada umumnya mengalami suatu bentuk krisis, berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani. Pada masa remaja atau pubertas ini bisa dibagi dalam empat fase, yaitu:

1. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa *pueral* atau pra-pubertas.
2. Masa menentang kedua, fase negatif, *Trotzalter* kedua, periode *Verneinung*.
3. Masa pubertas sebenarnya; mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas wanita pada umumnya berlangsung lebih awal daripada pubertas anak laki-laki.
4. Fase adolesensi, mulai usia kurang lebih 17 tahun sampai sekitar 19 atau 21 tahun.<sup>56</sup>

Atas dasar hal tersebut seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 tahun. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.

---

<sup>56</sup>. Kartini Kartono. Op.cit, hal.150.

### 1.3 Pengertian Anak Menurut Kajian Yuridis

Secara hukum kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan akibat hukum tersebut menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana erat hubungannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, secara tegas menyatakan bahwa:

*"For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier".* ( Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).<sup>57</sup>

Sedangkan menurut SMR-JJ<sup>58</sup>, menyatakan bahwa:

*"Juvenile is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult.*

(Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum

<sup>57</sup>. United Nations Children's Fund, *Convention On The Rights Of The Child*, Resolusi PBB, No. 44/25, 20 November 1989.

<sup>58</sup>. SMR-JJ (Beijing Rules), *Scope of the Rules and definition used*, 1986. Op.cit.

masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa).

Dalam komentar antara lain dijelaskan sebagai berikut:

*"... It should be noted that age limits will depend on, and are explicitly made dependent on, each respective legal system, thusfully respecting the economic, social, political, cultural and legal system of Member States. This make for a wide variety of ages coming under the definition of "juvenile", ranging from 7 years to 18 years or above.... ( .... Dalam hal ini harus dicatat bahwa batas usia anak akan sangat tergantung pada sistem hukum negara anggota di satu pihak dan kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat di lain pihak, oleh karena itu batasan anak dirumuskan secara relatif, yaitu anak (juvenile) adalah seseorang yang berumur antara 7-18 tahun atau mungkin di atasnya....).*

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, merumuskan sebagai berikut:

"Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

Dalam penjelasannya lebih lanjut diuraikan bahwa:

"Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa:

"Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku".<sup>59</sup>

<sup>59</sup>. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang *Kesejahteraan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 1979 No. 32.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), ketentuan yang merumuskan kategori dewasa dan belum dewasa dapat kita temukan dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang menyatakan:

- (1) Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “belum dewasa”, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- (2) Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur dua puluh dua tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.<sup>60</sup>

Dari rumusan tersebut dapat diartikan bahwa batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) adalah umur 21 tahun, kecuali:

- anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, atau
- pendewasaan (*venia aetatis*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 419 KUHPerdata.

Pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia dua puluh dua tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaan seseorang. Dan seorang walaupun tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan tetapi berada di bawah perwalian, berarti ia belum dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun tidak secara tegas mengatur ketentuan tentang ukuran seseorang digolongkan sebagai seorang anak, namun apabila kita kaji dari beberapa ketentuan yang tercantum di dalamnya, tersirat makna yang menunjukkan batas pendewasaan seseorang. Dalam Pasal 6 ayat (2) yang mengatur tentang syarat

<sup>60</sup>. BAB XV. bagian 1: Kebelumdewasaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perkawinan, ditegaskan bahwa adanya keharusan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun untuk mendapat ijin dari kedua orang tua. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) memuat batas umur minimum bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, dimana bagi pria usia 19 tahun sedangkan bagi wanita telah berusia 16 tahun. Begitu juga apa yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (1) dikatakan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka ia berada di bawah kekuasaan wali.

Dari beberapa ketentuan tersebut ternyata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

1. Usia syarat kawin, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
2. Usia ijin kawin, dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun, harus ada ijin dari orang tuanya.
3. Usia dewasa, yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Apabila kita gunakan penafsiran secara *argumentum a'contrario*, nampak jelas bahwa yang dimaksud telah dewasa menurut undang-undang tersebut adalah setiap orang yang telah berusia 18 tahun. Dimana mereka dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun

apabila kita teliti beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur batas anak, juga terdapat keaneka ragaman.

Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. Sedangkan menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

Dari ketiga kriteria tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila belum mencapai umur 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun, sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 1974.

Dalam perkembangan selanjutnya, apabila kita perhatikan ketentuan yang mengatur masalah anak, baik yang terdapat dalam Rancangan KUHP (RKUHP) maupun Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak (RUUPA), nampak adanya suatu kemajuan yang sangat berarti terhadap penentuan batas usia anak.

Dalam konsep (RKUHP) yang disusun oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993, ditentukan batas usia antara umur 12 tahun sampai 18 tahun (Pasal 96/94a). Sedangkan menurut Pasal 1 nomor 1 b RUUPA, dikatakan

bahwa: "Anak adalah orang yang dalam perkara pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah."<sup>61</sup>

Sejalan dengan kedua ketentuan tersebut, dalam undang-undang tentang Pemasyarakatan menentukan batas usia bagi seseorang anak adalah 18 tahun. Hal tersebut dapat kita lihat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 nomor 8, yang berbunyi:

"Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Nampak jelas dalam Undang-Undang Pemasyarakatan mengkategorikan seorang anak baik anak pidana, anak negara maupun anak sipil adalah mereka yang memperoleh pendidikan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Batas usia tersebut menunjukan pula perbedaan warga binaan yang dapat dikualifikasikan sebagai nara pidana dan sebagai anak didik pemasyarakatan.

Dari berbagai ketentuan yang mengatur pengertian anak, nampak adanya perbedaan kriteria batas usia yang diberikan. Kriteria tersebut meliputi antara umur 16 sampai dengan 21 tahun. Namun demikian dengan adanya kriteria baik yang diatur dalam Konsep RKUHP maupun Rancang Peradilan

<sup>61</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Anak.



Anak kesimpangsiuran dalam menafsirkan batas usia anak dapat teratasi. Sehingga munculnya keputusan sebagaimana nampak dalam putusan MA No. 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955, dimana perkara yang diadili di daerah Bali, umur 15 tahun dianggap telah dewasa, sedangkan dalam putusan MA No.601 K/Sip/1976 tanggal 18 Nopember 1976, untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta umur 20 tahun dianggap telah dewasa.<sup>62</sup> Pada masa yang akan datang tidak akan ditemukan lagi.

## B. Tindak Pidana Anak

Dalam lapangan hukum pidana sesungguhnya tidak dikenal istilah “tindak pidana anak”, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah istilah tindak pidana. Istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seorang yang telah dewasa atau seorang anak.

Dengan demikian istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata “Tindak Pidana” dan “Anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri .

Istilah tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* bahasa Belanda, atau *crime* dalam bahasa Inggris. Namun demikian, apabila kita lihat dalam beberapa literatur dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai untuk menterjemahkan *strafbaar feit*.

Beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat kita jumpai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, antara lain:

### 1. Peristiwa pidana

<sup>62</sup>. Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 19.

2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum
5. Perbuatan yang boleh dihukum dan lain-lain.

Adanya berbagai penafsiran tersebut tidak lain karena masing-masing didasarkan kepada alasan yang berbeda, sehingga muncul berbagai rumusan atau definisi yang berlainan pula.

Sudarto, menggunakan istilah Tindak Pidana sebagai istilah lain dari *strafbaar feit*, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*.

Sedangkan Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana I menggunakan istilah Peristiwa Pidana. Dengan alasan bahwa istilah Peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*- positif) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*, *niet-doen* - negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu).<sup>63</sup>

Mulyatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih suka menggunakan istilah Perbuatan Pidana. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam pidatonya pada tahun 1955, dengan judul Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Alasan beliau bahwa perbuatan ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Lebih lanjut dikatakan: (Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung, 1968, hal....

<sup>64</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 39.

Dalam kesempatan lain dikemukakan pula bahwa dipakai kata perbuatan dengan alasan bahwa kata perbuatan adalah suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkrit. Pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Dengan demikian Ia menganggap kurang tepat menggunakan istilah peristiwa pidana sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 14 UUDS 1950 untuk memberikan suatu pengertian yang abstrak. Peristiwa adalah pengertian yang kongkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja. Hal tersebut sama halnya dengan pemakaian istilah Tindak dalam Tindak Pidana.<sup>65</sup>

Nampaknya saat ini telah muncul kesepakatan diantara para sarjana untuk menggunakan istilah Tindak Pidana, hal tersebut selain telah banyak dipakai dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga telah dicantumkan secara tegas dalam konsep RKUHP. Alasan yang dikemukakan antara lain bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan kepada perbuatan (*Daad*) dan pembuatnya (*Dader*), dengan demikian tindak pidana menunjuk kepada perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, termasuk perbuatan lalai (*nalaten*).

Namun demikian, karena adanya berbagai istilah yang diberikan serta tidak adanya penjelasan dari pembentuk KUHP apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, maka untuk mengetahui lebih jauh masud dari bermacam-macam istilah yang diberikan oleh para sarjana (doktrin), kiranya perlu pula kita kaji pengertian dari berbagai istilah yang dimaksud.

---

<sup>65</sup>. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54-55.

Salah satu rumusan dari *strafbaar feit* yang bersifat umum, dikemukakan oleh Hanzewinkel Suringa,<sup>66</sup> yaitu: "Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya".

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah :

"Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana".<sup>67</sup>

Yang dimaksud peristiwa pidana menurut Utrecht, adalah:

"Suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum".<sup>68</sup>

Karni yang menggunakan istilah delik, memberikan pengertian sebagai berikut:

"Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan".<sup>69</sup>

Sedangkan menurut Moelyatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah:

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan

<sup>66</sup> . Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,, 1990, hal. 172.

<sup>67</sup> . Sudarto, 1990. Op.cit. hal. 9.

<sup>68</sup> . Utrecht, 1968. Op.cit. hal....

<sup>69</sup> . Sudarto, 1990. Op.cit.hal. 42.

oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu".<sup>70</sup>

Di dalam definisinya, nampak Moeljatno membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terhadap seorang tersangka pertama-tama harus dibuktikan dulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak. Walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum karena harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggungjawabnya. Apabila dianggap tidak mampu bertanggungjawab maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum. Konsep demikian merupakan konsep yang dipakai dalam sistem *Anglo Saxon* dimana adanya pemisahan antara *Criminal Act* dan *Criminal Responsibility*. Apabila kita hubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap anak yang dianggap telah melakukan *criminal Act* selain perlu dikaji sipat perbuatannya apakah sebagai suatu kejahatan atau kenakalan (*delinquency*), patut dikaji pula masalah kemampuan pertanggungjawaban dari si anak yang pada dasarnya kurang bahkan tidak memahami atau mengerti arti dari perbuatannya. Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidana.

Pandangan Moelyatno terhadap pemakaian konsep *Anglo Saxon* menurut Sudarto disebut sebagai pandangan yang dualistis mengenai tindak pidana, yang merupakan penyimpangan dari pandangan monolistis. Sarjana lain yang termasuk ke

---

<sup>70</sup>. Moeljatno, 1983. Op.cit, hal. 54.

dalam golongan yang mempunyai pandangan dualistis, antara lain: H.B. Vos, W.P.J. Pompe. Sedangkan para sarjana yang termasuk ke dalam golongan yang berpandangan monolistis, antara lain: D. Simon, Van Hamel, E. Mezger, J. Baumann, termasuk Wiryo dan Karni. Pandangan mereka menurut Moelyatno dianggap pandangan yang sudah kuno karena memandang keseluruhan syarat dari adanya pidana merupakan sifat dari perbuatan.

Dengan demikian, permasalahan pokok dari kedua pandangan tersebut antara lain menyangkut unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana (*strafbaar feit*). Pendapat para sarjana yang berpandangan monistis, antara lain:

1. Simon, berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat)
- b. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

2. Van Hamel, menyebutkan unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b. melawan hukum
- c. dilakukan dengan kesalahan
- d. patut dipidana

3. E. Mezger, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a. perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- b. sifat melawan hukum (baik yang bersifat obyektif maupun yang subyektif)

- c. dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. diancam dengan pidana

Sedangkan pendapat mereka yang berpandangan dualistik, antara lain:

1. Vos, memberikan unsur-unsur *strafbaar feit* berupa:
  - a. kelakuan manusia
  - b. diancam pidana dalam undang-undang
2. Pompe berpendapat bahwa walaupun menurut teori *strafbaar feit* itu terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Perbuatan
  - b. bersifat melawan hukum
  - c. dilakukan dengan kesalahan
  - d. diancam pidana

Namun ia berpendapat bahwa dalam hukum positif sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Oleh karena itu ia memisahkan antara tindak pidana dari orang yang dapat dipidana. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno yang mengemukakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana meliputi:

1. perbuatan (manusia)
2. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
3. bersifat melawan hukum

Sedangkan kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal tersebut melakat pada orang yang berbuat.<sup>71</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua pandangan tersebut, antara lain bahwa menurut pandangan monistis seseorang yang telah melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan menurut pandangan dualistik seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena masih harus dipenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Apabila dilihat dari aspek yuridis-normatif, mengkaji suatu tindak pidana termasuk di dalamnya masalah kejahatan, maka arah pandangannya terfokus pada masalah lahiriah, dalam arti hanya menitik beratkan kepada perbuatan nyata (*actus-reus*). Walaupun jangkauan secara luas dari hukum pidana mencakup pula pada persoalan sikap batin (*mens-rea*) khususnya menyangkut persoalan pertanggungjawaban. Namun menyangkut suatu tindak pidana persoalan pokok lebih menitik beratkan kepada masalah moral/etika yang erat hubungannya dengan masalah kepribadian/kejiwaan (psikologis). Apabila kita hubungkan dengan persoalan tindak pidana anak, maka persoalan pokok lebih menitik beratkan kepada masalah tingkah laku yang lebih erat bertalian dengan aspek kejiwaan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana anak dengan dewasa, yang dapat membedakan diantara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana

---

<sup>71</sup>. Sudarto, 1990. Op.cit, hal. 40-44.



yang dilakukannya. Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka apabila terdapat anak-anak yang perilakunya menyimpang dari norma-norma sosial, terhadap anak yang demikian seringkali masyarakat mengistilahkan sebagai anak nakal, anak jahat, anak tuna sosial, anak pelanggar hukum atau *Juvenile Delinquency*. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhidar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).

Kejahatan dilihat dari konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun kejahatan juga bukan hanya satu gejala hukum. Menurut pandangan para kriminolog pengertian kejahatan menurut konsep yuridis dianggap terlalu luas. Kenyataan tersebut terbukti bahwa walaupun terdapat perbedaan pembagian tentang istilah kejahatan, namun tidak mengubah kenyataan bahwa kejahatan dapat berubah bagi semua istilah sekalipun hukuman maksimum hanya berupa denda.

Para ahli kriminologi berpendapat bahwa walaupun terdapat klasifikasi kejahatan<sup>72</sup>, namun klasifikasi tersebut sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka yang dianggap bersalah melakukan kejahatan dan melemahkan stigma atas kejahatan serius, sehingga membawa kepada usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentang pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka berpendapat bahwa bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja,

<sup>72</sup>. Dalam hukum Inggris secara klasik dikenal adanya pemisahan secara tegas antara kejahatan berat (*Felonis*), kejahatan ringan (*Misdemeanors*), dan pelanggaran ringan (*Summary or petty offences*). Dalam Hukum Pidana Prancis dikenal klasifikasi kejahatan dalam: *Crimes*, *delits*, dan *Contraventions*. Hukum Pidana Jerman mengenal klasifikasi kejahatan: *Verbrechen*, *Vergehen*, dan *Ubertretungen*. Adanya klasifikasi tersebut didasarkan atas beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, dengan konsekuensi bahwa terlepas dari persoalan adanya sedikit perbedaan prinsip antara kejahatan serius dan pelanggaran kecil menurut hukum pidana.

dipergunakan istilah "*Delinquency*". Istilah ini mencerminkan perasaan keadilan masyarakat bahwa perlu ada perbedaan pertimbangan bagi kejahatan yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>73</sup>

Kondisi demikian khususnya bagi negara-negara yang telah menerapkan hukum acara pidana khusus untuk anak-anak diakui sebagai dasar psikologis, bahwa anak yang berbuat kejahatan itu bukan merupakan orang-orang jahat, melainkan anak-anak nakal saja (*Juvenile Delinquency*). Dasar ini merupakan hasil riset puluhan tahun dari ilmu Psikologi.<sup>74</sup>

Secara etimologi, istilah *Juvenile Delinquen* berasal dari bahasa Latin yaitu *juvenils* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan *delinquere* yang artinya terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Dengan demikian, *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>75</sup>

Namun demikian, Thong Tjip Nio<sup>76</sup> sebagai seorang mantan hakim khusus pada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta untuk perkara pidana, menyatakan:

<sup>73</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal.31-33.

<sup>74</sup> D.Y. Ataa, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta*, Bina Cipta, 1979, hal. 43.

<sup>75</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992, hal. 7.

<sup>76</sup> Laporan Hasil Survey Fakultas Hukum UNPAD.

Apakah artinya "*a Juvenile delinquensi*" kita tidak mempunyai suatu definisi yang tetap, definisi ini tergantung dari sudut mana kita memandang problema ini. Seorang sosiolog akan memberikan definisi yang berlainan dengan seorang sarjana hukum, begitu juga undang-undang di berbagai negara mempunyai ketentuan yang berlainan, apakah yang disebut suatu *juvenile delinquent*.

Menurut Simanjuntak<sup>77</sup>, suatu perbuatan itu disebut *delinquen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah Perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 21 tahun, yang termasuk dalam yuridiksi pengadilan anak.<sup>78</sup>

Menurut Paul Moedikdo, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, menganiaya, dan sebagainya.<sup>79</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Bimo Walgito, bahwa *Juvenile delinquensi* adalah tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.<sup>80</sup>

Sedangkan Kusumanto Setyonegoro, berpendapat *Delinquent* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai aksetabel dan baik oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum

<sup>77</sup> . B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Tarsito, Bandung, 1977, hal. 295.

<sup>78</sup> . B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 47.

<sup>79</sup> . B. Simanjuntak, 1984. Ibid, hal. 50.

<sup>80</sup> . Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hal. 2.

yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behaviour problem*). Jika ia berusia *adolesant* atau *preadolesant* maka tingkah laku itu sekarang disebut delinquent (*delinquent behaviour*) dan jika ia dewasa, maka tingkah laku itu sering kali disebut psibapatik (*psyhopatik behaviour*), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (*criminal behaviour*).

Tim Proyek *Juvenile delinquent* Fakultas Hukum Unpad, merumuskan *juvenile delinkuen* sebagai berikut:

“Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.<sup>81</sup>

Walaupun banyak definisi yang dikemukakan, namun istilah *juvenile delinquency* belum terdapat keseragaman dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain adalah kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, delinkuensi anak, dan tuna sosial. Kesulitan untuk memberikan istilah *juvenile delinquensi* dihadapi juga di beberapa negara Asia dan Timur Jauh. Dalam penelitian perbandingan tentang *juvenile delinquency* yang dibatasi terhadap tujuh negara-negara di Asia dan Timur Jauh yaitu Burma, Ceylon, India, Jepang, Pakistan, Philipina, dan Thailand. Dalam peraturan perundang-undangan negara-negara tersebut tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan istilah *Juvenile delinquency*, namun berdasarkan kebiasaan diartikan bukan sebagai orang dewasa.

---

<sup>81</sup>. Laporan Hasil Survai, Op.cit.

Umur dari *juvenile delinquency* serta sifat dari pelanggaran yang dilakukan oleh karena berbagai pertimbangan penting diakui sebagai definisi dari *juvenile delinquency*.<sup>82</sup>

Di beberapa negara Asia dan Timur Jauh mengartikan *juvenile delinquency* menitik beratkan kepada aspek umur dan sifat dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, pengertian *juvenile delinquency* terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang tergolong kepada kelompok *young person*.

Karena tidak adanya kesatuan pendapat terhadap makna *juvenile delinquency* baik di berbagai negara maupun di Indonesia sendiri, namun sebagai pedoman kiranya kita dapat merujuk kepada ketentuan yang diberikan oleh Resolusi Kongres PBB. Dimana dalam SMR-JJ (Beijing rule) ditegaskan bahwa:

*"An offence is any behaviour (act or omission) that is punishable by law under the respective legal system (Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan di bawah sistem hukum masing-masing). Dengan demikian, Juvenile offender is a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence (seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui melakukan pelanggaran).*

Dengan melihat pernyataan tersebut, ternyata *Beijing rule* sendiri tidak memberikan batasan yang pasti terhadap *juvenile delinquency*. Namun demikian apa yang ditegaskan tersebut merupakan suatu pernyataan yang sangat bijaksana, karena

---

<sup>82</sup>. United Nation, *Comparative On Juvenile Delinquency*, Part IV. Asia and The Far East, 1953, Loc.cit, p.1.

sebagaimana ketentuan terhadap pengertian anak itu sendiri, batasannya didasarkan kepada kondisi yang ada pada masing-masing negara. Hal tersebut telah memberikan peluang kepada masing-masing negara agar dapat memberikan pengertian sesuai dengan kondisi sosio-kultural negara-masing-masing.

Di Indonesia sendiri berdasarkan rumusan Tim Kerja Bidang Hukum Pidana dan Acara Pidana pada tahun 1970 telah merekomendasikan dalam laporannya bahwa:

“Yang dimaksud dengan tindak pidana anak/kenakalan remaja adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat”.<sup>83</sup>

Apabila kita perhatikan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak (RUUPA), ternyata tidak satu pasalpun yang mengatur tentang tindak pidana anak. RUUPA hanya menyebutkan “anak nakal”, yang di dalamnya meliputi anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 nomor 2 RUUPA. Dalam pasal tersebut Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan, yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Karena RUUPA tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud tindak pidana anak, dapat ditafsirkan bahwa seorang anak dikatakan telah melakukan

<sup>83</sup>. Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 17.

tindak pidana (kejahatan) apabila ia telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP maupun yang ada di luar KUHP (Undang-Undang tentang Tindak Pidana Khusus).

### C. Batas Usia Anak dalam Pertanggungjawaban Pidana

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu, pengertian seorang anak menunjuk pada suatu batas usia tertentu. Apabila pengertian anak dikaji dari segi hukum pidana, pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas pertanggungjawaban pidana (*Criminal liability/Toerekeningvatsbarhed*).

Ketentuan batas pertanggungjawaban anak yang diatur dalam hukum pidana (KUHP), ternyata hanya menentukan batas usia maksimum, yaitu umur 16 tahun. Karena hanya menentukan batas maksimum 16 tahun, konsekwensinya bagi anak yang baru lahirpun seandainya melakukan suatu tindak pidana secara yuridis-formal dapat diminta pertanggungjawaban. Tidak heran apabila kondisi hukum pidana kita sekarang ini mampu mengancam anak yang semestinya memperoleh perlindungan.

Sebagai contoh kongkrit, dapat kita ingat kembali peristiwa bulan September 1985, dimana seorang bocah usia lima tahun diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dasar dituduh menganiaya teman sepermainannya seorang murid kelas satu SD. Kejadian tersebut muncul kembali pada bulan Desember 1988, dengan alasan yang tidak masuk akal seorang gadis kecil usia 6 tahun dihukum oleh Pengadilan Negeri Purwokerto selama tiga bulan penjara, dengan alasan membantu ibunya melakukan tindak pidana penipuan. Karena sesuai dengan aturan hukum pula, kita masih diingatkan dengan adanya kasus Andang Pradika, ia pun sempat menjadi

sasaran penerapan hukum pidana kita, sehingga selama 52 hari sempat meringkuk dalam tahanan orang dewasa.

Kenyataan-kenyataan tersebut terjadi karena KUHP kita tidak memberikan ketentuan batas minimum pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak. Padahal apabila kita lihat beberapa peraturan hukum pidana negara lain, pada umumnya mengatur dengan tegas batas minimum dan batas maksimum, walaupun kriteria usia yang diberikan menunjukkan adanya perbedaan.

Sebagai perbandingan dapat kita lihat batas usia yang diatur di Inggris, dimana batas usia ke bawah ditentukan 8 tahun, di Swedia 15 tahun, sedang di Australia anak yang berusia di bawah 8 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan.

Di lain pihak, seminar Amerika Latin di Rio de Janeiro pada tahun 1953, telah menganjurkan agar negara-negara menetapkan batas usia yang sama, yang tidak boleh kurang dari 14 tahun untuk undang-undang pidananya. Dengan demikian anak yang berusia di bawah 14 tahun dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>84</sup>

Di negara Eropa variasinya adalah 16 tahun, sedangkan di Belgia dan Sweden sampai 21 tahun. Yuridiksi di Amerika Serikat telah menetapkan batas usia antara 16 sampai 21 tahun tergantung kepada negara bagian, dan sebagian besar negara bagian tersebut menetapkan 18 tahun. Di Amerika Latin 14 tahun sampai 20 tahun, batas usia maksimum tergantung negaranya dan rata-rata menetapkan 18 tahun. Di Asia menetapkan dari 15 tahun sampai 20 tahun, dan di Jepang menetapkan 20 tahun.

<sup>84</sup> Ida Z Fahrudin, *Beberapa Catatan Mengenai Pendidikan Anak-Anak di Bandung*, Skripsi Fakultas Hukum UNPAD, 1961, hal. 4. (Tidak dipublikasikan).



Batas usia tersebut biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauhmana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal.<sup>85</sup>

Hal yang sama dapat kita lihat hasil survey PBB pada negara-negara Amerika Utara, di samping ditentukan sebagaimana telah diungkapkan di atas. Dalam kasus-kasus tertentu batas usia anak bisa mencapai usia 21 tahun, dalam beberapa ketentuan termasuk pemerintahan Federal dan negara bagian Columbia batas usia atas adalah 18 tahun. Bagaimanapun di beberapa wilayah terjadi tumpang tindih antara batas suatu tindak pidana dan perbuatan kenakalan anak serta peradilan anak, dan di beberapa negara bagian lainnya mepergunakan batas usia 7 tahun. Lagi pula sebagaian dari negara-negara itu peradilan pidana mempunyai kewenangan yang istimewa terhadap pelaku tindak pidana, terlebih lagi untuk pembunuhan yang direncanakan (*murder*), atau terhadap kasus-kasus besar, di beberapa negara lainnya untuk perkara-perkara istimewa atau untuk beberapa kejahatan yang serupa.<sup>86</sup>

Adanya batas usia minimum 7 tahun pada beberapa negara bagian, dilandaskan pada *Common Law Rule*, yang menyatakan bahwa seseorang anak di bawah 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan melakukan kejahatan. Sedangkan *The National Advisory Commision untuk The Law Enporcement Assistance Administration*, telah merekomendasikan agar semua negara bagian menetapkan batas usia minimum 10 tahun.<sup>87</sup>

Beberapa negara bagaian yang menetapkan batas usia maksimal 17 tahun memperluas batas usia tersebut sampai seorang anak delikuen hingga usia 18 tahun.

<sup>85</sup>. Encyclopedia Americana, 1974, seri 16, hal. 270.

<sup>86</sup>. United Nations, *Comparative Survey On Juvenile Delinquency, Part I. Nort America*, Departemen of Social Affairs Devision of Social Walfare, New York, 1953, p. 6.

<sup>87</sup>. Hazel B. Kepper and J. Israel, *Introduction To The Criminal Justice System*, Second Edition, 1979, P. 390-391.

Sedangkan beberapa negara bagian yang lain sampai usia 20 tahun, lebih dari 40 negara bagian memperkenankan sampai batas usia 21 tahun.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil survey di beberapa negara Asia dan Timur Jauh, mengungkapkan adanya bermacam-macam perbedaan dalam menentukan batas usia. Termasuk perbedaan dalam batasan usia bawah, batas usia atas kenyataan tersebut bukan terdapat di antara negara-negara Asia dan negara-negara Timur jauh yang dijadikan penelitian, tetapi juga terdapat perbedaan diantara negara yang satu dengan negara-negara yang lainnya. Dalam undang-undang di beberapa negara tersebut, membagi pelaku pelanggaran ke dalam dua kategori besar, yang disebut dengan *child* dan *young person* atau *child* dan *juvenile*.<sup>89</sup>

Di Birma, Cylon, India, dan Pakistan batas usia dari kenakalan anak (*age limits of juvenile delinquency*) antara 7-16 tahun. Namun tidak dianggap sebagai pelaku pelanggaran bagi anak yang berusia antara 7-12 tahun. Kecuali di Bombay, ditentukan lagi batas untuk seorang anak 7-14 tahun, dan pemuda/remaja antara 14-16 tahun. Di India terhadap anak antara 13-16 tahun dilakukan suatu tindakan, sedangkan anak yang berusia 13-15 tahun dimasukkan ke tempat penampungan anak. Di Bombay tindakan diberikan kepada anak usia 15-16 tahun, dan usia antara 14-15 tahun dimasukkan di tempat penampungan anak.

Di Jepang batas usia dari kenakalan anak antara 14-20 tahun, Philipina anak antara usia 9-16 tahun dianggap anak nakal, namun anak antara usia 9-15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan di Thailand dianggap sebagai anak nakal

<sup>88</sup> Hazel B. Kepper and J. Israel. Ibid.

<sup>89</sup> United Nations, *Comparative Survey On Juvenile Delinquency, Part IV. Asia and Far East*, Departemen of Social Affairs Division of Social Walfare, New York, 1953, p.1.

terhadap usia 7-18 tahun, namun ditentukan batas usia anak antara 7-14 tahun, dan remaja antara 14-18 tahun.<sup>90</sup>

Menurut hasil penelitian di beberapa negara Timur Tengah, dalam Undang-Undang pidana Mesir, Syria, Libanon dan Irak terdapat kenakalan anak yang dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 7 tahun tetapi belum mencapai usia 15 tahun, dan ditemukan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana dengan dijatuhi sanksi pidana. Di pihak lain, di dalam hukum pidana Iran dan Turki ditentukan dengan tegas batas usia anak nakal antara 11 dan 18 tahun. Di Jordan, dalam undang-undang baru ditentukan batas usia anak nakal antara 9 sampai 18 tahun. Di Saudi Arabia dan Yaman tidak terdapat undang-undang pidana ataupun undang-undang khusus untuk pelaku kenakalan anak, tetapi di dalam Al-quran sebagai kitab suci agama Islam dan hukum Islam diterangkan bahwa seorang anak dianggap sebagai anak nakal jika dia telah dijatuhi hukuman sebagai pelaku setelah mencapai usia remaja, tetapi sebelum mencapai usia dewasa.<sup>91</sup>

Apabila kita lihat KUHP Korea, batas usia minimal untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana ditentukan 14 tahun, sebagaimana yang dipakai di Jepang dan Norwegia.

Dalam *Article 9 The Corean Criminal Code*, dikatakan bahwa "Seseorang yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya."<sup>92</sup> Dalam *Article 41 Criminal Statute*, dikatakan bahwa "Perbuatan

<sup>90</sup>. United Nations, *Comparative Survey On Juvenile Delinquency, Part IV. Asia and Far East, Ibid, p.1-4.*

<sup>91</sup>. United Nations, *Comparative Survey On Juvenile Delinquency, Part V. Middle East*, Departemen of Social Affairs Division of Social Welfare, New York, 1953, p. 1

<sup>92</sup>. Gerhard O.W. Mueller (editor-in-Chief), *The Corean Criminal Code*, Fred B. Rothman & Co. South Hackensack. N.J. Sweet & Maxwell Limited, London, New York University, New York, 1960.

seseorang yang belum berumur 14 tahun tidak dipidana".<sup>93</sup> Sedangkan dalam *Section 46 The Norwegian Penal Code*, berbunyi "Tidak seorangpun dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya sebelum memenuhi usia 14 tahun".<sup>94</sup>

Walaupun adanya bermacam-macam kriteria yang diberikan, namun sebagian besar negara-negara yang ada di dunia telah menentukan batas usia minimal dan batas usia maksimal atas pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak. Adanya berbagai macam kriteria tersebut sesungguhnya bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, sebab kriteria yang diberikan oleh masing-masing negara didasarkan kepada situasi dan kondisi masing-masing negara. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Resolusi Kongres PBB ke VII tahun 1985, *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, yang antara lain dikatakan bahwa:

*The minimum age of criminal responsibility* tersebut sangat berbeda-beda diantara negara-negara di dunia, hal tersebut tergantung kepada latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing. Oleh karena itu dalam rule 4.1 menegaskan:

*"In the legal system of criminal recognizing the concept of the age of criminal responsibility for juveniles, the begining of that age shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity"* (Di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak)<sup>95</sup>.

Atas dasar hal tersebut, wajar pula apabila dalam menentukan batas usia terdapat perbedaan kriteria, justru akan menimbulkan malapetaka bila sama sekali tidak mengaturnya. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang sedang

<sup>93</sup>. Criminal Statutes I, Ministry Of Justice Japan, 1968.

<sup>94</sup>. Harald Schioldeger, LL.M. (Translated), *The Norwegian Penal Code*, Fred B. Rothman & Co. South Hackensack. N.J. Sweet & Maxwell Limited, London, New York University, New York, 1961.

<sup>95</sup>. SMR-JJ (Beijing rules), *Age of criminal responsibility*, rule 4.1.

berkembang, Indonesia rasanya telah jauh ketinggalan. Namun demikian, dari hasil-hasil rumusan berbagai pertemuan ilmiah, telah memberikan alternatif untuk menentukan batas umur bawah dan batas umur atas. Batas umur bawah adalah antara 12 dan 13 tahun, sedangkan batas umur atas antara 17 dan 18 tahun<sup>96</sup>. Hal tersebut membawa pengaruh pula terhadap perkembangan sistem hukum pidana (anak) di Indonesia. Kemajuan nampak dengan ditentukannya secara tegas batas usia minimum dan maksimum bagi seseorang anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam RUUPA batas usia minimum 8 tahun maksimal 18 tahun. Sedangkan menurut konsep RKUHP batas usia minimum 12 tahun maksimum 18 tahun.

Bagaimana pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana padahal usianya di bawah umur delapan tahun?

Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak menyatakan bahwa bagi anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana padahal masih berada di bawah umur delapan tahun, terhadapnya hanya dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila anak tersebut masih dapat dibina oleh pihak yang lebih berhak, maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Sedangkan apabila dianggap tidak mungkin dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial agar anak tersebut mendapat putusan sidang anak (Pasal 5 UUPA).

<sup>96</sup>. Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak: *Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja di Indonesia*. BAKIN, *Remaja I*, Petunjuk Khusus tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 tahun 1971, mengenai Kenakalan Remaja. Pedoman 9: *Petunjuk Penyuluhan dalam Rangka Penanggulangan Kenakalan Remaja/Pembinaan Remaja untuk Para Penyuluh*.

Walaupun dalam penjelasan RUUPA tidak memberikan keterangan lebih lanjut alasan ditetapkan anak umur delapan tahun dikenakan sanksi yang bersipat khusus, namun apabila kita perhatikan pendapat Robert K. Merton, bahwa anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*), sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat. Seseorang yang tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak melakukan kejahatan (*incapable of crime*).<sup>97</sup>

Namun yang patut menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum dalam persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak, adalah hakikat yang mendasari dihadapkannya anak ke sidang pengadilan. Dimana bukan ditujukan untuk mengadili anak atas tindakan yang telah dilakukannya, melainkan dikembalikan kepada sejauhmana anak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Kemampuan tersebut antara lain dilihat dari sampai sejauhmana anak dapat menghayati akan makna dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Apabila kita kaji ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 KUHP, sesungguhnya menyatu dengan Pasal 44 KUHP yang menitik beratkan pada masalah mampu atau tidak mempunya orang untuk bertanggungjawab (masalah kemampuan bertanggungjawab/ *toerekening vatsbaarheid/Criminal Liability*) yang berada pada bab tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana. Dengan demikian, Pasal 45 KUHP pun sesungguhnya lebih menitik beratkan pada masalah mampu atau tidak mempunya seorang anak untuk

---

<sup>97</sup> Robert K. Merton & Nisbet, *Contemporary Social Problems*, New York, Harcourt, France & World Inc, p. 77.

dapat bertanggungjawab atau sampai sejauhmana anak dapat menilai arti/makna dari perbuatannya.

#### D. Perkembangan Peradilan Anak

##### 1. Perkembangan Peradilan Anak di Beberapa Negara

Apabila kita melihat perkembangan beberapa negara yang sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang peradilan anak (*Juvenile law*), penanganan terhadap anak bermasalah (*juvenile delinquency*) berada dalam yuridiksi peradilan anak (*Juvenile Court*). Dengan demikian, baik klasifikasi perbuatan, prosedur penanganan, maupun sanksi yang akan dijatuhkan sudah jelas pengaturannya.

Menurut analisa sejarah, salah satu bentuk perlindungan anak yang dilakukan di Amerika Serikat diwujudkan melalui pembentukan peradilan anak (*Juvenile Court*), dimana Peradilan anak yang didirikan di Illinois Amerika Serikat pada tahun 1899 merupakan pengadilan anak pertama di dunia<sup>98</sup>. Peradilan tersebut Kemudian diikuti oleh beberapa negara bagian lain di Amerika serta negara-negara lainnya.

Di Amerika, sebagian besar negara bagian sudah memiliki undang-undang tentang Peradilan Anak. Negara-negara bagian itu juga menyediakan pendidikan khusus untuk anak-anak bermasalah, agar kegiatan dan minat mereka bisa diarahkan kepada hal-hal yang lebih membangun. Lembaga-lembaga tersebut menitik beratkan kepada soal pemberian perhatian kepada masalah-masalah yang dialami anak-anak dan bukan kepada penghukuman. Lembaga penampungan anak-

<sup>98</sup>. Pengadilan Anak yang pertama di dunia didirikan di Chicago pada tahun 1899 berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian Illinois, disebut sebagai *An act to regulate the treatment and control of defendent, beglected and delinquent children*. Pengadilan Anak tersebut dibentuk oleh Komite Chicago Bar Assosiation, dinamakan *Juvenile court of Cook Country*. Sri Widoyati WS, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 12.

anak yang melakukan kejahatan itu, yang pertama kali dibangun adalah *New York House of Refuge*, pada tahun 1825, kemudian *Chicago Reform School*, tahun 1855. Masa hukuman bagi terdakwa muda juga didasarkan kepada kemampuan masing-masing anak untuk memperbaiki diri. Jika dalam lembaga anak-anak itu menunjukkan tekad untuk memperbaiki diri, ia akan diberi kesempatan kembali ke masyarakat di bawah pengawasan dan bimbingan polisi yang membidangi kejahatan anak-anak.

Meskipun undang-undang Peradilan Anak dan Remaja (*Juvenile Law*) baru dibuat tahun 1899, namun pada masa sebelumnya anak-anak sudah menerima perlakuan istimewa di bawah hukum. Karena menurut hukum Amerika dan Inggris anak-anak belum dewasa di bawah usia 7 tahun, sehingga anak di bawah 7 tahun tidak bisa dipenjarakan akibat kejahatannya. Anak-anak yang berusia antara 7-14 tahun dapat dihukum jika pemerintah (penuntut) bisa membuktikan bahwa anak itu ada kecenderungan melakukan kejahatan seperti halnya orang dewasa.

Di bawah *Juvenile Law* itu, perbuatan yang bagi orang dewasa termasuk kejahatan (*crime*), tetapi pada anak-anak dikategorikan ke dalam *Juvenile delinquency*. Kenakalan seperti itu pun tidak sampai menyeret si anak ke penjara. Tetapi bila tindakan itu merupakan tindakan berat, seperti pembunuhan, perampokan, atau perkosaan, anak itu akan dikenakan tuduhan yang sama seperti yang diterapkan kepada orang dewasa, apabila dengan sadar melakukan kejahatan itu. Dalam perkara yang serius, polisi bisa menahan mereka, apabila terbukti melakukan kejahatan. Dalam hal pemeriksaan pun mereka harus didampingi pengacara,



bahkan di beberapa negara bagian melarang melakukan pemeriksaan terhadap si anak bila tidak didampingi oleh orang tuanya.

Sebelum berkembang peradilan anak, seorang anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan dalam yuridiksi peradilan pidana untuk orang dewasa. Mereka berusaha mencoba menghukum sebagaimana orang dewasa dan dalam beberapa kasus telah dilakukan eksekusi. Namun sejalan dengan adanya ketidakpuasan serta timbulnya *recidivis* anak, beberapa tokoh pembaharu mendirikan suatu lembaga tempat perlindungan anak yang disebut *New York City House of Refuge*, di New York pada tahun 1825. Lembaga tersebut menyediakan pelayanan koreksi dan rehabilitasi yang memisahkan pelaku anak dari penjara orang dewasa. Negara bagian melarang melakukan pemeriksaan terhadap si anak bila tidak didampingi oleh orang tuanya.

Sejalan dengan pertumbuhannya, karena para tokoh pembaharu meragukan penggunaan pendekatan secara penghukuman terhadap anak nakal, mereka mencoba pendekatan baru yang lebih memfokuskan pada rehabilitasi yang sesungguhnya terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. Para pembaharu melakukan usaha akhirnya dengan mendirikan Peradilan Anak yang pertama di Illinois pada tahun 1899. Peradilan anak yang baru tersebut mempunyai perbedaan orientasi yang sangat besar dari peradilan orang dewasa. Peradilan ini berjalan atas dasar doktrin *parens patriae*.<sup>99</sup> Dari pada memfokuskan pada persoalan bersalah

---

<sup>99</sup>. *Parens patriae* berarti bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Namun karena lebih condong ke sifat lembaga sosial dari pada badan yang memberi peradilan, maka sesuai dengan asas yang mendasari dilaksanakannya peradilan anak yaitu mengedepankan kepentingan hak-hak anak, dalam perkembangan saat ini asas *parens patriae* sudah tidak dapat diterima sepenuhnya. Sudarto, 1981. Op.cit, hal. 131.

atau tidak, peradilan anak memfokuskan pada pertanyaan apakah anak-anak membutuhkan pembinaan.

Filosofi peradilan anak menarik perhatian individu sebagaimana seseorang yang memerlukan perlindungan dan pemeliharaan dalam ketidak matangan/kondisi yang labil. Pelaku pelanggaran menyetujui bahwa mereka tunduk pada ketentuan tersebut.<sup>100</sup>

Sejak semula peradilan anak dengan tujuan melakukan rehabilitasi dari pada menghukum mereka, hal tersebut sejalan dengan ketentuan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap para pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangannya beberapa tahun kemudian, muncul kritik yang memberikan perhatian bahwa pada kenyataannya anak-anak yang kehilangan kebebasannya bukan untuk apa yang telah mereka kerjakan, tetapi untuk siapa mereka. Pada kenyataannya diawali pandangan bahwa peradilan anak sudah disepakati bersama dengan cara yang tidak diharapkan oleh anak. Bagaimanapun hal tersebut telah diambil beberapa keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam penyelenggaraan praktek peradilan selama pertengahan tahun 1960-an.<sup>101</sup>

Dalam perkembangannya beberapa tahun kemudian, muncul kritik yang memberikan perhatian bahwa pada kenyataannya anak-anak yang kehilangan kebebasannya bukan untuk apa yang telah mereka kerjakan, tetapi untuk siapa mereka. Pada kenyataannya diawali pandangan bahwa peradilan anak sudah disepakati bersama dengan cara yang tidak diharapkan oleh anak. Bagaimanapun

<sup>100</sup> Encyclopedia American Interntional Edition, Vol.16. Glorier Incorporated 1982, p. 269.

<sup>101</sup> William E.Th.Lydia V, William G.D, *Delinquency And Justice*, Second edition, Random House, New York, 1946, p. 310-311.



hal tersebut telah diambil beberapa keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam penyelenggaraan praktek peradilan selama pertengahan tahun 1960-an.<sup>102</sup>

Negara-negara bagian lain mengikuti contoh yang diberikan oleh Illinois. Sebagai hasil dari pekerjaan kepeloporan Hakim Ben Lindsey dari Denver Country Court, negara bagian Colorado pada tahun 1903 mengesahkan undang-undang untuk mendirikan pengadilan-pengadilan anak di negara bagian tersebut. Antara tahun 1899 sampai 1904 menyusul negara-negara bagian Pennsylvania, Wisconsin, New York, Maryland, California, Missouri, New Jersey, Indiana, Iowa dan Ohio. Sepuluh tahun sesudah peradilan pertama didirikan, 20 negara bagian dan *District of Columbia* mengesahkan undang-undangan peradilan anak. Pada tahun 1920 tinggal tiga negara bagian yang belum mempunyai Pengadilan Anak, dan kini pengadilan anak terdapat di semua negara bagian Amerika Serikat seluruhnya berjumlah 200 buah. Walaupun *United States Children's Bureau* dan *National Protection and Parole Association* memberikan pedoman-pedoman bagi perkembangan pengadilan-pengadilan anak, namun perbedaan-perbedaan pada masing-masing pengadilan masih tetap ada.<sup>103</sup>

Banyaknya perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak-anak di Amerika Serikat yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat diajukan pada peradilan anak, menimbulkan berbagai cara yang berbeda dalam mendekati dan memecahkannya. Namun bagi mereka berlaku undang-undang istimewa yang bukan merupakan undang-undang hukum pidana, sehingga undang-undang

<sup>102</sup>. William E.Th.Lydia V, William G.D, *Delinquency And Justice*, Second edition, Random House, New York, 1946, p. 310-311.

<sup>103</sup>. Sriwidoyati W.S., Op.cit. hal. 13.

lebih dari 14 tahun. Terutama bagi kejahatan perkosaan, penganiayaan, dan tindakan tak senonoh. Peraturan tersebut dikeluarkan karena masyarakat Inggris sempat memprotes mengenai meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 14 tahun.

Sebelumnya anak-anak di bawah 14 tahun tidak bisa ditahan untuk jangka waktu lama. Peraturan lama menyatakan, bahwa anak-anak dengan usia 10-13 tahun hanya bisa ditahan untuk hukuman yang panjang di lembaga khusus anak-anak, bila mereka melakukan pembunuhan.

Di Prancis, walaupun tidak ada undang-undang tentang Peradilan Anak, namun sudah ada Pengadilan Anak (*Tribunal pour Enfants*), untuk mengadili kejahatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur 16 tahun. Dalam pemeriksaan dan persidangan, anak-anak harus didampingi pengacara. Namun semua putusan pengadilan harus dilandasi prinsip untuk mendidik atau berdasarkan kepentingan tertinggi anak sebagaimana tercantum dalam Hak-Hak Asasi Anak PBB (*Convention on the Rights of the Child*) yang ditetapkan 20 November 1989, dan diberlakukan di Prancis pada tanggal 6 September 1990.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam masalah anak di Prancis tidak hanya menyangkut tindak kejahatan saja. Pengadilan pun berhak membuat keputusan yang bebas bila kesehatan, keamanan, dan moralitas seorang anak berada dalam bahaya, atau bila kondisi pendidikannya sangat terganggu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan segala ketentuan tentang anak-anak itu, hanya dicantumkan dalam ketentuan

Bantuan Pendidikan di Lingkungan Terbuka (*Assistance Dedukative en milieu Ouvert*) yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di Australia, terutama di *New South Wales*, seorang anak yang melakukan tindak pidana memperoleh perlakuan khusus berdasarkan *Children Act*, yang diantaranya mencangkup soal peradilan anak. Meskipun mendapat keistimewaan, seorang anak yang melanggar hukum akan dihadapkan kepada tanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian undang-undang memungkinkan untuk melakukan penahanan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan apabila terbukti melakukan kejahatan.

Apabila kita kaji berbagai ketentuan yang mengatur mengenai peradilan anak tersebut, pada hakikatnya tetap memungkinkan seorang anak dikirim ke lembaga kepenjaraan. Padahal kalau kita lihat perkembangan lembaga tersebut selama ini, apa pun istilah yang diberikan, lingkungan kepenjaraan akan tetap memberikan pengalaman buruk bagi si anak. Sebagai contoh dapat kita lihat keadaan di negara Inggris, sebagai negara yang sudah modern ternyata masih belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi anak-anak yang bermasalah. Karl Tout, pemuda berusia 18 tahun yang didakwa telah menyerang dan menculik pacarnya, bunuh diri sehari setelah masuk lembaga anak-anak nakal di Moorland. Karl adalah nabi anak pertama yang melakukan bunuh diri, setelah itu menyusul nabi anak yang lainnya.

Indikasi itu, menurut Deborah Coles, seorang wakil direktur Inquest yang mengamati kematian di penjara, menunjukkan bahwa penjara anak-anak di negeri itu memiliki cacat yang cukup gawat, sehingga membuat anak-anak stres dan

nekad bunuh diri. Dan salah satu upaya untuk menghindarkan hal itu adalah kurangi napi anak-anak, dan perlakukan mereka secara lebih manusiawi.<sup>104</sup>

## 2. Perkembangan Peradilan Anak di Indonesia

Sejak tahun lima puluhan usaha untuk mewujudkan keinginan adanya peradilan anak di Indonesia telah timbul dimana-mana, hal tersebut antara lain dapat dilihat dari banyaknya tulisan-tulisan ilmiah, rekomendasi dari pertemuan-pertemuan ilmiah, serta dikirimnya aparat penegak hukum ke luar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan peradilan anak. Bahkan di beberapa pengadilan negeri telah ditunjuk hakim-hakim khusus untuk menangani perkara-perkara yang terdakwaanya anak-anak.<sup>105</sup>

Dari gambaran tersebut, adanya suatu keinginan untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak pelaku tindak pidana sebagaimana dilakukan di negara-negara lain, tumbuh setelah Indonesia menjadi negara merdeka. Kenyataan tersebut karena sejak masa penjajahan Belanda hingga pendudukan Jepang di Indonesia, tidak ada usaha dari pemerintah untuk melindungi kepentingan anak-anak Indonesia (bumi putra). Walaupun terdapat *Burgerlijke Kinderwetgeving*, yang terdapat di dalam staatsblad 1927-31 jis 300, 421, namun ketentuan tersebut hanya berlaku untuk anak-anak golongan Eropa. Sedangkan hukum pidana untuk anak-anak Indonesia hanya meliputi tiga pasal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Dalam perkembangan selanjutnya sekitar tahun 1954 di Pengadilan Negeri Jakarta sudah ada hakim khusus yang mengadili anak-anak yaitu Mr. Maengkom

<sup>104</sup>. Laporan Wartawan BBC London, *Pengadilan dan Penjara Anak di Berbagai Negara*, dalam Forum Keadilan No.7 Tahun IV, 17 Juli 1995.

<sup>105</sup>. Sudarto, *Pengertian Dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 79.

dengan dibantu oleh pegawai Pra Yuwana, namun pelaksanaan penahanan masih tetap disatukan dengan orang dewasa. Kemudian pada tahun 1957 muncul perhatian dari pemerintah terhadap masalah anak-anak nakal, dimana pemerintah mengirimkan beberapa ahli ke luar negeri baik dari pengadilan maupun dari kejaksaan untuk mempelajari masalah penanganan kenakalan anak. Sekembalinya ke tanah air para ahli tersebut mengadakan suatu *Agreement* antara pihak pengadilan, kejaksaan dan kepolisian untuk memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan suatu kenakalan. Perlakuan khusus tersebut antara lain:

1. Dari pihak Kepolisian:

- a. Menahan anak-anak secara terpisah dari orang dewasa.
- b. Membuat berita acara pendahuluan tidak memakai seragam.

2. Dari pihak Kejaksaan:

- a. Pada waktu sidang tidak pakai toga atau seragam.

3. Dari pihak Pengadilan:

- a. Hakim ditunjuk secara khusus oleh Ketua Pengadilan.
- b. Hakim yang bersidang tidak memakai toga.
- c. Bersidang secara tertutup.
- d. Ikut hadirnya orang tua si anak.
- e. Hari sidang yang khusus
- f. Lembaga Pemasyarakatan mengangkat beberapa pegawai untuk membantu persidangan anak-anak dengan cara, membuat social report/*case study*.<sup>106</sup>

<sup>106</sup>. Noersjamsoe Yustham, *Praktek Peradilan Anak Desawa ini di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 128-129.



Dengan melihat kenyataan tersebut nampak bahwa adanya penanganan khusus terhadap anak-anak nakal melalui peradilan telah dimulai sejak adanya persetujuan diantara para penegak hukum yang telah melakukan studi perbandingan terhadap praktik penanganan anak di luar negeri. Dengan demikian, secara formal pemikiran dan usaha-usaha ke arah peradilan anak dimulai sekitar tahun 1958, yaitu dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Selain itu muncul pula beberapa ketentuan yang mengatur masalah proses penanganan anak di pengadilan, seperti adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 1959, dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta tahun 1974. Bahkan pada tahun 1963 telah dibentuk panitia untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, dan pada tahun 1964 telah selesai dibuat konsep dari Rancangan tersebut.

Walaupun telah berulang kali diadakan berbagai pertemuan ilmiah dengan menghasilkan beberapa keputusan agar segera disahkannya undang-undang Peradilan Anak, namun hingga saat ini pihak yang berkompeten masih meminta kesabaran kita untuk tetap menunggu.

Karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan sidang perkara pidana anak, hingga saat ini untuk perkara-perkara tindak pidana anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan umum, dengan kualifikasi perkara sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh

orang dewasa. Atas dasar hal tersebut, secara yuridis formal ketentuan yang mengatur perkara-perkara tindak pidana anak mengacu kepada undang-undang sebagaimana yang diterapkan terhadap pelaku dewasa. Ketentuan materilnya menunjuk kepada KUHP (UU. No. 1/46 jo 73/58) atau undang-undang tindak pidana khusus di luar KUHP, sedangkan aturan formil atau hukum acaranya menunjuk kepada KUHAP (UU No. 8/81) serta beberapa ketentuan yang dibuat atas dasar kepentingan masing-masing instansi.

## **E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Persidangan**

### **1. Instrumen Internasional Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana.**

Secara khusus, perhatian dunia terhadap perlindungan anak telah dimulai sejak munculnya Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1924. Deklarasi tersebut telah diakui pula dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948. Berawal dari peristiwa tersebut dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) yang memuat sepuluh prinsip Hak-Hak Anak.

Deklarasi anak tersebut ditindak lanjuti dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Righst of the Child*) yang termuat dalam Resolusi PBB No. 40/25 tanggal 20 Nopember 1989. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak, Konvensi menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang harus

diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam

Pasal 37 CRC dikatakan bahwa :

a. *No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by person below eighteen years of age;* (Tak seorang anakpun boleh mengalami siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1).

b. *No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;* (Tidak seorangpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek).

c. *Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect of the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the need of person of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;*

(Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus).

d. *Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.*

(Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan atau pihak yang berwenang, dan independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut)<sup>107</sup>.

<sup>107</sup>. UNICEF, *Convention on The Rights of The Juvenile*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989.

Sedangkan dalam Pasal 39 menyatakan bahwa:

*Satates Parties shall take all approriate measures to promote physical recovery and sosial reintegration of achild victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recivery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.* (Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan kembali dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan; penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau perlakuan penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau pertentangan kesepakatan. Pemulihan dan penyantuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak).

Khusus yang berkenaan dengan administrasi peradilan, lebih lanjut Pasal

40 menyatakan:

*1. State Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in amanner consistent with the promotion of the child's sence of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human right and fundamental freedoms of other and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a contructive role in society.* (Negara-Negara Peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat).

*2. To this end, and having regard to the relevant provitions of international Instruments, states shall, in particular ensure that:* (Untuk tujuan ini, dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari perangkat-perangkat internasional yang relevan, negara-negara peserta khususnya, menjamin bahwa:)

*a. No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or amissions that were not international law at the time they were commited;* (Tak seorang anakpun akan disangka sebagai, atau dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana karena tindakan-tindakan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan).

b. *Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees:* (Setiap anak yang disangka atau dituduh sebagai atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut:

- (i) *To be presumed innocent until proven guilty according to law;*  
(Dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum);
- (ii) *To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and if appropriate, through his or her parent or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence;* (Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, jika layak, melalui orang tua anak atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya);
- (iii) *To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority of judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians;* (Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh pihak yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan undang-undang, adanya bantuan hukum dan bantuan lainnya yang layak dan, kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya, dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua dan walinya yang sah);
- (iv) *Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have examined adverse witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality;* (Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau untuk mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak);
- (v) *If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law;* (Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang);
- (vi) *To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used;* (Memperoleh bantuan cuma-cuma dari juru

bahasa jika anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan);

(vii) *To have his or her privacy fully respected at all states of the proceedings;* (Menghormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses peradilan);

3. *States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions specially applicable to children alleged as, accuse of, or recognized as having infringed the penal law, and, in particular:* (Negara-negara peserta akan berupaya untuk meningkatkan perbuatan undang-undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak, yang diduga akan dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya):

a. *The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law;* (penetapan usia minimum dimana usia di bawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana);

b. *whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human right and legal safeguards are fully respected.* ( bilamana layak dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh tuntutan hukum , asal saja hak-hak asasi manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya dihormati

Adanya perlindungan hukum terhadap anak, sejak dilangsungkannya Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* tahun 1955 juga menjadi bahan pemikiran para pakar hukum. Berkenaan dengan jaminan perlindungan yang diakui oleh hukum sebagaimana diatur dalam prinsip ke dua dari Deklarasi Hak-Hak Anak,<sup>108</sup> juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, dalam Kongres-Kongres PBB selanjutnya perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan kepada masalah Peradilan Anak (*Juvenile Justice*). Hal tersebut nampak dengan dibicarakannya

<sup>108</sup> . Dalam prinsip ke dua dari *Declaration of the Rihgt of the Child*, antara lain dikatakan bahwa: Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, ahlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat).

masalah *juvenile justice* dalam kongres PBB ke-VI di Caracas, Venezuela, pada tahun 1980, yang menghasilkan suatu resolusi mengenai *Development of Minimum Standards of Juvenile Justice*. Dalam resolusi tersebut diletakan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan peradilan anak dalam rangka melindungi hak-hak asasi anak yang terlibat dalam persoalan hukum. Resolusi ini pula yang mendorong dunia internasional memberi perhatian khusus terhadap perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.

Atas dasar hal tersebut, bermula dari pembicaraan antar regional di Beijing,<sup>109</sup> selanjutnya menghasilkan suatu kesepakatan tentang *United Nations Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice* (SMR-JJ) atau lebih dikenal dengan *Beijing rules*. Hasil pembicaraan tersebut disetujui oleh Kongres PBB ke VII di Milan tanggal 6 September 1985 dan dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi No. 40/33. Dalam resolusi tersebut, Kongres menyerukan kepada semua anggotanya agar diimplementasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan peradilan anak di masing-masing negara. Bahkan dalam Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* ke IX yang diselenggarakan di Kairo, Mesir pada tahun 1995, Kongres menekankan kembali agar setiap negara anggota untuk memperhatikan tiga instrumen internasional. Ketiga instrumen tersebut adalah *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*, *The UN Standard Minimum Rules for the*

<sup>109</sup>. Pertemuan antar regional tersebut didahului oleh beberapa pertemuan regional, yaitu: Untuk wilayah Eropa di Sofia, Juni 1983; untuk wilayah Amerika Latin di San Jose; Oktober 1983; untuk wilayah Afrika di Addis Ababa, Desember 1983; untuk wilayah Asia Barat di Baghdad, Desember 1983. UNAFEL, Resource Material Series no.29, 1986, hal. 58-59. Dalam Barda Nawawi Arief, 1992, hal. 10.

*Administration of Juvenile Justice*, serta *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*.<sup>110</sup>

Jaminan khusus perlindungan anak dalam bidang hukum dan peradilan antara lain dapat dilihat dari apa yang dirumuskan dalam Rule 7.1. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa jaminan-jaminan prosedural yang sangat mendasar yang harus dipenuhi pada setiap proses peradilan anak, antara lain:

1. Hak untuk dianggap tidak bersalah/Azas praduga tidak bersalah (*the presumption of innocence*);
2. Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*);
3. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);
4. Hak memperoleh penasihat hukum (*the right to counsel*);
5. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali (*the right to the presence of a parent or guardian*);
6. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross examine witnesses*);
7. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi (*the right to appeal to a higher authority*).<sup>111</sup>

Apa yang diatur dalam Rule 7 tersebut merupakan hal-hal yang bersifat umum, bahkan telah diakui secara internasional sebagai masalah yang sangat esensial dalam proses peradilan yang adil. Selain itu SMR-JJ (*Beijing Rule*) menekankan pula terhadap hal-hal yang sangat khusus yang perlu mendapat

<sup>110</sup>. Ninth UN Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Draft Resolution No. A/CON/169/L.5,airo, Mesir 29 April-8 Mei 1995.

<sup>111</sup>. United Nations, *Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, Departement of Public Information, New York, 1986, p. 6.



perhatian dalam setiap proses peradilan. Jaminan-Jaminan Khusus tersebut meliputi:

**a. Hak-Hak dalam bidang Penyidikan dan Penuntutan**

Dalam bidang Penyidikan yang merupakan kontak awal (*initial contact*) antara anak pelaku pelanggaran dengan pihak kepolisian, masalah-masalah esensial yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1). *Upon the apprehension of a juvenile her or his parents or guardian shall be immediately notified of such apprehension and where such immediate notification is not possible the parents or guardian shall be notified within the shortest possible time thereafter* (Dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap seorang anak, orang tua atau wali harus sesegera mungkin diberitahu, paling tidak diberitahukan kepada orang tua atau walinya dalam waktu sesingkat mungkin setelah penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan).
- 2). *A judge or other competent official or body shall, without delay consider the issue of release* (Hakim atau pejabat atau badan yang berwenang tanpa menunda waktu harus mempertimbangkan masalah pengeluaran anak tersebut dari penangkapan dan penahanan).
- 3). *Contacts between the law enforcement agencies and a juvenile offender shall be managed in such a way as to respect the legal status of the juvenile, promote the well being of the juvenile and avoid harm to her or him, with due regard to the circumstances of the case* (Kontak antara aparat penegak hukum dengan anak pelaku pelanggaran harus di dasarkan pada cara-cara: menghormati kedudukan hukum dari si anak, memajukan kesejahteraan anak, dan menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan si anak ).<sup>112</sup>

Pentingnya memperlakukan anak pelaku pelanggaran pada saat penyidikan yang merupakan kontak awal (*initial contact*), karena lebih banyak menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi perkembangan si anak. Oleh karena itu tindakan-tindakan yang berupa kekerasan secara fisik atau penggunaan bahasa yang kasar (*avoid harm*) yang dilakukan oleh penyidik harus dihindarkan, karena kontak awal antara penyidik dengan anak merupakan

<sup>112</sup>. SMR-JJ, Rule 10. Ibid, hal. 6.

pangkal tolak bagi perkembangan pribadi si anak selanjutnya, apakah ia akan menjadi baik atau mungkin sebaliknya. Kaitannya dengan proses peradilan pidana, tahap penyidikan ini adalah pintu gerbang yang merupakan tahap pertama yang dapat menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya. Sebagaimana dikemukakan Baharuddin Lopa dalam menyoroti masalah penegakan hukum di Indonesia, ia mengemukakan dengan menunjukan berbagai contoh kasus bahwa:

“Untuk menegakan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan hukum tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis.

Bisa dibayangkan apabila hasil penyidikan kurang akurat kemudian hakim menerimanya dan dijadikannya dasar pemeriksaan di muka pengadilan, maka hasil proses peradilan tersebut akan dapat mengecewakan”.<sup>113</sup>

Dengan demikian, nampak nyata betapa besarnya dampak yang ditimbulkan dari tahap penyidikan terhadap mekanisme proses peradilan. Keadaan demikian akan semakin parah (*acute*) apabila terjadi dalam sistem peradilan pidana anak yang secara nyata menangani para pelanggar anak di bawah umur. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila SMR-JJ (*Baijing rules*) memberikan penekanan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip penanganan pada tingkat penyidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk adanya kesatuan khusus aparat kepolisian yang terlatih dalam menangani dan melayani anak pelaku pelanggaran sebagaimana ditegaskan dalam Rule 12. Di bawah titel *Specialization within the Police*, menyatakan bahwa:

*“In order to best fulfil their functions, police officers who frequently or exclusively deal with juveniles or who are primarily engaged in the prevention*

<sup>113</sup>. Baharuddin Lopa, *Apa yang perlu diperhatikan dalam Penegakan Hukum*, Kompas,... 1995.

*of juvenile crime shall be specially instructed and trained. In large cities, special police units should be established for that purpose.* (Untuk melaksanakan fungsi yang baik, dimana aparat kepolisian sering kali menangani secara awal dalam pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan anak-anak harus mendapat pendidikan khusus. Di kota-kota besar, polisi-polisi khusus harus dibentuk untuk tujuan tersebut “).<sup>114</sup>

Selain itu dalam menangani masalah anak pada tingkat penyidikan dipandang perlu juga adanya jaminan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan dalam menangani masalah anak pelaku pelanggaran di luar aturan formal, sepanjang ditujukan demi kepentingan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam *commentary* bahwa pengalihan (*diversion*) yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktek pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses *stigmatisasi*. Dengan demikian pengalihan mungkin dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat polisi, penuntut atau pada tingkat pengadilan. Hal tersebut tergantung kepada sistem aturan dan kebijaksanaan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Penerapan mekanisme tersebut di semua tingkat pemeriksaan akan mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Walaupun dalam praktek tindakan diversi dilakukan terhadap kasus-kasus yang tidak serius, namun tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan tidak hanya kepada kasus-kasus yang ringan saja.

---

<sup>114</sup>. SMR-JJ, Rule 12. Op.cit. hal. 8.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam tindakan pengalihan adalah adanya persetujuan dari anak yang bersangkutan, orang tua atau wali, karena tanpa persetujuan demikian bertentangan dengan konvensi mengenai *Abolition of Force Labour*.

#### b. Hak-Hak dalam hal Penahanan Sementara

Sedangkan dalam tindakan penahanan sementara dalam rangka menunggu proses pemeriksaan pengadilan, Rule 13 menekankan kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1). *Detention pending trial shall be used only as a measure of last resort and for the shortest possible period of time* (Penahanan sementara agar dilakukan sebagai tindakan terakhir serta dilaksanakan dalam tempo sesingkat mungkin).
- 2). *Whenever possible, detention pending trial shall be replaced by alternative measures, such as close supervision care or placement with a family or in an educational setting or home* ( Penahanan sementara sejauh mungkin agar diganti dengan tindakan-tindakan alternatif lainnya, seperti adanya pengawasan yang ketat, pemeliharaan yang intensif atau penempatan dalam keluarga atau di dalam lingkungan pendidik atau di rumah).
- 3). *Juveniles under detention pending trial shall be entitled to all right and guarantees of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners adopted by the United Nation* (Seorang anak selama masa penahanan harus memperoleh semua hak dan jaminan-jaminan sesuai dengan apa yang telah ditentukan *Standard Minimum Rules*).
- 4). *Juveniles under detention pending trial shall be kept separate from adults and shall be detained in a separate institution or in a sparate part of an institution also holding adults* (Seorang anak yang dilakukan penahanan harus ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa dan dalam lembaga yang terpisah atau bagian yang terpisah dari lembaga yang digunakan orang dewasa).
- 5). *While in costudy, juveniles shall reccive care, protection and all necessary individual assistance social, educational, vocational, psychological, medical and physical that they may require in view of their age, sex and personality* (Selama dalam tahanan seorang anak mendapat pemeliharaan, perlindungan dan semua kebutuhan individu yang diperlukan, pendidikan, lapangan pekerjaan, kejiwaan, kesehatan, sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadiannya).<sup>115</sup>

<sup>115</sup>. SMR-JJ, Rule 13, Ibid.

### c. Hak-hak dalam Pemeriksaan Pengadilan dan Putusan Hakim

Dalam hal Pemeriksaan Pengadilan (persidangan) dimana pada tingkat sebelumnya anak yang melakukan pelanggaran tidak dikenakan tindakan diversi, maka dalam pemeriksaan harus ditangani oleh pejabat yang berwenang (*competent authority*). Penegasan terhadap jaminan-jaminan tersebut tertuang dalam Rule 14, yang berbunyi:

1). *Where the case of a juvenile offender has not been diverted (under rule 11), she or he shall be dealt with by the competent authority (court, tribunal, council, etc) according to the principles of a fair and just trial* (Dimana dalam kasus anak pelaku pelanggaran tidak dilakukan pengalihan sebagaimana diatur dalam rule 11, dia harus ditangani oleh pihak yang berkompeten seperti pengadilan, tribunal dll. sesuai dengan prinsip-prinsip pengadilan yang jujur dan adil).

2). *The proceeding shall be conducive to the best interests of the juvenile and shall be conducted in an atmosphere of understanding, which shall allow the juvenile to participate therein and to express herself or himself freely* (Proses pemeriksaan harus menghasilkan hal-hal yang terbaik bagi kepentingan anak dan dilakukan dalam suasana saling pengertian, yang mendorong anak dapat berpartisipasi dalam memberikan pernyataan secara bebas).

Selain itu dalam hal pemeriksaan di pengadilan, SMR-JJ (*Beijing rules*) menegaskan pula pentingnya dilibatkan peran bantuan hukum dan orang tua atau wali. Bantuan hukum tersebut diperoleh dalam upaya memberikan jaminan bagi anak, sehingga bantuan hukum dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sedangkan peran orang tua atau wali dapat dilihat sebagai dorongan secara psikologis dan emosional bagi si anak. Mengenai bantuan hukum dan peran orang tua atau wali dalam proses peradilan, secara tegas dinyatakan bahwa:

1). *Throughout the proceedings the juvenile shall have the right to be represented by a legal adviser or to apply for free legal aid where there is provision for such aid in the country.* (Selama proses persidangan anak berhak menggunakan atau memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma apabila ada ketentuan tersebut di negara yang bersangkutan).

- 2). *The parents or the guardian shall be enteded to partecipate in the proceeding and may be required by the competent authority to attend them in the interest of the juvenile. They may however be denied participation by the competent authority if there are reasons to assume that such exclusion is necessary in the interest of the juvenile* (Orang tua atau wali berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemeriksaan dan diwajibkan hadir oleh pihak yang berkompeten demi kepentingan anak. Mereka pun dapat ditolak untuk berpartisipasi apabila ada alasan demi kepentingan anak).<sup>116</sup>

Sedangkan masalah yang perlu diperhatikan oleh hakim sebelum mengambil keputusan adalah perlunya memperhatikan latar belakang dari kondisi anak pelaku tindak pidana. Persoalan tersebut dapat diperoleh melalui suatu hasil studi (*social refort*) yang menggambarkan latar belakang kehidupan sosial si anak sehingga dia melakukan suatu tindak pidana. Terhadap masalah tersebut, di dalam SMR-JJ diatur dalam Rule 16. Sedangkan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan lebih lanjut Rule 17 menguraikan sebagai berikut:

- 1). *The disposition of the competent authority shall be guided by the fillowing principles:*
  - a. *The reaction taken shall always be in propotion not only to the circumstances and the gravity of the offences but also to the circumstances and the needs of the juvenile as wll as to the needs of the society* (Sanksi yang diambil harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, tetapi pada kondisi dan kebutuhan-kebutuhan si anak serta kebutuhan masyarakat);
  - b. *Restriction on the personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and shall be limited to the possible minimum* (Pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin);
  - c. *Deprivation of personal liberty shall not be imposed unless the juvenile is adjudicated of a serious act involving violence against another person or of persistence in comunitting other serious offences and unless there is no other appropriate response* (Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan kekerasan yang serius terhadap orang

---

<sup>116</sup>. SMR-JJ, Rule 14, Ibid.

lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat);

d. *The well being of the juvenile shall be the guiding factor in the consideration of her or his case* (Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan dalam perkara anak).

- 2) *Capital punishment shall not be imposed for any crime committed by juveniles* (Pidana mati jangan dikenakan pada setiap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak).
- 3) *Juveniles shall not be subject to corporal punishment* (Anak-anak jangan dikenakan pidana badan).
- 4) *The competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time* ( Pihak yang berkompeten setiap saat mempunyai kekuasaan untuk menghentikan proses pemeriksaan).

Apa yang ditegaskan dalam jaminan-jaminan tersebut nampak secara tegas agar dihindari penggunaan sanksi pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak pelaku tindak pidana, dan sebagai gantinya agar memanfaatkan bentuk-bentuk sanksi alternatif. Penggunaan sanksi pidana penjara terhadap perkara anak harus diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), apabila penggunaan sanksi-sanksi alternatif tidak bisa diterapkan. Namun demikian, itupun hanya diterapkan untuk jangka waktu yang pendek.

Sejalan dengan itu, rule 19 lebih lanjut menegaskan bahwa:

*"The Placement of a Juvenile in a Institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period* (penempatan seorang anak dalam suatu lembaga senantiasa dilakukan sebagai upaya terakhir untuk waktu yang pendek)".

Pentingnya anak terhindar dari pengenaan pidana penjara, bukan hanya hilangnya kemerdekaan itu sendiri, melainkan karena anak akan terpisah dari

lingkungan sosialnya yang biasa. Hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi si anak.

## 2. Perlindungan Hukum dalam Persidangan Perkara Pidana Anak

Setiap masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam menangani kejahatan dan kenakalan yang merupakan reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan kenakalan. Sistem kelembagaan yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, *Custodial institution*, dan metode supervisi serta pembinaan pelaku tindak pidana (*Treatment of Offender*) dalam masyarakat. Tujuan dari reaksi terhadap kejahatan dan kenakalan adalah sebagai perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dalam arti sempit sebagai pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan serta resosialisasi petindak pidana.

Penanganan terhadap pelanggaran hukum pidana yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat dan yang merupakan kehendak masyarakat, dalam sistem hukum masyarakat modern (masyarakat yang kompleks) ditangani oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sebagaimana dikemukakan Chambliss dan Seidmen, bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan tradisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Demikian pula hukum di dalam masyarakat modern itu tidak luput dari pengaruh birokratisasi itu.<sup>117</sup> Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri telah

<sup>117</sup>. Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 74.



mengkodisikan sebagian lapisan masyarakat Indonesia, sehingga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kebutuhan jalannya penerapan sistem hukum, termasuk dalam proses peradilan pidana anak.

Walaupun di Indonesia belum terdapat undang-undang tentang peradilan anak, namun para ahli yang mempunyai perhatian besar terhadap anak, pada umumnya sepakat bahwa pada hakikatnya peradilan anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa Proses peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut tentang perlindungan kepentingan anak, baik pada pemeriksaan pendahuluan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, tujuan proses peradilan anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.<sup>118</sup>

Perlunya mengedepankan kepentingan dan hak-hak anak dalam proses persidangan karena diakui bahwa anak yang melakukan tindak pidana sesungguhnya karena sangat besar dipengaruhi oleh faktor biologis maupun luar dari si anak itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan Oemar Seno Adji<sup>119</sup> yang mengatakan bahwa langkah perbuatan anak berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya masih ditentukan oleh keadaan sekitarnya atau sekelilingnya. Oleh sebab itu masalah anak nakal perlu diselesaikan melalui suatu peradilan khusus, agar ada jaminan, bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk

<sup>118</sup>. Lela B. Costin, Op.cit, p. 92.

<sup>119</sup>. Omer Seno Adji, Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Lokakarya Peradilan Anak, Semarang, 1977.

kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Kenyataan demikian, diakui pula oleh Sri Widoyati, bahwa walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah-langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, namun karena kualitasnya sebagai anak, maka pada umumnya keadaan sekitarnya yang menimpa pada dirinya lebih besar pengaruhnya dalam menentukan sikap daripada nilai pribadinya.<sup>120</sup> Atas dasar hal tersebut ia menekankan agar persidangan ditujukan kearah pengembangan pribadi demi kesejahteraan anak. Oleh karena itu proses peradilan anak dari sejak ditangkap sampai diputus dan perlakuan selanjutnya dalam pembinaan, harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang bermoral tinggi dan terdidik khusus atau setidaknya memahami tentang masalah anak, terutama hakimnya. Dengan demikian, perlakuan selama dalam proses peradilan yang dikenakan terhadap si anak wajib ditujukan ke arah pengembangan pribadinya demi kesejahteraan anak. Wajib dijaga agar proses peradilan dengan segala perlengkapan dan protokolnya jangan sampai menimbulkan pengaruh-pengaruh yang justru dapat membuat nilai kemanusiaan si anak menjadi lebih rendah dari pada sebelumnya.

Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa dalam penanganan anak tidak cukup apabila hanya sebagai tujuan sosial saja, karena hal demikian akan merupakan pekerjaan sosial belaka. Sedangkan peradilan anak harus tetap merupakan suatu peradilan. Artinya bahwa seorang yang mengadili perkara anak adalah seorang

---

<sup>120</sup> Sri Widoyati. W.S., *Sistimatika Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak*, Dokumen Dasar Pada Lokakarya Peradilan Anak BPHN-UNDIP, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 69.

hakim dengan pengetahuan dan perhatian khusus, karena apabila tidak demikian, akan terdapat kekurangan yang sangat fundamental.<sup>121</sup>

Nampak jelas tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai dalam proses peradilan anak adalah hendak melindungi anak bermasalah dari berbagai dimensi yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kepribadiannya. Oleh karena itu titik beratnya tidak didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan.

Berkaitan dengan masalah perlindungan anak dalam proses peradilan, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak telah sepakat menghasilkan beberapa pertimbangan mengenai perlakuan terhadap anak, antara lain berisi:

1. Bahwa hak anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak melupakan menanamkan rasa tanggung jawab kepadanya, untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang memungkinkan anak melakukan kewajiban tersebut.
2. Bahwa perlindungan anak dalam arti pemenuhan hak dan kewajibannya secara optimal dan bertanggung jawab merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.
3. Perlakuan terhadap anak diatur menurut umur dan kepentingan.
4. Dalam proses peradilan terlibat peranan penegak hukum dan instansi lain yang membantunya sehingga dicapai suatu sikap dan perlakuan yang mementingkan pemenuhan hak dan kebutuhan anak.
5. Dalam hubungan dengan proses peradilan anak, disepakati bahwa sejak awal proses sampai selesai pelaksanaan keputusan hakim, proses peradilan tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada anak tetapi juga kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.
6. Dalam hubungan dengan proses peradilan, perlakuan anak diatur sedemikian rupa sehingga perasaan keadilan dan tuntutan hukum dapat diterapkan secara seimbang dan serasi sehingga memenuhi harapan masyarakat dan harapan bagi kepentingan perlindungan anak.

<sup>121</sup>. Sri widojati W.S., *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 16.

Untuk itu pemerintah hendaknya segera mewujudkan Undang-Undang tentang Peradilan Anak yang memuat prinsip keseimbangan tersebut di atas.

7. Agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya Simposium merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penelitian yang cermat tentang produk perundang-undangan yang ada, hukum adat serta hukum agama yang mengatur ataupun berkaitan erat dengan usaha perlindungan anak untuk kemudian menentukan tingkat validitas dan mengusahakan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Penerapan ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak memerlukan mekanisme kerja yang tepat dan wadah atau lembaga perlindungan anak yang melaksanakan fungsinya secara terpadu dan terkoordinasi baik.
3. Agar pemerintah bersama - sama masyarakat memperluas usaha nyata dalam penyediaan fasilitas bagi perlindungan anak.<sup>122</sup>

Sejalan dengan maksud tersebut, Arief Gosita mengemukakan bahwa karena dalam proses peradilan pidana anak-anak dalam hal-hal tertentu kerap kali tidak dapat mengembangkan hak-haknya, maka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan demikian perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan perlindungan tersebut, antara lain usaha-usaha yang ditujukan kepada: pembinaan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan

<sup>122</sup>. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*. 24-26 Januari 1980, Binacipta, Bandung, 1984, hal.137-141.

yang edukatif, konstruktif, intergratif, kreatif yang positif serta tidak mengabaikan aspek-aspek mental, fisik, sosial seorang anak.<sup>123</sup>

Untuk menunjang hal tersebut, ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya dalam proses persidangan. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
2. Hak mendapatkan pendamping penasihat selama persidangan.
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
4. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas tindakan hukum yang dilakukan terhadapnya
7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.<sup>124</sup>

Dengan demikian permasalahan hak-hak anak dalam proses persidangan harus diamati dan dipahami menurut proforsi yang sebenarnya secara dimensional, karena persoalan tersebut merupakan suatu hasil interaksi sebagai pengaruh dari adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Berlandaskan kepada fenomena tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan sidang anak yaitu untuk mendidik kembali (*reeducate*), dan memperbaiki (*rehabilitate*) anak, bukan semata-mata untuk menghukum (*not to punish the child*), maka tujuan pemberian sanksi terhadap anak bersifat pembinaan dan perlindungan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan kebutuhan pembinaan si anak. Oleh karena

<sup>123</sup>. Arief Gosita, *Pengembangan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana (Beberapa catatan)*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 50-51.

<sup>124</sup>. Arief Gosita, *Ibid*, hal. 52-55.

itu salah satu karakteristik yang sangat menonjol dari prosedur persidangan anak adalah adanya investigasi sosial yang dilakukan oleh *probation officer* yang bertugas pada peradilan anak atau dikenal dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Lembaga tersebut melakukan investigasi sosial dengan tujuan menghimpun data untuk memahami kepribadian anak, keluarganya, kondisi sosial ekonomi, motivasi dari tindak pidana yang dilakukan guna untuk menentukan rencana pembinaan dan rehabilitasinya. *probation officer* mengevaluasi data dalam hubungannya dengan kondisi sosial dan kebudayaan tempat anak tersebut tinggal, dan memberikan rekomendasi kepada pengadilan dengan tujuan mencari ukuran yang terbaik yang dapat membantu anak. Di samping itu tes fisik dan psikologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan dapat menginterpretasikan kepribadiannya. Dari apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak bermasalah nampak adanya korelasi yang sangat erat antara peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sikap budaya masyarakat. Kesemuanya itu harus terintegrasi dengan baik sehingga dapat menciptakan suatu iklim yang kondusif dalam upaya menciptakan proses persidangan perkara pidana anak yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Dari aspek peraturan perundang-undangan, langkah yang ditempuh dilakukan dengan menghimpun serta mengintegrasikan semua ketentuan yang telah ada baik nasional maupun universal kemudian memformulasikannya dalam suatu

bentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi serta perkembangan masyarakat.

Dari aspek sumber daya manusia yang merupakan faktor yang sangat mendukung jalannya persidangan yang baik, persyaratan yang harus dipenuhi bukan hanya mempertimbangkan segi kesenioritasan, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan yang bersifat multi dan interdisipliner serta dilandasi moral yang baik merupakan faktor yang sangat melekat yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum. Kesemuanya itu perlu didukung pula dengan dilibatkannya para ahli yang berkompeten dalam penanganan anak bermasalah.

Dari aspek sarana dan prasarana, persoalan yang sangat mendasar adalah tersedianya berbagai fasilitas yang diperlukan guna mendukung efektivitas peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga undang-undang yang telah diciptakan dengan baik tidak berhadapan dengan berbagai kendala yang dapat menghambat mekanisme pelaksanaan persidangan anak.

Sama halnya dengan aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana pun sedapat mungkin harus dikaji secara proporsional sehingga dapat memenuhi dan menunjang tujuan dilaksanakannya sidang anak sebagaimana telah diformulasikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan budaya masyarakat yang mampu menciptakan terselenggaranya penegakan hukum, sehingga dapat memenuhi kepentingan anak pelaku tindak pidana serta kepentingan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, peraturan perundang-

undangan yang telah memenuhi alasan pembaharuan<sup>125</sup> dapat berjalan secara efektif.

---

<sup>125</sup> . Dalam melaksanakan pembaharuan hukum pidana, alasan yang harus dipikirkan meliputi alasan politis (kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP nasional sendiri), alasan sosiologis (merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional), alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia), serta alasan adaptif (KUHP nasional yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab). **Muladi**, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum UNDIP, 24 Februari 1990.



### **BAB III**

## **Analisis Terhadap Proses Penegakan Hukum Perkara Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ibu Kota Propinsi Jawa Barat**

### **A. Peraturan Perundang-undangan sebagai Alas Hukum dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Anak di Indonesia**

#### **1. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai Alas Hukum dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Anak di Indonesia**

Apabila kita telusuri peraturan hukum pidana materiil yang mengatur tentang perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, ternyata KUHP hanya mengatur dalam tiga pasal saja, yaitu Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Pasal 45 KUHP mengatakan bahwa:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun;

atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap;

atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”<sup>126</sup>

Pasal tersebut meminta dua syarat yang harus dipenuhi:

1. Orang tersebut waktu dituntut harus belum dewasa, yaitu mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa.

---

<sup>126</sup>. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Terjemahan resmi, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

2. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan orang tersebut pada waktu ia sebelum berumur 16 tahun.

Jika kedua syarat tersebut dipenuhi, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan:

- a. Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman suatu apa;
- b. Anak itu dijadikan anak negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi diserahkan kepada Rumah Pendidikan Anak-Anak untuk mendapat didikan dari negara sampai anak itu berumur 18 tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan bila anak itu telah berbuat suatu kejahatan atau pelanggaran yang termaktub dalam pasal ini dan sebagai recidive.
- c. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa. Dalam hal ini ancaman hukuman dikurangkan dengan sepertiganya.

Dengan tiga macam kemungkinan itu, kepada hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rokhani terdakwa yang masih muda tersebut. Apabila misalnya hakim berpendapat, bahwa anak-anak yang umurnya 9 tahun atau 13 tahun kecakapan akalnya ternyata tidak normal perkembangannya, maka sudah cukup hakim mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, wali atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhkan suatu hukuman. Akan tetapi apabila hakim menganggap anak-anak yang berumur 13 atau 15 tahun telah berbuat suatu kejahatan dengan akal yang cukup mampu untuk membedakan, hakim ada kesempatan pula untuk

menjatuhkan hukuman akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.<sup>127</sup>

Menurut Pasal 46 KUHP:

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.<sup>128</sup>

Pasal tersebut merupakan aturan administrasi tentang apa yang harus dikerjakan, apabila hakim telah memberi perintah, bahwa tersalah akan diserahkan kepada pemerintah. Penyerahan ini selesai jika telah mencapai umur 18 tahun. Administrasi itu dapat memilih antara penempatan dalam rumah pendidikan negeri atau mempercayakan untuk dididik oleh orang lain, perserikatan, lembaga atau badan kesosialan partikulir.<sup>129</sup>

Sedangkan Pasal 47 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.<sup>130</sup>

<sup>127</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komenta-Komentarnya*, Politea, Bogor, 1995.

<sup>128</sup> Tim Penerjemah, *Op.cit.*

<sup>129</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*

<sup>130</sup> Tim Penerjemah, *Op.cit.*

Dari ketiga pasal tersebut nampak adanya pengaturan khusus bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana. Namun demikian apabila kita lihat ketentuan Pasal 45 KUHP ternyata pasal tersebut tidak membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan kata lain KUHP tidak menentukan perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak. Selain itu, ketentuan Pasal 45 KUHP tersebut tidak mengatur pula batas umur minimum bagi seorang anak yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Dengan demikian, bagi anak yang baru lahirpun tidak tertutup kemungkinan dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut karena baik dipandang dari perbuatan maupun dari aspek kemampuan pertanggungjawaban, secara yuridis formal telah memenuhi syarat. Dalam kondisi yang demikian sudah selayaknya ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur untuk ditinjau kembali, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat yang ada sekarang ini. Dalam hal hukum pidana formal, ketentuan khusus yang berlaku bagi anak pelaku tindak pidana dapat kita lihat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 KUHP. Dimana dalam Pasal 153 ayat (3) disebutkan bahwa: "Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak". Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa: "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum".<sup>131</sup>

<sup>131</sup>. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*,

Ketentuan lain yang menyangkut hukum acara khusus bagi anak dapat kita temukan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Dalam Pasal 6 dikatakan bahwa: "Ketentuan mengenai pakaian dalam sidang pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pemeriksaan pengadilan anak".

Sedangkan dalam Pasal 4 antara lain mengatur tentang Tata Tertib Pakaian dan Atribut Selama Persidangan. Bahwa selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum menggunakan toga berwarna hitam, dengan lengan lebar dan bef dengan atau tanpa peci hitam, sedangkan pakaian bagi panitra adalah jas berwarna hitam.<sup>132</sup>

Dengan melihat apa yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas, ternyata pengaturan khusus yang mengatur tentang hukum acara bagi anak pelaku tindak pidana sebagai mana yang diatur dalam KUHAP hanya terdapat dalam satu pasal saja. Itu pun hanya mengatur tentang ruang sidang pada saat berlangsungnya pemeriksaan. Sedangkan yang menyangkut masalah tata tertib pakaian atribut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian selain ketentuan sidang tertutup untuk umum serta penggunaan atribut selama persidangan, maka ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut hukum acara berlaku semua ketentuan KUHAP sebagaimana yang diperuntukkan bagi orang dewasa.

Adanya ketentuan yang menetapkan sidang anak tertutup untuk umum, sebelumnya sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

---

Politeia, Bogor, 1981.

<sup>132</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, LN. 1983-36, *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Cetakan ke 2, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1992, hal. 1488.

1959. Ketentuan tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut dari adanya konsensus bersama yang berupa kesepakatan lisan antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Pra Yuwana pada tahun 1958.

Di lingkungan wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta sendiri dalam rangka untuk mengatasi kesulitan penyelenggaraan sidang anak serta memperkuat kesepakatan lisan empat instansi tersebut dikeluarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang berisi Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak. Pokok-Pokok yang mengatur tentang pengkhususan tertentu dalam proses sidang pengadilan anak tersebut, antara lain:

1. Perkara anak disidangkan:
  - a. Terpisah dari orang dewasa
  - b. Pada hari tertentu saja
  - c. Oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.
2. Baik hakim, jaksa dan polisi dalam sidang anak tidak memakai toga/pakaian dinasnya masing-masing.
3. Sidang selalu bersifat tertutup, pers tidak boleh hadir dan keputusannya diucapkan dalam sidang tertutup pula, publikasipun dilarang.
4. Orang tua/wali/penanggung jawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi anak, misalnya keadaan rumah, bahan mana yang perlu untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan penempatan anak.
5. Sejak dari penyidikan oleh kepolisian telah diambil langkah-langkah pengkhususan, misalnya:
  - a. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa.
  - b. Tempat penahanan terpisah pula dari tempat tahanan untuk orang dewasa.
6. Oleh kejaksaan telah pula ditunjuk Jaksa khusus sebagai penuntut untuk perkara anak.
7. Dalam sidang perkara anak diikutsertakan seorang *social worker* atau *probation officer*, yaitu pekerja sosial dibidang kehakiman dari Dit.Jen Pemasyarakatan

Departemen Kehakiman RI. Tenaga teknis tersebut di daerah dilaksanakan oleh petugas Balai BISPA<sup>133</sup>.

Mengenai Tata Tertib Persidangan Dan Tata Ruang Sidang, Menteri Kehakiman pada tahun 1983 mengeluarkan suatu Peraturan Nomor M 06-UM.01.06 tahun 1983. Khusus mengenai Tata Tertib Sidang Perkara Tindak Pidana Anak, dalam Pasal 9-12 ditegaskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 9 : Sambil menunggu Undang-Undang tentang Peradilan Anak tata tertib

Sidang Anak adalah sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.

Pasal 10 : Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali :

- (1) dalam hal tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan pemeriksaan dengan Hakim Majelis.
- (2) pemeriksaan Sidang Anak dilakukan dengan pintu tertutup.
- (3) putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 11 : Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum bersidang tanpa toga.

Pasal 12 : (1) Dalam sidang anak, anak diperiksa dengan kehadiran orang tua, atau wali atau orang tua asuh.

- (2) Untuk mengetahui latar kehidupan anak, hakim menugaskan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman untuk membuat Laporan Sosial Anak yang bersangkutan.

(3) Laporan Sosial dimaksud ayat (2) meliputi:

- a. Keadaan anak, baik fisik, psykis, sosial maupun ekonomi.
- b. Keadaan rumah tangga orang tua atau wali atau orang tua asuh serta penghuni lainnya.

<sup>133</sup> D.Y. Staa, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak-Anak Di Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta*, Binacipta, 1979, hal. 44-45.

c. Keterangan mengenai kelakuan anak di sekolah atau di tempat pekerjaan.

d. Hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungan seperti rukun tetangga, kepramukaan.

Dengan melihat hal tersebut, nampak jelas bahwa pengaturan masalah tindak pidana anak di bawah umur belum terintegrasi secara terpadu dalam suatu peraturan perundang-undangan, melainkan masih bercampur baur (tersebar) dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturannyapun hanya meliputi dalam beberapa pasal saja, bahkan hanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan setingkat Menteri, yang secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara luas.

Aspek lain yang dapat kita kaji lebih jauh, bahwa ketentuan peraturan yang secara khusus mengatur masalah persidangan perkara pidana anak, nampak sekali masih belum menyentuh hakikat yang mendasari aspek hukum dari perlindungan anak. Padahal apabila kita tinjau kembali hal-hal yang mendasari perlindungan terhadap anak sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tentang Kesejahteraan Anak,<sup>134</sup> dalam kondisi apapun mengedepankan kepentingan anak merupakan faktor yang paling dominan.

<sup>134</sup>. Dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak antara lain menyatakan bahwa:

Pasal 3: Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 6 (1) : Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

(2) : Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.



## 2. Kajian Terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak

### 2.1 Tinjauan Terhadap Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak

#### a. Masalah Batas Umur Pertanggungjawaban Pidana Anak

Ketentuan baru yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak (RUUPA) adalah ditentukannya batas usia minimum. Batas usia minimum tersebut terdiri dari batas usia untuk anak yang dapat diajukan ke sidang anak dan batas usia untuk dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam Pasal 3 RUUPA secara tegas dikatakan bahwa:

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.<sup>135</sup>

Dari ketentuan tersebut nampak bahwa bagi seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana, maka hanya anak yang sudah berumur 8 tahun yang dapat diajukan ke sidang anak, sedangkan batas maksimalnya sampai anak berumur 18 tahun. Batas usia minimum bagi pertanggungjawaban pidana dapat kita lihat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), yang menyatakan bahwa:

ayat (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

<sup>135</sup>. Walaupun anak usia lebih dari 18 tahun diajukan pada sidang anak, namun dalam hal penjatuhan pidana berlaku ketentuan yang ada dalam KUHP.

ayat (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dengan demikian, apabila anak yang sudah berumur delapan tahun dan belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana yang dapat diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka terhadapnya hanya dikenakan sanksi yang berupa tindakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) b, yaitu diserahkan kepada negara untuk “mengikuti pendidikan”, “pembinaan “dan “latihan kerja”.

Apabila tindak pidana yang dilakukannya itu tidak diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka anak tersebut dijatuhi salah satu tindakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 yaitu “dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh”, “diserahkan kepada negara” atau “diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan”.

Ditentukannya batas usia minimum dalam RUUPA, ternyata sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dokumen internasional. Sebagaimana ditegaskan dalam rule 4.1 SRM-JJ (*Beijing Rules*). Walaupun dokumen tersebut tidak secara tegas menentukan batas usia minimum, namun menegaskan agar batas usia minimum ditetapkan tidak terlalu rendah, dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak. Ditentukannya batas usia pertanggungjawaban 12 tahun dalam RUUPA dirasakan sudah cukup memadai, bahkan batas usia minimum tersebut sejalan

dengan apa yang diatur dalam konsep RKUHP. Dalam Pasal 96 (94 a) konsep menyatakan bahwa:

- (1) Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur dua belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan dalam sub-bab ini berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana antara umur 12 tahun sampai 18 tahun.<sup>136</sup>

Dalam penjelasannya Pasal 96 (94a) konsep RKUHP menyatakan bahwa:

“Ditentukannya batas usia pertanggungjawaban pidana antara 12-18 tahun, antara lain karena didasarkan kepada berbagai pertimbangan psikologis baik dilihat dari segi emosional, intelektual maupun mental. Pada umumnya anak-anak yang berumur 12 tahun merupakan anak-anak yang telah selesai mengikuti pendidikan sekolah dasar, sedangkan batas umur maksimal 18 tahun untuk dapat diajukan kepengadilan anak, karena dianggap sesuai dengan umur kedewasaan anak. Seorang yang berumur lebih 18 tahun dianggap sudah dewasa karena mereka dapat membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik berdasarkan hukum yang berlaku”.<sup>137</sup>

Namun demikian karena dalam RUUPA batas usia minimum ditetapkan 8 tahun, maka anak antara usia 8 hingga 12 tahun dapat pula diajukan/diproses ke persidangan, walaupun sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pemberian tindakan. Bahkan apabila kita lihat ketentuan Pasal 5, anak yang berumur di bawah 8 tahunpun dimungkinkan untuk diproses.

Menyoroti persoalan tersebut, Barda Nawawi Arief beranggapan bahwa penentuan batas minimum tersebut dirasakan terlalu rendah. Ia mengatakan bahwa walaupun anak yang diproses tidak dipidana dan hanya

<sup>136</sup>. Departemen Kehakiman, *Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru)*, Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, disempurnakan oleh TIM KECIL sampai dengan 13 Maret 1993.

<sup>137</sup>. Departemen Kehakiman, *Naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Baru) Penjelasan*, Panitia penyusunan RUU KUHP 1991/1992, disempurnakan oleh TIM KECIL sampai dengan 13 Maret 1993.

dikenakan tindakan, namun pengalaman selama proses diajukan ke persidangan akan membawa “stigma” dan dampak negatif bagi anak usia rendah.<sup>138</sup>

Berkenaan dengan masalah tersebut kiranya perlu dipertimbangkan kembali penetapan batas usia minimum yang ditetapkan. Sehingga apa yang menjadi hakikat dari perlindungan bagi anak bahwa semua tindakan yang dilakukan kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama (Pasal 3 Convensi Hak-Hak Anak), serta hak anak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4) UU Kesejahteraan Anak) betul-betul terealisasi.

Walau bagaimanapun kondisi anak pada usia rendah sebagaimana pula ditegaskan dalam penjelasan Pasal 96 RKUHP, dilihat dari berbagai disiplin ilmu diakui sebagai usia yang patut mendapat perhatian khusus, sehingga bagi anak yang masih sangat muda usianya terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik maupun psikisnya.

#### **b. Masalah Pidana dan Tindakan**

Ketentuan yang juga merupakan sesuatu hal yang baru adalah ditegaskannya pengaturan mengenai Pidana dan Tindakan.

Apabila kita lihat ketentuan dalam Bab III RUUPA, sesuai dengan judul yang diberikan ternyata hanya mengatur mengenai jenis sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Sedangkan mengenai pedoman pemidanaan yang merupakan

<sup>138</sup> . Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah pada Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum UNPAD, 5 Oktober 1996, hal. 11.

prinsip-prinsip bagi hakim dalam menjatuhkan pidana atau tindakan bagi anak tidak diaturnya. Padahal pedoman penjatuhan pidana inilah yang dirasakan sangat penting apalagi dalam menghadapi pelaku tindak pidana anak. Kenyataan tersebut sangat berbeda apabila kita bandingkan dengan apa yang diatur dalam konsep RKUHP.<sup>139</sup>

Apabila kita melihat jenis-jenis pidana yang diancamkan dalam RUUPA, nampak adanya perbedaan yang sangat mendasar, hal tersebut dapat kita amati dari pengklasifikasian jenis pidana pokok yang menempatkan pidana penjara pada urutan pertama. Dalam Pasal 23 ayat (2) RUUPA secara tegas menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.<sup>140</sup>

Pengaturan demikian sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam konsep RKUHP, karena pidana perampasan kemerdekaan diklasifikasikan sebagai jenis pidana pokok paling akhir setelah urutan sanksi yang lebih ringan. Pasal 99 (94 d) konsep RKUHP menetapkan sebagai berikut:

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

ke-1 Pidana nominal

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana teguran keras.

ke-2 Pidana dengan syarat

<sup>139</sup>. Lebih jauh lihat Pasal 52 (baru)-57 (56) baru konsep RKUHP.

<sup>140</sup>. Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak.

- a. Pidana pembinaan di luar lembaga;
- b. Pidana kerja sosial;
- c. Pidana pengawasan.

#### ke-3 Pidana denda

#### ke-4 Pidana pembatasan kebebasan

- a. Pembinaan di dalam lembaga;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana tutupan.<sup>141</sup>

Dari gambaran tersebut nampak bertolak belakang antara ketentuan yang diatur dalam RUUPA dengan yang diatur dalam konsep RKUHP. Atas dasar hal tersebut penulis mempunyai anggapan bahwa jenis sanksi yang diatur dalam RUUPA sangat “memprimadonakan” sanksi pidana pembatasan kemerdekaan. Pengaturan demikian, didasarkan kepada teori pemidanaan klasik dimana tujuan pemidanaan lebih mengedepankan sifat pembalasan. Padahal apabila kita perhatikan perkembangan tujuan pemidanaan sebagai pengaruh dari usaha-usaha pembaharuan telah mengalami pergeseran dari teori pemidanaan klasik kepada teori pemidanaan modern, yakni dengan mencari alternatif-alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk pemidanaan-pemidanaan yang bersifat non-institusional. Bahkan dalam upaya untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana yang bersifat operasional dan fungsional mendorong untuk memilih teori yang integratif tentang tujuan pemidanaan.<sup>142</sup>

<sup>141</sup>. Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, Op.cit.

<sup>142</sup>. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis, dengan asumsi bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal tersebut terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan lebih dititik beratkan kepada sifatnya yang kasuistik. Tujuan pemidanaan yang dimaksud meliputi: (1) Pencegahan

Sehubungan dengan pengenaan pidana perampasan kemerdekaan, instrumen internasional memberikan pedoman bahwa anak-anak jangan dikenakan pidana badan. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius serta tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Penempatan anak dalam suatu lembaga harus dilakukan sebagai upaya terakhir dengan waktu yang sangat pendek (lihat kembali rule 17 dan 19 *Beijing rules*).

Sehubungan dengan hal tersebut pengaturan prinsip-prinsip atau pedoman pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam konsep RKUHP<sup>143</sup> merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam ketentuan tentang peradilan.

Melihat kenyataan demikian, penulis berpendapat pengaturan pidana dan tindakan sebagaimana yang diatur dalam RUUPA sebaiknya dihapuskan saja dan sebagai gantinya mengintegrasikan kepada ketentuan-ketentuan yang

---

(umum dan khusus); (2) Perlindungan masyarakat; (3) Memelihara solidaritas masyarakat; (4) Pengambilan /pengimbangan. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 61.

<sup>143</sup>. Dalam Pasal 52 (baru) Konsep RKUHP menegaskan Pedoman pemidanaan

(1) Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan:

- ke-1 kesalahan pembuat;
- ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- ke-3 cara melakukan tindak pidana,
- ke-4 sikap batin pembuat;
- ke-5 riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
- ke-6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

(2) Jika hakim memandang perlu, sehubungan dengan ringannya perbuatan, keadaan pribadi dari pembuat atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian, hakim dapat memberi maaf kepada si pembuat dengan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

terdapat dalam konsep RKUHP, karena apa yang diatur dalam konsep pengenaan sanksi perampasan kemerdekaan dirasakan lebih selektif dan limitatif serta lebih bersifat humanistik. Dengan demikian proses peradilan anak sesuai dengan ide dasar serta karakteristik yang berbeda dari proses peradilan orang dewasa. Agar upaya tersebut terdapat suatu sinkronisasi selanjutnya konsep RKUHP terlebih dahulu dilegalisasi menjadi suatu undang-undang sebelum undang-undang tentang Peradilan Anak.

Hal lain yang sangat menarik dari jenis pidana pokok baru dalam RUUPA adalah diaturnya jenis sanksi yang berupa "pidana pengawasan".

Dalam Pasal 30 RUUPA menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan.

Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa terhadap anak nakal dapat pula dijatuhkan pidana pengawasan dengan jangka waktu minimal tiga bulan dan maksimal dua tahun. Pidana pengawasan dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Adanya ketentuan tersebut apabila kita hubungkan dengan pasal sebelumnya (Pasal 29) yang mengatur tentang "pidana bersyarat", pengertiannya menjadi kabur. Dimana dalam Pasal 29 ayat (7) dijelaskan



bahwa "Dalam hal dijatuhkan pidana bersyarat, selama masa hukuman bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditentukan".

Dengan demikian nampak adanya kesamaan antara "pidana bersyarat" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29, dengan "pidana pengawasan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 RUUPA. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan akan maksud dari pidana pengawasan. Selain itu dalam RUUPA sendiri tidak mengatur pedoman tentang penjatuhan pidana pengawasan, sedangkan untuk pidana bersyarat justru sebaliknya. Dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa: "Hukuman pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun".

Dari ketentuan tersebut secara tegas bahwa pidana bersyarat dikaitkan dengan pidana pokok penjara. Ketentuan demikian dalam Pasal 30 tidak ditemukan. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah pidana pengawasan dapat dijatuhkan terhadap semua jenis pidana yang diancamkan atau hanya terhadap jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim baik berupa pidana penjara, kurungan atau denda? Juga apakah dapat dikenakan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau hanya untuk tindak pidana tertentu saja ?

Hal lain yang menyangkut persoalan pertanggungjawaban, baik berupa pidana ataupun tindakan, ternyata RUUPA menganut pertanggungjawaban secara pribadi (*individual/personal liability*). Masalah tersebut pada

hakikatnya merupakan sesuatu prinsip umum dimana hanya si pelaku yang bersalah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut apabila diterapkan terhadap anak yang dengan sifat-sifat kehususannya belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri, maka penerapan prinsip demikian rasanya patut mendapat perhatian yang serius mengingat anak pada hakikatnya masih bersifat ketergantungan (indefendensi).

Atas dasar hal tersebut kiranya patut di kaji kembali penerapan sistem pertanggungjawaban yang bersifat fungsional/struktural. Sehingga tujuan penanggulangan kejahatan tidak hanya ditujukan kepada pencegahan individu semata, melainkan ada keseimbangan dengan tujuan penanggulangan kejahatan secara struktural. Walaubagaimanapun anak yang melakukan kejahatan sesungguhnya sebagai akibat dari korban struktural maupun korban lingkungan.

## 2.2 Tinjauan Terhadap Aspek Hukum Pidana Formal

Dari aspek hukum pidana formal (hukum acara), hal-hal yang patut dikaji lebih lanjut antara lain:

### a. Dalam Bidang Penyidikan dan Penuntutan

Dalam suatu sistem peradilan pidana (anak) tahap penyidikan merupakan kontak awal (*initial contact*) antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak aparat kepolisian. Tahap ini merupakan tahap yang penting diperhatikan karena pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya dapat menentukan keberhasilan dalam suatu proses peradilan selanjutnya, melainkan juga membawa pengaruh terhadap perkembangan jiwa anak.

Adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 RUUPA bahwa Penyidik “wajib” memeriksa tersangka dalam “suasana kekeluargaan”, serta “wajib” untuk “meminta pertimbangan” atau “saran” dari pembimbing kemasyarakatan, telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Beijing rules*. Namun demikian, sesuai dengan sifat dan karakteristik anak apakah tidak mungkin dalam tahap penyidikan ini ditegaskan pula kewenangan untuk melakukan penyimpangan (diskresi) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan *Beijing rules* (rule 11). Dan diterapkannya kebijakan tersebut sebaiknya bukan hanya diterapkan terhadap kasus-kasus yang ringan saja tetapi dapat diterapkan juga terhadap kasus-kasus yang lainnya sesuai dengan hasil laporan kemasyarakatan. Selain itu tidak dapat kita pungkiri bahwa pada kenyataan proses penyidikan yang berjalan selama ini masih sering terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan tersangka. Walaupun dalam KUHAP telah diantisipasi melalui lembaga Praperadilan, namun untuk lebih mengefektifkan ungkapan wajib serta betul-betul dapat menjamin kepentingan dan masa depan anak yang telah disangka melakukan tindak pidana, selayaknya ditegaskan pula sanksi terhadap aparat yang melanggarnya (*onrechtmatig overgedaad*).

Dalam hal penangkapan dan penahanan walaupun dalam RUUPA telah dibedakan dengan ketentuan bagi orang dewasa (lihat Pasal 43-50), namun sebaiknya syarat-syarat yang diberikan dibuat dengan kriteria yang lebih ketat, baik dilihat dari pidana yang diancamkan maupun batas usia si pelaku.

Faktor lain yang tidak bisa diabaikan sehingga sangat menunjang keberhasilan dari kesemuanya itu adalah terletak pada profesionalitas aparat itu sendiri. Oleh karena itu syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi penyidik anak bukan hanya didasarkan pada pengalaman, minat, perhatian, dedikasi serta memahami masalah anak semata, melainkan adanya syarat khusus lain yang berupa mengikuti pendidikan dan latihan khusus yang berhubungan dengan masalah anak. Hal tersebut berlaku pula terhadap setiap aparat yang terlibat dalam semua tingkat proses peradilan.

#### **b. Dalam hal Pemeriksaan Pengadilan dan Putusan Hakim**

Dalam hal pemeriksaan proses persidangan RUUPA telah pula memberikan jaminan-jaminan khusus terhadap perlindungan anak yang disangka melakukan tindak pidana. Jaminan tersebut adalah adanya ketentuan yang mensyaratkan agar dalam proses persidangan semua aparat yang terlibat tidak mengenakan pakaian seragam atau toga (Pasal 6), dilaksanakannya sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 8, 57), syarat hakim (Pasal 10). Adanya penegasan tersebut sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Ketentuan *Beijing rules* (lihat rule 14.2). Namun demikian, alangkah lebih bijaksana apabila ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 RUUPA, yaitu **agar pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan** bukan hanya diatur dalam hal penyidikan saja namun ditegaskan pula dalam ketentuan proses pemeriksaan di muka sidang.

Sedangkan yang menyangkut bantuan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 RUUPA, sebaiknya ditegaskan pula pemberian bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Penerapannya bukan hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP,<sup>144</sup> melainkan lebih diperluas meliputi setiap perkara tindak pidana anak. Dengan demikian dilaksanakannya sidang anak dengan melibatkan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan penasihat hukum benar-benar dapat menjamin aspek psikologis, emosi serta keadilan bagi anak.

Menyangkut pentingnya mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebelum hakim mengambil keputusan, RUUPA telah memberikan perhatian<sup>145</sup> sebagaimana yang disepakati dalam rule 16 *Beijing rules*. Persoalan yang dirasakan perlu diperhatikan adalah menyangkut pedoman dan pola pemidanaan.<sup>146</sup> Pentingnya memperhatikan masalah tersebut disebabkan karena pidana dan pemidanaan merupakan

<sup>144</sup>. Pasal 56 KUHAP (UU No. 8 tahun 1981), menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

<sup>145</sup>. Ketentuan yang mewajibkan kepada hakim untuk mempertimbangkan laporan sosial, ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2), yang berbunyi: "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan sosial dari pembimbing kemasyarakatan".

<sup>146</sup>. Menurut Barda Nawawi Arief, Bahwa "Pedoman pemidanaan" lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dapat dikatakan pula bahwa Pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan/penyusunan pidana; sedangkan pedoman pemidanaan merupakan pedoman penjatuhan/penerapan pidana. Dapat dikatakan pula bahwa pola pemidanaan merupakan pedoman legislatif bagi pembuat undang-undang, dan pedoman pemidanaan merupakan pedoman yudicial/yudikatif bagi hakim. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit, hal 187-188.

jantungnya dalam setiap sistem peradilan pidana yang juga mempunyai posisi sentral. Hal tersebut disebabkan pula karena keputusan yang berupa penjatuhan pidana akan mengandung kosekwensi yang sangat luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dinilai *kontroversial*, sebab kebenaran sendiri pada hakikatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.<sup>147</sup>

#### **B. Analisis terhadap kecenderungan Persidangan Perkara Pidana Anak di Wilayah Hukum Ibu Kota Propinsi Jawa Barat**

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian-uraian terdahulu, walaupun secara yuridis-formal undang-undang tentang proses persidangan perkara pidana anak di Indonesia belum ada, namun secara empiris praktik penanganan sidang anak telah lama dilaksanakan. Untuk mengkaji lebih jauh bagaimana praktik penanganan sidang perkara pidana anak dilaksanakan, pada uraian selanjutnya penulis mencoba mengungkapkan analisis hasil penelitian terhadap proses persidangan perkara pidana anak baik yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri I Bandung maupun di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, tingkat perkara pidana anak yang ditangani di kedua pengadilan tersebut menunjukkan jumlah perkara yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan beberapa Pengadilan Negeri lain yang ada di Jawa Barat. Sebagai gambaran jumlah perkara pidana anak yang ditangani pada kedua pengadilan tersebut dapat penulis gambarkan pada tabel di bawah ini:

<sup>147</sup>. Muladi, 1995, *Op.cit*, hal 105-106.

**Tabel 1:**  
**Jumlah Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum**  
**Ibu Kota Propinsi Jawa Barat**  
**Tahun 1991-1995**

No	Tahun	Jumlah
1	1991	16
2	1992	16
3	1993	14
4	1994	17
5	1995	15 *
	<b>Jumlah</b>	<b>78</b>

Sumber PN Bandung dan PN Bale Bandung

\* Catatan: Data Tahun 1995 hanya meliputi PN Bandung

Dari data tersebut di atas, terungkap penanganan proses persidangan sebagai berikut:

#### 1. Kecenderungan Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil pengamatan dari sejumlah berkas perkara serta kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa orang hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan masing-masing,<sup>148</sup> pada hakikatnya mereka berpedoman baik kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, KUHP, KUHPA, maupun peraturan-peraturan dari instansi yang membawahnya yang berupa Surat Keputusan maupun Surat Edaran.

<sup>148</sup>. Berdasarkan pertimbangan Ketua Pengadilan telah ditunjuk dua orang hakim untuk menangani sidang anak, pada PN Negeri I Bandung antara lain Bpk. Didi Gunadi, SH dan Ibu. Rosmala Sitorus, SH. Sedangkan pada PN Bale Bandung, Bpk. Pupung. Rusnariman, SH dan Bpk. Gunawan Wanaraja, SH.

Mekanisme yang selama ini berjalan, setiap menerima pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan pertama-tama melihat pada kewenangan untuk menangani perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP serta Pasal 23 UU 14/70. Apabila cukup alasan, maka sesuai dengan penunjukan Ketua Pengadilan (karena tidak ada hakim khusus yang menangani perkara pidana anak) hakim yang ditunjuk segera mempelajari berkas perkara dengan segala kelengkapannya serta menentukan hari sidang. Apabila perkara yang akan ditangani termasuk tindak pidana yang serius atau meresahkan masyarakat, pada umumnya ditentukan untuk ditangani melalui hakim majelis. Namun karena perkara tindak pidana anak yang masuk pada umumnya termasuk tindak pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat, maka ditangani melalui hakim tunggal. Namun demikian, berdasarkan temuan pada berita acara persidangan, terdapat ketidak konsistenan untuk menentukan kriteria penanganan dengan hakim tunggal atau hakim majelis. Atas dasar konfirmasi dengan hakim yang berhasil diwawancarai<sup>149</sup> terdapat pernyataan bahwa pada umumnya setiap perkara yang ditanganinya selalu dilaksanakan dengan hakim majelis. Dengan alasan karena tidak ada undang-undang yang menegaskan agar peradilan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus diperiksa oleh hakim tunggal. Adanya ketentuan yang mengatur hakim tunggal hanya berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman, di samping ada pengecualian juga karena sudah jelas kedudukannya berada di bawah undang-undang. Kecuali untuk perkara-perkara tindak pidana ringan, penanganannya selalu dilaksanakan dengan hakim tunggal. Adanya Surat

<sup>149</sup>. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmala Sitorus pada tanggal 25 Juni 1996, Bapak Didi Gunadi pada tanggal 19 Juli 1996, Bapak Pupung Rusnariman, SH. Pada tanggal 2 Oktober 1996 serta Bapak Gunawan Wanaradja, SH. Pada tanggal 3 Oktober 1996.



Keputusan Menteri Kehakiman atau Surat Edaran Mahkamah Agung, kesemuanya itu hanya berupa pedoman yang bersifat formal/prosedural. Dengan demikian dalam penanganan terhadap tindak pidana anakpun hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 15 UU No.14/70.<sup>150</sup>

Dari gambaran tersebut nampak diantara para hakim sendiri masih terdapat perbedaan persepsi, sehingga untuk menentukan apakah perkara tindak pidana anak akan ditangani melalui hakim majelis atau hakim tunggal, akan tergantung kepada bagaimana persepsi masing-masing hakim yang telah ditunjuk untuk menangani perkara tersebut. Mengenai jenis perkara tindak pidana anak yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2:**  
**Jenis Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Ibu Kota Propinsi Jawa Barat**  
**Tahun 1991-1995**

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun					Jumlah	%
		91	92	93	94	95		
1	Pencurian	11	13	12	14	13	63	80,77%
2	Penganiayaan	3	2	1	1	2	9	11,54%
3	Kesusilaan	1	-	1	-	-	2	2,56%
4	Penipuan	-	1	-	-	-	1	1,28%
5	Pemalsuan	1	-	-	-	-	1	1,28%
6	Kelalaian menyebabkan mati	-	-	-	1	-	1	1,28%
7	Pengrusakan	-	-	-	1	-	1	1,28%

Sumber PN Bandung dan PN Bale Bandung

<sup>150</sup> Menurut Pasal 15 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 bahwa semua Pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.

Sedangkan tata cara yang dipakai dalam penanganan sidang perkara pidana anak merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 230-232 KUHAP, kecuali ada ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam KUHAP.

Sesuai dengan yuridiksi kewenangan mengadili, maka setiap persidangan dilaksanakan di gedung pengadilan yang telah ditentukan. Pelaksanaan sidang tersebut berlangsung di ruang sidang yang telah disediakan untuk mengadili setiap perkara. Baik lokasi maupun penataan ruang sidang dilaksanakan pada tempat yang sama. Artinya bahwa tidak ada ruang sidang khusus yang diperuntukan bagi perkara anak di bawah umur. Kecuali dalam hal suasana ruang sidang serta pakaian yang dikenakan, hakim merujuk kepada ketentuan yang secara tegas diatur dalam Pasal 153 ayat (3) serta Pasal 10-11 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 06-Um.01.06 tahun 1983.

Dalam hal dilibatkannya peran serta orang tua, wali atau orang tua asuh, serta BISPA dalam pelaksanaan sidang selama ini secara konsisten telah berjalan. Terutama dalam keterlibatan BISPA sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.03-UM.-1.06 Tahun 1991 tentang Perubahan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Ruang Sidang<sup>151</sup> tanggal 30 Nopember 1991 pada

<sup>151</sup>. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06 tahun 1983 tentang tata Tertib ersidangan dan Tat Ruang Sidang diubah yakni kata **Dapat** dalam Pasal 12 ayat (2) diganti dengan kata **wajib** dan rumusan secara lengkap diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 Pasal 12 ayat (2) Untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak, **hakim wajib** menugaskan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan anak tersebut kepada:  
 a. Pembimbing kemasyarakatan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA), di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menyidangkan anak tersebut; atau  
 b. Apabila di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menyidangkan anak tersebut tidak terdapat BISPA, maka hakim dapat menugaskan kepada pembimbing kemasyarakatan BISPA terdekat atau Lembaga Pemasyarakatan setempat.

umumnya hakim sependapat bahwa setiap persidangan pihak BISPA selalu dilibatkan. Sedangkan mengenai keterlibatan penasihat hukum, mereka berpendapat bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP setiap perkara boleh didampingi pengacara atau penasihat hukum.

Berpijak pada dasar pembenaran tersebut, pada umumnya mereka masih menyamakan perkara anak dengan perkara dewasa, sehingga baru dilibatkannya penasihat hukum apabila tersangka diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara minimal lima tahun saja. Dari gambaran tersebut nampaknya mereka belum menghayati makna yang tersirat sebagaimana tercantum dalam rule 15 *Beijing rule*. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun terhadap perkara pidana anak yang berkenaan dengan masalah bantuan hukum, diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel 3:**  
**Data Perkara Pidana Anak yang didampingi Penasihat Hukum**  
**di Wilayah Hukum Ibu Kota Propinsi Jawa Barat**  
**Tahun 1991-1995**

No	Penasihat Hukum	T	A	H	B	N	Jumlah	%
		91	92	93	94	95		
1	Didampingi	2	5	2	5	5	19	24,36 %
2	Tidak Didampingi	14	11	12	12	10	59	75,64 %

Sumber data PN Bandung dan PN Bale Bandung

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perkara yang didampingi penasihat hukum, yaitu hanya mencapai 24,36% sedangkan

sebanyak 75,64% tidak didampingi penasihat hukum. Hal itu menunjukkan bahwa dilibatkannya peran penasihat hukum dalam persidangan perkara pidana anak hanya untuk mendampingi perkara-perkara yang termasuk tindak pidana yang diancam dengan sanksi minimal lima tahun. Dengan kata lain bahwa peran sertanya penasihat hukum dalam persidangan perkara pidana anak apabila telah memenuhi kualifikasi yang secara khusus diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Melihat kenyataan seperti itu dengan ditegaskannya peran penasihat hukum pada Pasal 51 dan 52 RUUPA diharapkan pada masa yang akan datang dapat merubah kondisi serta pola pikir para hakim (anak) yang ada seperti saat ini.

Apabila kita lihat masalah tindakan penahanan sementara, berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 4:**  
**Data Penahanan Sementara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**  
**di Wilayah Hukum Ibu Kota Propinsi Jawa Barat**  
**Tahun 1991-1995**

	T A M B U R										Jumlah	%
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00		
Ditahan	14	87,5 %	15	93,75 %	14	100 %	16	94,2 %	15	100 %	74	94,87 %
Tidak ditahan	2	12,5 %	1	6,25 %	0	0%	1	5,8 %	0	0%	4	5,13%

Sumber data PN Bandung dan PN Bale Bandung

Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa ternyata hampir setiap anak yang disangka telah melakukan tindak pidana yakni sebanyak 94,87%, sebelum

mereka diajukan ke sidang pengadilan telah dilakukan tindakan penahanan sementara, sedangkan hanya 5, 13% tidak dikenakan tindakan penahanan sementara. Dengan melihat gambaran tersebut menunjukkan betapa besarnya prasangka atau kurang percayanya pihak aparat terhadap anak yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut keterangan pihak penyidik<sup>152</sup> alasan dilakukannya tindakan penahanan sementara tersebut di samping atas dasar jenis tindak pidana yang dilakukan, juga karena adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Atas dasar hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ternyata pihak penyidik dalam menangani perkara pidana anak hanya terpaku kepada ketentuan Pasal 21 KUHP. Dengan demikian nampak betapa rigid/kakunya penanganan yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga kurang memperhatikan aspek sosial kultur yang terdapat dalam masyarakat. Kenyataan seperti itu mencerminkan lebih mengedepankan kepada pertimbangan aspek perbuatan dari pada aspek individu sebagai pelaku. Padahal apabila kita perhatikan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak maupun Beijing Rules, tindakan penahanan sedapat mungkin dilakukan sebagai upaya terakhir dan kalau pun atas dasar demi kepentingan anak perlu dilakukan, sebaiknya digunakan alternatif-alternatif lain yang dalam KUHP sendiri sudah jelas pengaturannya. Apalagi dengan mengingat kesiapan sarana/fasilitas yang ada, baik di tingkat kepolisian, Kejaksaan maupun pengadilan sepanjang yang penulis amati belum tersedia ruangan khusus yang disediakan bagi tersangka anak di bawah umur. Kalau pun

<sup>152</sup>. Wawancara dengan Bp. Kunto Prasetyo, SH. Sebagai Ka.UR.Bin.Op. Polwiltabes Bandung, pada tanggal 26 Juli 1996, serta Serse Wasiman, pada tanggal 30 Juli 1996.

ada ruangan khusus bagi anak yang disediakan pada blok tertentu di Rutan jalan Jakarta Bandung, namun ruangan tersebut masih menyatu (satu atap dan satu pintu gerbang) dengan tempat tahanan orang dewasa. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa besarnya pengaruh yang dapat menimbulkan stigmatisasi dan victimisasi bagi anak.

Apabila dilihat dari penjatuhan vonis hakim, jenis sanksi yang diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana cenderung lebih banyak penerapan sanksi yang berupa pidana penjara. Bila kita bandingkan dengan jenis sanksi yang terdapat dalam Pasal 45-47 KUHP menunjukan variasi sebagai berikut:

**Tabel 5:**  
**Vonis Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**  
**di Wilayah Hukum Ibu Kota Propinsi Jawa Barat**  
**Tahun 1991-1995**

No	Jenis Sanksi	T	A	B	C	N	Jumlah	%
		91	92	93	94	95		
1	Penjara	13	14	11	14	13	65	83,33%
2	Kurungan	-	-	-	-	-	-	-
3	Percobaan	2	2	1	2	2	9	11,54%
4	Anak Negara	-	-	1	1	0	2	2,56%
5	Kembali pada Orang Tua	1	-	1	-	-	2	2,56%

Sumber data PN Bandung dan PN Bale Bandung

Dari data tersebut nampak sekali penggunaan sanksi pembatasan kemerdekaan menjadi sarana utama dalam menanggulangi tindak pidana anak,

terbukti dari 78 perkara yang diadili sebanyak 83, 33 % menerima sanksi pidana penjara. Sedangkan anak yang dapat berkumpul kembali dengan keluarganya baik yang berupa penjatuhan pidana percobaan maupun dikembalikan kepada orang tua hanya 14, 10 %. Banyaknya jenis pidana penjara yang dijatuhkan dimungkinkan karena jaranganya tuntutan jaksa yang mengancam dengan sanksi lain selain tuntutan pidana penjara. Hal tersebut diperkuat oleh pengaruh yang diberikan dari kebijakan legislatif dalam perumusan ancaman pidana penjara yang ada dalam KUHP. Dimana sebanyak 70 % ancaman pidana yang dirumuskan dalam KUHP merumuskan ancaman pidana penjara dengan sistem tunggal. Hal tersebut tidak memberikan kelonggaran sedikitpun kepada hakim untuk memilih pidana apa yang dianggap paling efektif untuk terpidana. Dengan sistem perumusan ancaman pidana yang tunggal itu, hakim mau tidak mau terpaksa menjatuhkan pidana penjara walaupun mungkin menurut hakim akan lebih dapat menunjang tujuan yang ingin dicapai apabila dijatuhkan jenis pidana yang lain. Pidana yang dijatuhkan itu kemungkinan besar bukan atas pertimbangan yang rasional dan berorientasi kepada si pelaku, tetapi hanya karena keterikatan dan hormatnya saja kepada undang-undang. Penjatuhan pidana yang demikian jelas bukan perbuatan mengadili dalam arti yang sebenarnya, tetapi lebih merupakan pekerjaan sablon (*schablon Arbiet*).<sup>153</sup>

Dilihat dari jangka waktu pelaksanaan sanksi yang harus dijalani, terungkap data seperti di bawah ini:

---

<sup>153</sup>. Barda Nawawi Arief, 1994. Op.cit, hal. 165-166.

**Tabel 6:**  
**Masa Pidana Penjara yang dijatuhkan Terhadap**  
**Anak di bawah Umur Selama tahun 1991-1995**

No	Lama Pidana	T 91	A 92	H 93	U 94	N 95	Jumlah	%
1	< 1 bulan	1	1	-	8	-	2	3,08
2	1 - 6 bulan	11	7	8	6	12	46	70,78
3	6-12 bulan	-	5	3	-	1	15	23,08
4	1-5 tahun	1	-	-	-	-	1	1,54
5	> 5 tahun	-	1	-	-	-	1	1,54

Sumber data PN Bandung dan PN Bale Bandung

Sedangkan data yang menunjukkan klasifikasi usia pelaku menunjukkan fakta sebagai berikut:

**Tabel : 7**  
**Kelompok Umur Anak Pelaku Tindak Pidana**  
**di Wilayah Hukum Ibu Kota Propinsi Jawa Barat**  
**Tahun 1991-1995**

No	Kelompok Umur	T 91	A 92	H 93	U 94	N 95	Jumlah
1	< 5 Tahun	-	-	-	-	-	
2	6-10 tahun	-	-	-	-	-	
3	11-16 Tahun	16	16	14	17	15	78

Sumber data PN Bandung dan PN Bale Bandung.



Terlalu mudahnya hakim menjatuhkan pidana penjara, sesungguhnya tidak sejalan dengan falsafah yang mendasari dilaksanakannya peradilan anak yang hendak melindungi anak dari masalah yang sedang dihadapinya. Dengan dipidananya anak tersebut justru akan membawa kepada kehancuran masa depannya. Padahal apabila melihat perkembangan hukum pidana di negara-negara lain sebagai pengaruh dari perkembangan hukum pidana modern, kepercayaan terhadap penggunaan sanksi pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan banyak dipertanyakan keefektivitasannya.

Berdasarkan hasil penelitian R.M. Jackson dalam upaya melihat efektivitas sanksi pidana diungkapkan bahwa angka perbandingan rata-rata untuk pengulangan (*reconviction rate*) yang paling tinggi justru terjadi pada anak-anak yang dijatuhi pidana penjara. Dikemukakan bahwa untuk pelaku pemula (*first offender*), pengulangan untuk anak-anak sekitar 50 %, untuk remaja sekitar 40 % lebih, untuk kelompok usia 21-29 tahun sekitar 30 % dan untuk kelompok di atas 40 tahun sekitar 9-15 %. Dikemukakan pula olehnya, bahwa data pengulangan tersebut menjadi lebih tinggi lagi apabila sebelumnya si pelaku pernah di pidana. Untuk anak-anak yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara, pengulangannya menjadi 100 %.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Jackson, Leslie T. Wilkins mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan *The Home Office Research Unit di Inggris*, bahwa angka perbandingan *recidivisme* (*recidivism rate*) untuk pelaku pertama dalam kelompok usia antara 8-16 tahun sekitar 65 %, antara 17-29 tahun sekitar 55 % dan untuk kelompok 30 tahun ke atas sekitar 28 %.<sup>154</sup>

<sup>154</sup>. Lihat Barda Nawawi Arief, 1994. OP.cit, hal. 189.

Dari kedua fakta tersebut nampak sekali adanya hubungan yang sangat erat antara usia pelaku dengan jenis pidana penjara yang dijatuhkannya, dimana tingkat *reconviction rate* bagi orang yang dijatuhi pidana penjara berbanding terbalik dengan usia pelaku. Semakin rendah usia pelaku yang dijatuhi pidana penjara, semakin besar kemungkinan melakukan kejahatan lagi.

Melihat kenyataan demikian, apabila kita perhatikan kelompok usia pelaku yang dijatuhi pidana penjara sebagaimana digambarkan pada tabel 7 di atas serta menghubungkannya dengan apa yang telah berhasil diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Jackson dan Wilkin, dengan melihat kondisi yang ada di Indonesia hendaknya hakim lebih bertindak arif dan bijaksana untuk mempertimbangkan penerapan jenis sanksi alternatif lain selain pidana penjara. Sebagaimana juga diungkapkan Edwin Sutherland<sup>155</sup> yang mengungkapkan korelasi tingkat kejahatan dengan usia pelaku, dalam kesimpulannya antara lain mengemukakan bahwa:

“Semakin muda seseorang pada waktu pertama kali melakukan kejahatan, semakin besar kemungkinan ia akan berbuat kejahatan lagi dan ia akan terus melakukan kejahatan untuk jangka waktu yang lama.  
Semakin muda orang itu, semakin pendek jaraknya antara kejahatan pertama yang dilakukan dengan kejahatan yang berikutnya.”

Dengan berbagai fakta tersebut wajar apabila semakin besar arus yang menyangsikan keampuhan akan penggunaan sanksi pidana penjara dalam menanggulangi problema sosial yang mendunia,<sup>156</sup> sehingga muncul berbagai kritik

<sup>155</sup> E. Sutherland & Donald R. Cressey, *Principles Of Criminology*, (disadur oleh Momon Martasaputra), Alumni, Bandung, 1969, hal.160.

<sup>156</sup> Habib-Ur-Rahman Khan, pernah mengemukakan bahwa: “Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problema yang akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus”. Lihat Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 17.

yang sangat tajam bahkan pandangan yang sangat radikal menghendaki agar dihapuskannya sanksi pidana penjara. Hulsman, salah seorang tokoh aliran Abolisionis misalnya menghendaki untuk menggantikan sistem peradilan pidana yang dianggap sebagai rentetan keburukan yang tanpa akhir atas suatu keburukan, dengan disalurkan melalui jalan lain daripada penggunaan sistem hukum pidana. Ia mengatakan bahwa tujuan sistem peradilan yang positif berupa rasionalisasi terpidana justru sering berakibat tidak menyenangkan (*unwelfare*) yang berupa penderitaan.<sup>157</sup>

Adanya indikasi unsur yang tidak menyenangkan (*unwelfare*) dalam sistem peradilan pidana, menurut Muladi menggambarkan keunikan dari bentuk suatu sistem peradilan pidana bila dibandingkan dengan sistem-sistem sosial yang lainnya. Perbedaannya terletak pada adanya kesadaran untuk memproduksi sesuatu yang sifatnya *unwelfare* dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya *unwelfare* yang berupa rehabilitasi pelaku tindak pidana. Segala sesuatu yang *unwelfare* tersebut dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-kadang hilangnya nyawa manusia.<sup>158</sup>

Adanya ungkapan-ungkapan yang menyangsikan keefektifan sistem peradilan pidana tersebut didasarkan karena atas ketidak puasannya mengedepankan penerapan sanksi pidana penjara dalam menanggulangi problema kejahatan. Di Indonesia sendiri walaupun tidak seradikal aliran yang menghendaki dihapuskannya pidana penjara, menentang penggunaan pidana penjara yang tidak

<sup>157</sup>. L.H.C. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*. Penerjemah Wonosutanto, Sebelas Maret University Press, 1995, hal.107.

<sup>158</sup>. Muladi, 1995, Op.cit, hal. 21.

selektif dan limitatif. Roeslan Saleh salah seorang tokoh yang tidak setuju dihapuskannya penggunaan pidana penjara pernah mengungkapkan bahwa:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batasan-batasan kebebasan pribadi masing-masing;
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.<sup>159</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya ia setuju digunakannya sanksi pidana penjara, namun demikian harus dipertimbangkan tujuan penerapannya sehingga pidana yang dijatuhkan bukan hanya ditujukan kepada sipelaku, melainkan ditujukan pula untuk mempengaruhi warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu penerapan pidana penjara terhadap anak di bawah umur selayaknya ekstra hati-hati, sehingga penjatuhan pidana penjara tidak hanya didasarkan atas sifat dari perbuatan yang telah dilakukannya melainkan harus dipertimbangkan pula aspek kematangan jiwa anak. Apalagi kalau dilihat dari tenggang waktu yang dijalani (lihat tabel 6), pada umumnya mereka menempuh pidana penjara pendek. Hal tersebut sesungguhnya tidak akan mencapai sasaran apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang hendak membina si pelaku. Yang terjadi justru sebaliknya aspek victimisasi dan stigmatisasi sangat besar

<sup>159</sup> . Roeslan Saleh, *Mencari Asas-Asas Umum Yang sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan bahan Upgrading Hukum Pidana, 1971, hal. 15-16. Dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal 21.

mempengaruhi anak. Akhirnya jangankan anak yang tidak bersalah yang bersalah sekalipun tidak sewajarnya mendapat penderitaan yang berkepanjangan.

Adanya kritik yang mengatakan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara; terutama apabila pidana penjara dikenakan kepada anak-anak atau para remaja rasanya perlu direnungkan oleh kita semua. Bahkan kritik terhadap pidana penjara pernah pula dilontarkan oleh *The American Correctional Association* pada tahun 1959, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan berdasarkan pandangan yang bersifat pembedaan semata-mata, akan *lebih banyak menghasilkan penjahat* dari pada mencegahnya.<sup>160</sup> Atas dasar hal tersebut menjadi kewajiban para pembuat kebijakan untuk memikirkan kembali penggunaan pidana alternatif untuk menggantikan sanksi pidana terutama pidana pembatasan kemerdekaan, sehingga dalam penerapannya betul-betul memberikan pengayoman serta perlindungan bagi masyarakat sebagai bangsa yang berpegang teguh kepada jiwa dan falsafah Pancasila.

## 2. Aparat yang terlibat dalam Persidangan

Salah satu ciri karakteristik yang dapat membedakan persidangan anak dengan orang dewasa adalah dilibatkannya peran serta orang tua/wali/orang tua asuh serta Bimbingan Sosial Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) di samping Hakim dan Jaksa. Sedangkan keterlibatan penasihat hukum sampai saat ini masih dirasakan belum mempunyai peran yang cukup berarti.

Hakim sebagai pihak yang paling dominan selama berlangsungnya persidangan sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam proses persidangan anak. Oleh karena itu sudah seharusnya

<sup>160</sup> . Lihat Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 49.

apabila hakim anak mempunyai wawasan dan kemampuan yang lebih luas bila dibandingkan dengan hakim-hakim lainnya.

Hakim anak di samping harus mempertimbangkan segi yuridis dari perkara yang sedang ditangani, namun hal yang sangat esensial adalah aspek non yuridis yang melekat pada individu anak yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dengan didasari oleh faktor tersebut, maka hakikat yang melandasi yang ada di belakang kepala hakim dalam menghadapi klien anak bukan hendak mengadilinya melainkan membantu memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh anak. Oleh karena itu hakim memerlukan bantuan pihak-pihak lain yang mampu menunjang putusan yang hendak diambil.

Hal lain yang dirasakan sangat esensial adalah masalah sumber daya para hakim sendiri yang harus betul-betul dipersiapkan sedini mungkin. Kondisi demikian diakui oleh para hakim bahwa selama ini yang menangani perkara anak memang tidak ada hakim khusus yang dipersiapkan, sehingga yang ditunjuk untuk menangani perkara anak adalah hakim-hakim yang telah ada yang memang dilihat dari latar belakang pendidikannya tidak mempunyai pendidikan formal tentang anak. Menurut Bapak Didi Gunadi,<sup>161</sup> yang dijadikan ukuran/kriteria untuk menjadi hakim anak di PN I Bandung antara lain dilihat dari senioritas hakim. Barangkali karena hakim senior dianggap berpengalaman serta dianggap mempunyai wawasan yang lebih luas bila dibandingkan dengan hakim yunior yang lain. Baginya kenyataan seperti itu tidak menjadi masalah karena memang tidak ada

<sup>161</sup>. Didi Gunadi adalah salah seorang Hakim senior di lingkungan PN I Bandung. Setelah berpengalaman lebih dari 20 tahun menjadi hakim di berbagai wilayah Indonesia, hampir lima tahun terakhir dia kembali ke pulau Jawa dan ditempatkan di PN I Bandung. Ia adalah salah seorang hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak disamping Ny. Rosmala Sitorus.

peraturan khusus yang menentukan kriteria hakim anak, dan itu kebijakan pimpinan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dia juga berpendapat, sebaiknya memang harus ada pendidikan khusus untuk menjadi hakim anak, paling tidak ada pelatihan-pelatihan khusus sebagaimana kita dipersiapkan untuk menangani perkara-perkara tindak pidana khusus lainnya. Namun demikian ia mengharapkan agar dalam mempersiapkan hakim anak masa yang akan datang sebaiknya dipersiapkan saat rekrutmen calon hakim. Pernyataan yang sama dilontarkan pula oleh Bapak **Pupung Rusnariman**, yang juga salah seorang hakim senior di PN Bale Bandung yang ditunjuk Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak. Ia menambahkan bahwa sebetulnya apabila kita mau konsisten dengan berbagai peraturan yang ada sudah cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, namun kembali kepada sumber daya yang tersedia. Karena berbagai persepsi dan kemampuan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan menimbulkan perbedaan dalam penanganan perkara anak khususnya anak pelaku tindak pidana. Adanya perbedaan persepsi tersebut bukan hanya dihadapi pada instansi-instansi lain yang berada pada suatu sistem peradilan, namun terjadi pula di kalangan para hakim sendiri. Namun demikian walaupun ia sendiri belum mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada dalam RUUPA, iapun sangat setuju agar RUUPA segera diundangkan agar ada keseragaman pemahaman.

Sedangkan menanggapi diskresi yang diberikan pada tingkat sebelum persidangan, baik hakim yang ada di PN I Bandung maupun Hakim PN Bale Bandung mereka tidak setuju jika hal tersebut dilegalisikan. Yang menjadi alasan mengapa perkara pidana anak "harus" diajukan ke sidang pengadilan karena

menghendaki adanya kepastian hukum di samping untuk mendidik masyarakat akan kesadaran hukum. Mereka merasa khawatir akan eksekusi yang timbul karena walau bagaimanapun pengadilan merupakan benteng keadilan yang harus menyelesaikan persoalan yang meresahkan masyarakat. Barangkali tidak menimbulkan masalah apabila diterapkan terhadap perkara-perkara yang sangat ringan.

Asumsi penulis terhadap kurangnya para hakim maupun aparat penegak hukum dalam mencermati peraturan perundang-undangan tidak lain karena mereka merasa bahwa menangani setiap perkara dianggap sebagai suatu pekerjaan yang biasa dihadapi dalam keseharian, sehingga apapun perkara yang dihadapi dianggap sebagai suatu rutinitas. Apalagi dihadapkan kepada semakin bertumpuknya perkara yang harus diselesaikan mendorong mereka untuk menyelesaikan beban pekerjaan secepat-cepatnya. Dengan demikian kecermatan dan ketelitian dalam mengkaji setiap perkara menjadi hal yang terabaikan.

Sedangkan adanya kekhawatiran terhadap diskresi yang diberikan oleh aparat menunjukkan adanya kurang percaya akan dedikasi serta kredibilitas aparat penegak hukum. Kenyataan demikian menambah keyakinan masyarakat akan kurang percayaannya terhadap para penegak hukum yang seringkali menjadi isu negatif. Bagaimanapun kita mengakui betapa besarnya tantangan yang dihadapi oleh para penegak hukum dari pihak-pihak yang akan meruntuhkan moral para pelindung keadilan. Kita masih ingat pernyataan mantan Hakim Agung Kusumah Atmadja tentang 50 % hakim yang nakal, juga tentang bagaimana ia di goda oleh uang satu ransel<sup>162</sup> sedikit banyak telah mengkonfirmasi hal itu.

---

<sup>162</sup>. Kompas, 4 Desember 1994.



Selain itu adanya pernyataan Hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto yang mengungkapkan tentang praktek-praktek yang tidak terpuji dalam badan pengadilan tertinggi. Fakta tersebut menunjukkan bagaimana tantangan dan kondisi yang terjadi di tingkat benteng keadilan yang tertinggi, bagaimana pada tingkat-tingkat yang ada di bawahnya ?

Jaksa sebagai pihak yang hendak membuktikan perbuatan yang telah dituduhkan, pada kenyataannya tidak lepas dari dasar pemikiran yuridis, dimana perbuatan yang dianggap telah dilakukan oleh tersangka selalu “dicari” dasar pembenar dengan berpijak kepada sejumlah aturan-aturan hukum (pidana) yang dapat menjerat tertuduh. Bahkan telah merasa puas apabila dari serentetan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat menjerat sipelaku. Kenyataan tersebut nampak dari sejumlah berkas perkara yang sempat ditemukan dan diteliti penulis, dimana tidak satupun tuntutan jaksa yang menunjukkan indikasi ke arah pertimbangan individu sehingga dapat membebaskan atau usaha untuk mengembalikan anak kepada lingkungan orang tuanya. Semua perbuatan yang telah dilakukan terdakwa lebih dikongkritkan ke arah yang sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal yang telah tersedia.

Keterlibatan BISPA sebagai unsur pendukung sistem (subsistem) dalam konteks sidang anak mempunyai peranan yang lebih besar bila dibandingkan dengan sidang orang dewasa. Pentingnya peranan BISPA dalam sidang anak, diakui pula oleh para hakim yang menangani sidang anak. Mereka berpendapat bahwa BISPA mempunyai andil yang sangat besar karena hanya BISPA yang paling tahu kondisi sosial si pelaku. Walaupun hakim mempunyai sifat kemandirian namun

dalam rangka mempertimbangkan suatu putusan, hasil laporan kemasyarakatan telah memberikan gambaran bagi hakim.

Menurut Sutedjo,<sup>163</sup> walaupun belum ada Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 30 Nopember 1991 yang mewajibkan hakim untuk meminta pembuatan laporan kemasyarakatan, namun hakim biasanya tidak menyidangkan terlebih dahulu sebelum menerima hasil laporan kemasyarakatan yang dibuat oleh BISPA. Sepanjang yang ia ketahui hampir setiap perkara tindak pidana anak baik dari kepolisian atau kejaksaan atau hakim pengadilan selalu minta dibuatkan laporan kemasyarakatan tentang anak yang sedang ditanganinya. Sutedjo juga menambahkan bahwa keterlibatannya dalam menangani perkara anak bukan hanya sebatas untuk melakukan penelitian terhadap keadaan sosial ekonomi si pelaku, melainkan dilibatkan juga dalam pelaksanaan persidangan. Bahkan tidak jarang pula beradu argumentasi dengan hakim seputar persoalan rekomendasi terhadap si pelaku. Pada umumnya dengan berdasarkan kondisi orang tua baik dilihat dari faktor sosial maupun ekonomi, BISPA menyarankan agar anak di serahkan kepada negara untuk dididik. Namun tidak jarang hakim dengan alasan sarana dan sumber daya pelaksana pendidik/pembina ia memutuskan sesuai dengan keyakinannya. Tetapi apabila menurut hasil penelitian faktor keluarga bukan sebagai penyebab terhadap perbuatan si pelaku, mereka lebih condong untuk dikembalikan kepada orang tuanya, dengan alasan di samping si anak lebih baik berada pada lingkungan orang tua mereka juga dapat memberikan pengertian baik kepada si anak maupun kepada pihak orang tuanya. Kendala yang sering dihadapi terutama adanya

---

<sup>163</sup>. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus dan 4 September 1996 dengan Sutedjo, Bc.Ip. yang merupakan salah seorang Pembimbing Kemasyarakatan Departemen Kehakiman BISPA Kelas I Bandung

kekurang pengertian pihak orang tua yang merasa terlalu ikut campur tangan terhadap persoalan keluarga.

Sedangkan keterlibatan orang tua dalam persidangan perkara pidana anak, tidak lain karena adanya keinginan hakim untuk mengkonfirmasi (*checkcross*) terhadap laporan hasil penelitian yang dibuat BISPA, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan seimbang. Lebih lanjut hakim dapat memberikan pengarahan-pengarahan atau pengertian terhadap orang tua tentang maksud putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri si anak.

### 3. Sarana dan Prasarana Sebagai Penunjang Persidangan Perkara Pidana Anak

Salah satu unsur penunjang yang juga tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan proses persidangan perkara pidana anak adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam uraian sebelumnya telah disinggung masalah perundang-undangan sebagai salah satu saran yang dapat menunjang dalam penegakan hukum pidana (anak). Pentingnya persoalan hukum (termasuk di dalamnya pembentukan undang-undang), apabila kita kaitkan dengan masalah pembangunan hukum nasional, hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Apabila kita reduksikan pada satu hal saja tujuan pokok dari pada hukum adalah ketertiban (*order*). Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan hidup antar manusia dalam masyarakat. Namun di samping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan jamannya<sup>164</sup>.

<sup>164</sup>. Mohtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum UNPAD, Binacipta, Bandung,, 1975, hal.3.

Dalam masyarakat yang sedang membangun dimana terjadinya suatu perubahan cepat dan direncanakan, peranan hukum tidak cukup hanya memiliki fungsi yang demikian tetapi harus mampu membantu proses perubahan masyarakat. Apabila kita melihat fungsi hukum di negara Amerika, maka yang dijadikan konsep oleh Rescoe Pound hukum sebagai *Law as a tool of social engineering*. Dengan demikian peran hukum pada masyarakat Indonesia yang sedang membangun adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Hal tersebut dapat dibantu dengan perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Dalam hal peraturan perundang-undangan, karena tujuan hukum sebagai alat pembaharu masyarakat, maka faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh badan legislatif bahwa setiap undang-undang yang dibuat di samping harus mampu menampung aspek sosio-kultural masyarakat juga harus melihat aspek *sense for priorities*. Dengan kata lain bahwa khusus dalam hal proses pembuatan undang-undang tentang Peradilan Anak, diharapkan dapat menampung kepentingan rakyat yang benar-benar mencerminkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara.

Dari aspek prasarana/fasilitas, sekilas telah disinggung pula bagaimana kondisi pengadilan serta lembaga penahanan yang tersedia. Ruang sidang maupun ruang tahanan sementara bagi anak di bawah umur baik di PN I Bandung maupun PN Bale Bandung belum tersedia secara khusus. Dalam hal ruang tempat menunggu saat persidangan walaupun diupayakan tidak disatukan dengan pelaku orang dewasa, namun karena hanya terdapat dua ruangan yang tersedia kadang kala pada saat jadwal persidangan padat tidak tertutup kemungkinan

menyatukannya tersangka anak dengan orang dewasa. Kondisi yang demikian tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan degradasi terhadap jiwa anak. Tepat sekali apa yang diutarakan Muladi<sup>165</sup> bahwa:

“Orang sering beranggapan bahwa, proses stigmatisasi terjadi setelah orang memasuki pintu gerbang lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Pelbagai observasi membuktikan bahwa stigmatisasi sudah terjadi sejak hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum. Seandainya terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka sebagian orang akan tetap mempunyai praduga bersalah, dengan menganggap bahwa hanya karena kurangnya alat-alat bukti saja yang bersangkutan lolos dari sistem peradilan pidana.”

Lebih luas lagi dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa dilihat dari sudut kriminologi dan victimologi proses stigmatisasi dan viktimisasi sudah berjalan bukan hanya pada saat persidangan melainkan sejak tahap penangkapan dan penahanan.<sup>166</sup> Atas dasar hal tersebut, apabila benar-benar ingin memberikan perlindungan terhadap anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, upaya penyediaan fasilitas ruangan khusus bagi anak harus benar-benar dipikirkan sedini mungkin.

Keadaan yang dapat memperburuk kondisi anak adalah tidak tepatnya jadwal persidangan yang telah ditentukan, sehingga si anak dalam waktu yang relatif lama harus menunggu dalam suatu ruangan yang tidak bisa lepas dari tontonan masyarakat.

Tidak tepatnya jadwal sidang yang telah ditentukan, menurut anggapan para hakim karena faktor lokasi yang menghubungkan gedung pengadilan dengan tempat dimana si anak tinggal sementara (lokasi rutan). Dengan terbatasnya

<sup>165</sup>. Muladi, 1995. Op.cit, hal 27.

<sup>166</sup>. Romli Atmasasmita, 1996. Loc.cit.

kendaraan yang tersedia ditambah padatnya arus lalu lintas telah mempengaruhi jadwal sidang yang telah dipersiapkan.

Begitu juga dalam hal penataan ruang sidang, sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 230 ayat (3) KUHAP dipergunakan sebagaimana lajimnya persidangan orang dewasa. Pada kondisi yang demikian anak sebagai tertuduh berada pada posisi sentral dari pihak-pihak yang akan mengadilinya. Walaupun suasana diciptakan “seolah-olah” bukan untuk mengadili anak sebagai pelaku (karena sidang tertutup serta aparat tidak memakai toga/uniform), namun walau bagaimanapun kondisi demikian telah membawa pengaruh terhadap aspek psikologis yang sangat besar bagi anak. Didampinginya anak oleh orang tua dan atau pengacara tidak akan membawa perubahan image anak akan “keangkeran” suasana persidangan karena status orang tua tetap berada pada posisi yang lemah dihadapan para aparat.

#### **4. Aspek Kemasyarakatan**

Aspek lain yang mempengaruhi masalah peradilan anak adalah aspek masyarakat itu sendiri. Aspek ini menyangkut pula masalah kultur/ budaya masyarakat yang menyangkut kesadaran hukum masyarakat, yang dalam bentuk kongkrit menyangkut perilaku. Dalam hubungannya dengan masalah penegakan hukum secara global perilaku tersebut dapat dilihat dari segi aparat penegak hukum maupun masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat penduduknya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang dilatar belakangi perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi maupun status sosial. Kenyataan seperti itu sedikit banyak

telah mempengaruhi pola pikir masyarakat yang secara kultural masih memegang teguh tradisi nenek moyang.

Sebagai masyarakat yang berada pada taraf perubahan dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industri, telah mewarnai persepsi terhadap realitas sosial yang berupa gangguan kamtibmas. Di satu pihak masih adanya toleransi yang kuat sebagai pengejawantahan sifat rasa kebersamaan, dilain pihak kecenderungan sifat individualisme telah berkembang pula pada sebagian masyarakat. Adanya gangguan terhadap kamtibmas yang dilakukan oleh anak di bawah umur oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar sehingga cukup untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Namun demikian sebagian masyarakat menganggap terjadinya gangguan kamtibmas merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengganggu ketentraman pribadi yang perlu diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pada umumnya terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena kurangnya perhatian orang tua menanamkan disiplin untuk mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat, dalam skala yang lebih luas lingkungan sosial-ekonomi-politik menyuguhkan pula kondisi yang kurang baik sehingga tercapainya tingkat kemakmuran sebagai hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara tidak merata. Indikasi yang dapat menunjukkan kenyataan seperti itu dapat dilihat dari perkara yang diselesaikan di pengadilan yang mayoritas terdiri dari tindak pidana yang menyangkut harta benda/pencurian (lihat tabel 2).

Kondisi yang demikian akhirnya mendorong kepada toleransi masyarakat terhadap terjadinya gangguan-gangguan sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan gangguan-gangguan tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat tersebut mungkin juga disebabkan karena antipati terhadap perilaku petugas sendiri. Perilaku antipati tersebut, pada dasarnya disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:<sup>167</sup>

1. Pengalaman buruk yang pernah dialami dalam proses interaksi dengan petugas penegak hukum,
2. Pengalaman buruk dalam masalah pencegahan gangguan,
3. Pengalaman buruk dalam masalah penindakan terhadap gangguan yang pernah terjadi.

Di samping itu, rendahnya ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku merupakan faktor yang dapat menunjang efektivitas penegakan hukum. Rendahnya ketaatan terhadap norma kemungkinan juga sebagai akibat dari menurunnya penghargaan terhadap norma-norma oleh karena warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami norma-norma tersebut. Dengan demikian mereka sama sekali tidak mengetahui akan manfaat mematuhi kaidah-kaidah sosial.

Apabila dilihat dari kenyataan yang ada, pada umumnya para orang tua yang anaknya terlibat dalam suatu tindak pidana merasa tidak yakin akan perbuatan yang telah dilakukan anaknya. Mereka merasa memiliki anak yang patuh dan tidak menunjukkan gejala yang kurang baik. Padahal menurut pengamatan pekerja sosial (BISPA), hampir sebagian besar anak yang terlibat

<sup>167</sup>. Sorjono Soekanto, *Efektivitkasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hal. 32.



suatu tindak pidana menunjukkan keadaan orang tua yang acuh tak acuh terhadap keadaan anaknya. Kenyataan seperti itu disebabkan karena kondisi sosial ekonomi keluarga yang sangat buruk.

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa ternyata keadaan keluarga mempunyai peran yang sangat dominan dalam mengarahkan dan mendidik anak. Namun demikian dalam kondisi keluarga yang serba kekurangan, perhatian orang tua lebih diarahkan kepada pemenuhan akan kebutuhan hidup yang sangat primer.

### **C. Model Sidang Anak Yang Ideal Sebagai Suatu Konsep Dasar**

#### **1. Pendekatan Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana**

Manusia adalah mahluk sosial, dia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan hidup dalam lingkungan sosialnya (masyarakat) manusia akan mempunyai arti sebagai manusia yang sesungguhnya. Namun demikian, dalam lingkungan masyarakat pulalah pertentangan yang menyangkut berbagai kepentingan dan kebutuhan manusia yang satu dengan manusia yang lain muncul. Dalam kondisi yang demikian manusia mendambakan akan adanya kehidupan yang aman, tentram dan terlindungi, sehingga menganggap penting akan adanya norma-norma dalam masyarakat. Norma atau kaidah itu pula yang merupakan pengendalian sosial, yang dalam arti luas diartikan sebagai segala proses, baik mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.<sup>168</sup>

Norma itu sendiri di dalamnya terdiri dari berbagai sub-sub norma, sehingga kita mengenal apa yang disebut norma kebiasaan, norma hukum, norma

<sup>168</sup>. Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi Baru ketiga, Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 184.

kesusilaan, dan lain-lain. Dalam kaitan dengan persoalan yang sedang di kaji titik berat lebih di fokuskan kepada persoalan norma hukum, dan ciri yang menonjol dari norma hukum yang “murni” adalah yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan atau pembuatan hukum itu.<sup>169</sup> Dalam artian inilah pandangan hukum diidentikan dengan undang-undang yang memang dilihat secara sempit bukan suatu pernyataan yang salah. Sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo,<sup>170</sup> bahwa undang-undang itu sendiri adalah hukum karena berisi kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Dan hukum di abad keduapuluh pada dasarnya adalah hukum yang dituliskan. Hukum dalam wujud bahasa tertulis ini tidak lain adalah perundang-undangan.<sup>171</sup>

KUHP sebagai salah satu sumber hukum pidana tertulis di Indonesia<sup>172</sup> merupakan undang-undang hukum pidana warisan kolonial yang dikodifikasikan sejak tahun 1918, dan menjadi hukum positif di Negara Republik Indonesia sejak tahun 1946 (UU No.1 tahun 1946 jo UU No. 73 tahun 1958).

Sebagai undang-undang yang “dipaksakan”<sup>173</sup> berlaku bagi bangsa Indonesia sudah sewajarnya apabila dalam pelaksanaannya terkadang bahkan

<sup>169</sup> Sarjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Citra Aditya, Bandung, 1991, hal. 15.

<sup>170</sup> Sudikno Mertokusumu, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal. 67.

<sup>171</sup> Sarjipto Rahardjo, 1991. Op.cit, hal.87.

<sup>172</sup> Menurut Loebby Loqman, Sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia sekarang ini adalah:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-undang yang merubah/menambah KUHP;
- c. Undang-undang Hukum Pidana Khusus;

d. Anuran-Aturan Pidana Yang terdapat dalam undang-undang yang bukan undang-undang hukum pidana. Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993, hal. 91-92.

<sup>173</sup> Tujuan umum darai kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan perundang-undangan sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti. Namun demikian, sangatlah berlebihan apabila punya anggapan bahwa kodifikasi dapat mengatasi semua persoalan hukum. Kodifikasi sesungguhnya membuka jalan bagi terjadinya kesulitan-kesulitan di belakang hari karena berbagai problema akan timbul sesuai dengan perkembangan masa. Sarjipto Rahardjo, 1991. Op.cit, hal. 92-93.

sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut di samping adanya perbedaan latar belakang ideologi yang dianut, juga karena sudah menjadi karakteristik dari suatu perundang-undangan. Bahwa setiap dibentuk suatu undang-undang problema baru selalu akan timbul, maka bagaimanapun sempurnanya pembuat undang-undang mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, ia tidak dapat menolak timbulnya problema baru di kemudian hari. Apabila yang demikian itu timbul, maka yang sudah sempurnapun akan menjadi kurang.

Menyadari akan hal tersebut, sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 1 tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 hingga saat ini pemerintah telah melakukan suatu pembaharuan<sup>174</sup> di bidang hukum pidana, walaupun usaha pembaharuan tersebut bukan pembaharuan dalam arti yang menyeluruh/ pembaharuan secara total (*Law reform*),<sup>175</sup> melainkan dapat dikatakan sebagai pembaharuan yang tambal sulam.

Khusus dalam bidang hukum pidana anak, usaha pembaharuan ditempuh dengan cara membuat suatu peraturan perundang-undangan dimana pada tahun 1967 BPHN telah membuat Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak (RUUPA). Kemudian pada tahun 1979 diprakarsai oleh Departemen Kehakiman menyusun kembali RUUPA tersebut. Rancangan tersebut saat ini telah

<sup>174</sup>. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Barda Nawawi Arief, 1996. Op.cit, hal. 32.

<sup>175</sup>. Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 60.

disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan Amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomor 12/PU/XII/1995 disusul dengan Keterangan Pemerintah pada tanggal 1 Maret 1996, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tanggal 8 Maret 1996 dan Jawaban Pemerintah tanggal 18 Maret 1996.<sup>176</sup>

Dengan melihat kenyataan tersebut, ternyata pembentukan RUUPA telah menempuh perjalanan waktu yang sangat panjang bahkan pemunculannya kembali telah memancing perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Hal tersebut tidak mengherankan karena RUUPA disamping mengatur ketentuan hukum materiil dan hukum formil, diatur pula tentang bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Sesuai dengan maksud dan tujuan penulis, adresat/sasaran kajian terfokus kepada bidang hukum pidana semata. Hal tersebut sejalan dengan hakikat yang mendasari dari hukum pidana itu sendiri, dimana pengaturan hukum pidana bukan hanya ditujukan kepada segenap warga masyarakat, melainkan ditujukan pula kepada aparat penegak hukum. Dengan kata lain bahwa dilihat dari kebijakan hukum pidana, adressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti "kewenangan/kekuasaan") penguasa/aparat penegak hukum.<sup>177</sup> Di samping itu, karena akibat yang ditimbulkan dari hukum pidana mempunyai dampak yang sangat kompleks, bukan hanya menyentuh terhadap diri pelaku, aparat penegak hukum dan korban

<sup>176</sup>. Bagir Manan, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak*, (Makalah Pada Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996, hal. 1.

<sup>177</sup>. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, 25 Juni 1994, hal 5.

(yang sering kali terabaikan), melainkan menyentuh pula keluarga serta masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan Roeslan Saleh bahwa:

“Bilamana peradilan pidana tidak sampai mencapai tujuannya, dapat ditimbulkan kerugian-kerugian pada masyarakat, pada delinkuen, dan juga pada keluarganya, semuanya ini lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan penderitaan yang dapat ditimbulkan oleh peradilan perdata yang tidak memuaskan.”<sup>178</sup>

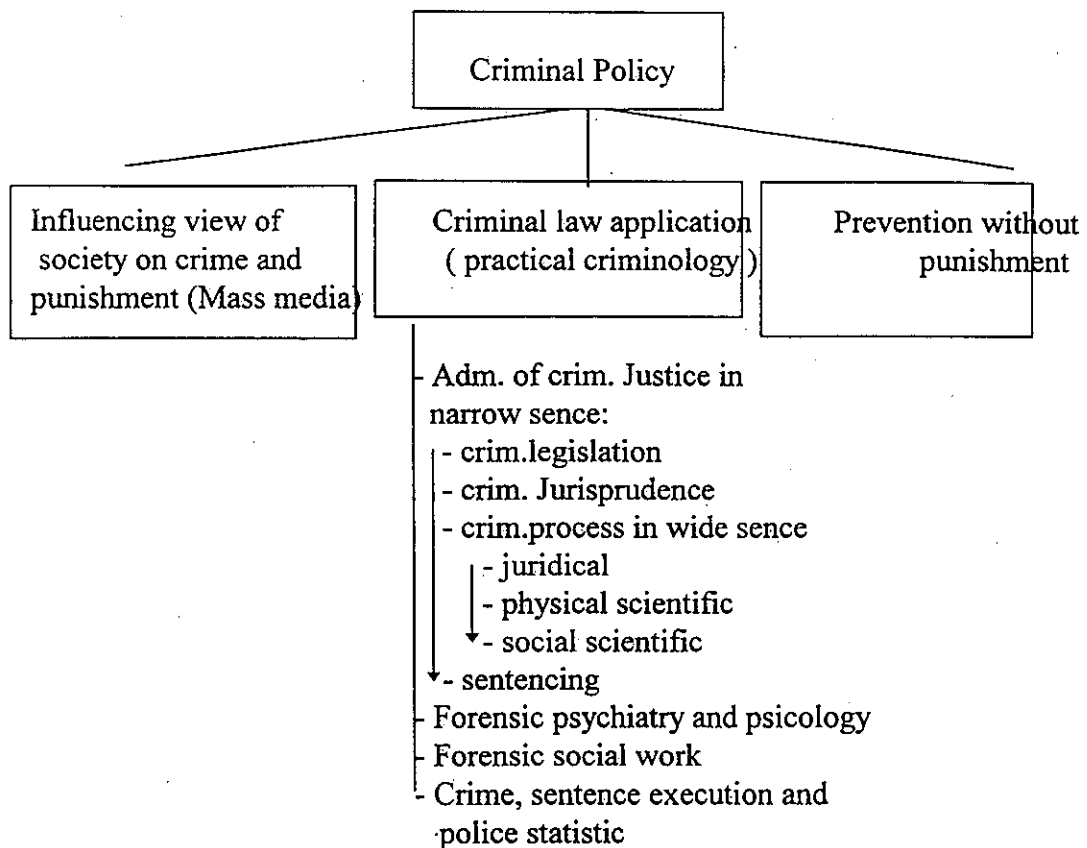
Atas dasar kenyataan tersebut, maka dalam upaya pembaharuan yang ditempuh melalui politik kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Artinya bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya hukum pidana dalam kenyataan.

Kenyataan-kenyataan tersebut akan semakin kompleks bila dihadapkan kepada masalah peradilan pidana anak, karena tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum pidana anak sesungguhnya tidak dapat diatasi hanya dengan mengedepankan sarana penal, melainkan harus ditempuh pula dengan penggunaan sarana non-penal.<sup>179</sup> Dengan demikian penanggulangan kejahatan (politik kriminal) meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on*

<sup>178</sup> Roeslan Saleh, Op.cit, hal. 27.

<sup>179</sup> Lihat kembali uraian pada hal.131-137.

*crime and punishment*). Lebih jauh digambarkan oleh Hoefnagels dalam bentuk skema sebagai berikut<sup>180</sup>:



Dari gambaran tersebut nampak jelas bahwa dalam penanggulangan kejahatan ditempuh melalui jalur penal yaitu dengan penerapan hukum pidana, dan jalur non-penal yaitu pencegahan tanpa pidana serta mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media. Kedua jalur tersebut merupakan garapan yang harus ditempuh dalam penanggulangan tindak pidana anak sehingga menjadi suatu kebijakan yang integral.

<sup>180</sup>. G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology. An Invention of the Concept of Crime*; Revised edition of Begin Selen van Criminologie. Kluwer-Deventer, Holland, 1969, p. 56.

Alasan pentingnya upaya non-penal dalam strategi penanggulangan kejahatan. diungkapkan pula dalam hasil rumusan Seminar yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNDIP yang antara lain mengatakan:

Bahwa Hukum Pidana memiliki keterbatasan dalam kemampuannya menanggulangi kejahatan karena:

1. Hukum pidana hanya merupakan (sub sistem) dari sarana kontrol sosial, sehingga tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dsb).
2. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "kurier am symptom", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simtomatik" dan bukan "pengobatan kausatif".
3. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.

Bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan seyogyanya ditempuh secara integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun dengan sarana non penal, baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum ("*treatment of offenders*") maupun dengan "pembinaan/penyembuhan masyarakat" ("*tratment of society*").<sup>181</sup>

Alasan lain dikemukakan pula dalam pertimbangan hasil Kongres PBB keenam tahun 1980 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, bahwa:

"*The main cause of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population* ( penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk).<sup>182</sup>

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

<sup>181</sup>. Hasil Rumusan Seminar Nasional "*Pendekatan Nonpenal Dalam Penanggulangan Kejahatan*", Semarang 2 September 1996.

<sup>182</sup>. Six United Nations Congress on *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, 1980, Report, United Nation, New York, 1981, p. 5.

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>183</sup>

Sebagai alasan yuridis, tahap pembentukan undang-undang merupakan suatu hal yang sangat dominan dalam menentukan suatu kebijakan. Aspek tersebut apabila dipandang dari satu kesatuan proses merupakan tahap yang paling strategis. Dari tahap inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya<sup>184</sup>. Dengan demikian peranan Undang-Undang Peradilan Anak yang dapat memadukan sarana penal dan non-penal dirasakan sangat penting, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan alas hukum terhadap kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan, dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Perundang-undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan

<sup>183</sup>. Muladi, 1995, Op.cit. hal. 13-14.

<sup>184</sup>. Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 173.



tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana<sup>185</sup>.

Kebutuhan akan adanya bentuk perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hukum akan hak-hak anak dalam proses persidangan perkara pidana, sudah selayaknya mendapat prioritas utama dari pihak-pihak yang memegang peranan dalam menentukan suatu kebijakan. Suatu hal yang patut diperhatikan dalam masalah kebijakan terhadap anak pelaku tindak pidana adalah dengan tidak lupa memperhatikan berbagai faktor yang secara khusus mempunyai falsafah yang berbeda bila dibandingkan dengan kebijakan bagi orang dewasa. Hal tersebut karena pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>186</sup>

Sejalan dengan maksud tersebut Sudarto, mengatakan bahwa:

“Pembentukan undang-undang melalui proses yang tidak singkat dan memerlukan pemikiran yang luas dan dalam. Isi dari suatu undang-undang mempunyai pengaruh yang luas terhadap masyarakat. Yang penting bukan hanya sudah terbentuknya undang-undang, melainkan apakah sesudah terbentuknya undang-undang itu tujuan yang dicita-citakan masyarakat itu bisa tercapai<sup>187</sup>.”

<sup>185</sup>. Muladi, 1995. Op.cit, hal. 22-23.

<sup>186</sup>. Barda Nawawi Arief, 1995-1996, Op.cit. hal. 25.

<sup>187</sup>. Sudarto, 1983. Op.cit, hal. 21.

Atas dasar hal tersebut dalam upaya pembentukan undang-undang tentang Peradilan Anak sebaiknya memperhatikan pula instrumen-instrumen internasional baik yang berupa pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treaties*. Keberadaan instrumen-instrumen internasional tersebut di samping dapat dijadikan sebagai bahan *comparative* juga dapat dijadikan sebagai suatu kajian terhadap pengalaman bangsa-bangsa lain dalam menangani suatu tindak pidana anak. Berkenaan dengan maksud tersebut Santayana<sup>188</sup> pernah mengatakan bahwa: "*A man's feet must be planted in his country, but his eyes should survey the world*". Dari pernyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya mempelajari hukum-hukum asing sebagai bahan perbandingan dalam rangka mengembangkan hukum pidana (anak) nasional. Pentingnya melakukan suatu perbandingan disamping dapat menghilangkan sikap parochial atau propincial dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dari perkembangan hukum pidana di negeri sendiri, juga mulai memalingkan perhatian kepada dan bersikap kritis terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku di negara-negara asing. Sikap yang demikian itu dirasakan sangat penting terutama dalam pembinaan hubungan antar bangsa. Menurut Marc Ancel: "*Comparative Law is no longer but a fascination for dilettantes; it has become a necessary of life in complex inter-dependent world*".<sup>189</sup> Namun demikian, dalam melakukan suatu perbandingan tidak berarti harus mengambil alih hukum asing ke dalam hukum nasional dengan label "nasional" melainkan perlu dilakukan secara selektif dengan tetap berpedoman kepada kebutuhan hukum yang secara nyata

<sup>188</sup> Barda Nawawi Arief, 1994. Op.cit, hal. 68.

<sup>189</sup> Lihat Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hal.11.

berkembang pada masyarakat kita. Bagi seorang legislator yang bergerak dalam legislative drafting, perbandingan hukum akan merupakan suatu metode yang sangat bermanfaat untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan universal dan hal ini akan sangat berpengaruh pada kualitas produk legislatif yang dihasilkan. Perundang-undangan yang ketinggalan jaman akan mempengaruhi citra suatu bangsa dalam hubungan antar bangsa, sebab hukum pada dasarnya adalah tidak sekedar merupakan perangkat peraturan, tetapi sekaligus juga merupakan instrumen keadilan yang sarat dengan sistem nilai. Dengan demikian, masalah yang perlu dipertimbangkan dalam rangka membentuk undang-undang tentang Peradilan Anak, mencakup didalamnya aspek sosiologis dan aspek adaptif. Aspek sosiologis baik hal-hal yang bersifat ideologis yang bersumber pada falsafah bangsa Pancasila, alam dan tradisi Indonesia, sepanjang tetap dalam kerangka bagian budaya bangsa. Sedangkan aspek adaptif, penyesuaian terhadap perkembangan internasional yang pada hakikatnya mencakup perkembangan dalam pelbagai aspek ilmu pengetahuan modern tentang kejahatan, baik dalam bidang kebijakan pidana, kriminologi maupun dalam bidang hukum pidana.<sup>190</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya melakukan penanggulangan kejahatan, tidak cukup hanya ditempuh melalui jalur penal semata, melainkan adanya keterpaduan (integritas) dengan jalur non-penal. Sedangkan dilihat dari aspek kebijakan tidak hanya sekedar memformulasikan suatu undang-undang, namun lebih jauh dari itu perlu dikaji pula sampai sejauhmana undang-undang tersebut sesuai dengan apa yang dicita-citakan segenap lapisan masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD'45.

---

<sup>190</sup>. Muladi, 1990, OP.cit. hal. 5.

## 2. Persidangan yang Dapat Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Disangka Telah Melakukan Tindak Pidana

Sebagaimana telah diutarakan bahwa dalam sistem peradilan pidana perundang-undangan memegang peranan yang sangat penting karena di samping dapat memberikan perlindungan hukum, perundang-undangan juga dapat memberikan kekuasaan kepada pengambil kebijakan serta memberikan dasar hukum pada kebijakan yang ditetapkan. Namun demikian, suatu norma/aturan dapat dikatakan baik apabila ada keselarasan antara *das sein* dengan *das sollen* atau ada kesesuaian antara *law in the book* dengan *law in action*.

Begitu juga dalam proses persidangan perkara pidana anak yang pada hakikatnya untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak, maka tujuan untuk mendidik kembali, memperbaiki, serta bukan semata-mata untuk menghukumnya, dalam penanganannya semaksimal mungkin harus memperhatikan kepentingan yang dibutuhkan oleh anak. Adanya perlakuan khusus tersebut antara lain tercermin dalam cara-cara hakim dalam menangani sidang serta suasana sidang yang dapat mendukung sifat kekeluargaan. Oleh karena itu standar bagi peradilan anak yang efektif dan adil, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <sup>191</sup>

1. Hakim beserta aparat yang terlibat harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukumnya.
2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin:

<sup>191</sup>. Lela B. Costin., *The Child and the Court*, New York, McGraw-Hill Book Company, 1972. Dalam Suwantji Sisworahardjo, *Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986, hal.33-34.

- a. Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak.
  - b. Bahwa anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot serta mempunyai kekuasaan untuk memberikan kepada mereka.
  - c. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup.
3. Prosedur dirancang untuk menjamin:
- a. Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual.
  - b. Hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua serta masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

Secara rinci persoalan pokok yang harus diperhatikan dalam penanganan sidang perkara pidana anak meliputi:

1. Prinsip-prinsip umum:

- a. Bahwa setiap aparat yang terlibat hendaknya selalu berpedoman kepada asas praduga tak bersalah.
- b. Baik hakim maupun jaksa sejauh mungkin menghindarkan diri untuk bersikap dan bertindak yang dapat merugikan atau menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikis.
- c. Adanya kewajiban untuk didampingi orang tua/wali/orang tua asuh serta penasihat hukum merupakan pedoman yang dapat menentukan syahnya persidangan anak.

- d. Adanya pedoman sebagai penegasan prinsip persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## 2. Prinsip-prinsip khusus

- a. Bahwa setiap persidangan harus ditangani oleh hakim dan jaksa khusus.
- b. Sidang dilaksanakan dengan hakim tunggal.
- c. Disamping pelaksanaan sidang tertutup untuk umum, baik hakim, jaksa maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam persidangan tidak diperkenankan untuk mengenakan toga atau pakaian seragam (uniform).
- d. Baik ruangan maupun tata ruang sidang dipersiapkan secara khusus.
- e. Jika bukan sebagai sesuatu yang dapat menguntungkan anak, ketidak hadirannya saksi jangan dijadikan sebagai alasan penangguhan sidang, karena dapat berakibat buruk, terutama bagi anak yang dilakukan tindakan penahanan.
- f. Dalam hal penjatuhan sanksi, hakim harus mendasarkan kepada kondisi kebutuhan anak dan masyarakat, sehingga penjatuhan sanksi pembatasan kemerdekaan hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang singkat.

Sebagai upaya yang dapat mendukung tugas-tugas sebagaimana ditentukan dalam prinsip-prinsip tersebut, bagi setiap petugas peradilan ditentukan syarat-syarat sebagai berikut:

### 1. Syarat bagi Hakim dan Jaksa:

- a. Berpendidikan hukum, ditambah dengan pendidikan mengenai psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pedagogis, andralogi.

- b. Mencintai anak, dapat menyelami serta mengerti jiwa anak.
- c. Punya motivasi yang besar untuk membina dan membantu anak yang sedang dalam kesulitan.
- d. Sedapat mungkin seorang Wanita yang sudah berkeluarga dan memiliki anak

## 2. Syarat bagi BISPA:

- a. Memiliki motivasi dan dedikasi yang kuat.
- b. Di samping memperoleh pendidikan kemasyarakatan juga harus mempunyai pengetahuan hukum, sosial pedagogi, psikologi anak serta hal-hal yang perlu bagi pendekatan terhadap anak dan orang tua.

## 3. Kendala-Kendala yang dihadapi

Apabila kita cermati kembali upaya-upaya yang sesungguhnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, begitu terbentang luas garapan yang harus ditempuh karena untuk menciptakan sidang anak yang ideal tidak hanya dapat menggarap suatu sistem hukum secara parsial, melainkan harus ditempuh secara menyeluruh dan terpadu. Sebagaimana dikemukakan **Lawrence Friedmann**, bahwa suatu sistem hukum terdapat di dalamnya unsur-unsur: struktur hukum (*legal struktur*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Berdasarkan pandangan tersebut, nampak bahwa suatu pembentukan hukum -termasuk di dalamnya penegakan hukum (pidana) -agar dapat menempuh ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus saling melengkapi dan tidak bisa dipisah-pisahkan ataupun dipertentangkan. Dengan kata lain bahwa dalam membuat suatu

undangan (*law making*) maupun dalam penegakan hukumnya (*law enforcement*) bukan hanya diperlukan landasan yang bersifat yuridis dan filosofis, melainkan harus memiliki landasan yang bersifat sosiologis.

Kenyataan seperti itu, apabila kita hadapkan kepada persoalan penegakan hukum pidana anak faktor-faktor yang menjadi kendala meliputi:

**a. Aspek Kualitas Peraturan Perundang-undangan**

Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang berkualitas (yang dapat memenuhi unsur politis, praktis, sosiologis dan adaptif) persoalan pokok yang seringkali muncul adalah kurang koordinasinya lembaga legislatif dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan (*academic draft*), sehingga seringkali kurang memperhatikan keterlibatan para pakar dari kalangan akademisi maupun para praktisi. Dengan demikian, tidak heran apabila undang-undang yang dibuat kurang memperhatikan aspek-aspek perkembangan yang bersifat global/universal. Padahal bagi masyarakat Indonesia yang sedang berkembang adanya instrumen-instrumen internasional baik yang sudah maupun yang belum diratifikasi dirasakan sangat penting, di samping sebagai bukti adanya kerjasama internasional juga dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran dari pengalaman negara-negara yang sudah maju. Aspek lain pentingnya memperhatikan instrumen-instrumen internasional erat pula kaitannya dengan pandangan dunia internasional terhadap penilaian pelaksanaan HAM dalam sistem peradilan di Indonesia.

Hal lain yang sering kali kita temukan dalam pembentukan perundang-undangan adalah kurang perhatiannya para pembentuk undang-undang (badan



legislatif) di dalam hal penelusuran peraturan perundang-undangan, dimana sering pula ditemukan adanya ketidak sinkronan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lain yang sejenis. Disamping itu, masih adanya pola pemikiran dari para pembuat undang-undang yang berasumsi bahwa dengan dibuatnya suatu undang-undang setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat sudah dapat diatasi. Sesungguhnya undang-undang merupakan kumpulan huruf-huruf mati yang harus diaplikasikan serta diinterpretasikan lebih jauh dalam suatu konteks sosial. Sebagaimana diungkapkan Blumberg bahwa hukum (UU) itu sendiri tidak lain hanyalah "janji-janji". Hukum (UU) adalah janji-janji pada masyarakat yang akan diwujudkan melalui keputusan birokrasi. Ide dasarnya adalah janji-janji untuk memberikan keadilan, yakni janji-janji untuk memperbaiki mekanisme perubahan terhadap alokasi ganjaran, struktur-struktur, kesempatan, dan jalan masuk ke cara-cara kehidupan sosial kita secara adil.<sup>192</sup>

Atas dasar hal tersebut I.S. Susanto mengemukakan bahwa lembaga pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan dan menjaga terwujudnya janji-janji hukum/UU dan keadilan melalui keputusan-keputusannya yang meliputi segala aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, tenaga kerja, pendidikan, hak-hak asasi, keadilan, demokrasi, lingkungan hidup, kesejahteraan, dan hak-hak sipil lainnya.<sup>193</sup>

Atas dasar hal itu sesungguhnya tidak dapat diabaikan pentingnya pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan (hukum) yang sangat luas dari

<sup>192</sup>. I.S. Susanto, *Kajian Sosiologis Terhadap Lembaga Pengadilan*,. Makalah Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum PTN-PTS se Jateng dan DIY, di Kudus, 24-26 Nopember 1995.

<sup>193</sup>. Ibid.

pihak-pihak yang berada pada badan legislatif. Kenyataan seperti itu erat pula hubungannya dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan ilmu hukum pidana selama ini yang menurut **Barda Nawawi Arief** merupakan suatu keprihatinan. Keprihatinan pertama menyangkut pengajaran hukum pidana yang selalu berorientasi kepada penguasaan pasal-pasal yang ada dalam KUHP warisan kolonial yang menonjolkan paham individualism, liberalism dan individual rights. Keprihatinan yang kedua adalah keprihatinan yang bersifat dogmatis dan substansial. Dengan memahami ide-ide/pola pikir dan norma-norma substantif KUHP secara dogmatis, tidak mustahil dalam penerapannya terjadi perbenturan/konflik dengan nilai-nilai dan kepentingan hukum yang ada di masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan faktor ketidak puasan dalam masyarakat bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi faktor victimogen maupun faktor kriminogen.<sup>194</sup>

## 2. Aspek Penegak Hukum

Berbicara masalah aspek penegak hukum mencakup di dalamnya baik petugas yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum/"*law enforcment*", maupun "*peace maintenance*", yakni mereka yang bertugas di bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan serta kepengacaraan. Masalah tersebut menyangkut persoalan sumberdaya manusia (SDM). Tanpa mengingkari betapa pentingnya kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana pendukung serta partisipasi masyarakat, harus diyakini bahwa peranan kualitas sumberdaya yang profesional akan merupakan "*leading*

---

<sup>194</sup> . Barda Nawawi Arief, 1994. Op.cit. hal. 6-8.

*componen*” yang dapat menimbulkan rasa hormat, rasa segan dan pada akhirnya pasti akan menumbuhkan kewibawaan badan-badan peradilan. Karena bagaimanapun cermin yang dapat merefleksikan Negara Hukum adalah lembaga-lembaga peradilan yang pada dasarnya menggambarkan proses kongkritisasi hukum.

Kesadaran akan pentingnya kualitas SDM bukan hanya tergambar dalam garis kebijakan yang tertuang dalam GBHN, namun dapat kita temukan pula dalam salah satu paragraf penjelasan UUD 1945 yang antara lain dikatakan bahwa:

“... Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara adalah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting adalah semangat...”<sup>195</sup>

Dengan melihat begitu arif dan geniusnya para pendahulu kita, ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa faktor semangat yang ada dalam jiwa individu merupakan faktor yang sangat dominan. Dalam hal penegakan hukum, kesemuanya itu tertumpu kepada persoalan sikap mental para aparat penegak hukum. Kendala-kendala yang menyangkut sikap mental tersebut antara lain:<sup>196</sup>

a. Sifat mentalitas yang meremehkan mutu

Hilangnya kebutuhan akan kualitas dari suatu hasil karya antara lain sebagai pengaruh dari tingkat kemiskinan yang dialami disamping relatif

<sup>195</sup>. Undang-Undang Dasar bersifat Singkat dan Supel, Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>196</sup>. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1984, hal. 45.

tidak adanya jiwa bersaing yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Timbulnya mentalitas yang demikian tidak lain karena proses penyebaran, pengluasan, pemerataan, dan ekstensifikasi dari sistem pendidikan kita yang tidak disertai dengan perlengkapan sewajarnya dari prasarana-prasarana pendidikan.

b. Sikap mentalitas yang suka menerabas

Sikap yang suka menerabas ini antara lain adanya keinginan untuk mencapai tujuan secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan secara langkah demi langkah. Dengan demikian untuk mencapai segala keinginan selalu mencari jalan paling gampang/jalan pintas. Dampak negatif yang sering muncul adalah menghalalkan segala cara.

c. Sikap tidak percaya pada diri sendiri

Sikap ini di samping karena adanya kekurangan-kekurangan pada diri sendiri juga sebagai akibat dari terlalu kuatnya kepercayaan bangsa kita terhadap pihak yang dianggap lebih tinggi derajat atau kedudukannya. Nilai-nilai budaya tradisional tersebut hingga kini masih melekat pada sebagian besar kaum birokrat, sehingga sangat besarnya nilai yang berorientasi vertikal ke arah tokoh-tokoh pembesar, atasan dan senior. Sikap mentalitas demikian sudah barang tentu tidak sesuai dengan alam Indonesia yang kian berkembang pesat.

d. Sifat tak disiplin murni

Sikap tidak disiplin murni ini dapat dikembalikan kepada terlampau banyaknya berorientasi vertikal. Kenyataan seperti itu membawa kepada semakin banyaknya orang-orang yang berdisiplin karena rasa takut akan

pengawasan dari atas. Akibatnya pada saat pengawasan itu kendor atau tidak ada, maka hilanglah hasrat murni dalam jiwanya untuk secara ketat mentaati peraturan-peraturan yang telah ada.

e. Sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh

Masalah sifat tak bertanggungjawab antara lain dipengaruhi pula oleh adanya kesukaran hidup atau kemiskinan. Di samping itu adanya sifat orientasi vertikal yang membawa kepada disiplin yang tidak murni telah membawa pula kepada hilangnya rasa tanggungjawab. Dengan demikian, menurunnya rasa tanggungjawab itu dapat disamakan dengan menurunnya rasa disiplin yang akhir-akhir ini tampak sebagai suatu gejala yang meluas pada masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang dapat menjunjung tinggi kewibawaan hukum sehingga tercapainya kondisi masyarakat yang adil dan makmur, usaha yang ditempuh adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang makin beriman dan bertakwa, memiliki ahlak yang baik, mengamalkan agama dan ilmunya, cerdas, terampil, sehat jiwa dan raga, memiliki kemampuan IPTEK dan etos kerja produktif, serta mampu mengatasi hambatan-hambatan budaya.<sup>197</sup> Dengan kata lain adalah menciptakan manusia Indonesia yang ideal yang menurut pendalaman Islam adalah menciptakan manusia yang berahlak yaitu manusia manusia yang mampu memantulkan etika dan moralitas keagamaan dalam kehidupannya. Hal tersebut ditentukan oleh kualitas dari dua proses. Pertama, proses transformasi diri

<sup>197</sup>. Muslimin Nasution, *Bentuk dan Format Sumberdaya Manusia Indonesia Yang Ideal* (Makalah Pada Seminar "Bentuk dan Format Sumber Daya Manusia Indonesia yang Ideal"), UNISBA, 2 Nopember 1993, hal. 10.

manusia dalam hubungannya dengan Tuhan; kedua, proses internalisasi kekuatan-kekuatan Tuhan ke dalam diri manusia. Oleh karena itu sumber daya manusia ideal tidak lain dari “manusia Tuhan” yang memiliki kemandirian dalam mengemban misi kekhalifahannya di muka bumi ini.<sup>198</sup>

### c. Aspek Sarana/Fasilitas

Dilihat dari aspek sarana/fasilitas, kendala yang sering kali menjadi penghambat untuk jalannya penegakan hukum antara lain kurang tersedianya fasilitas dalam bentuk sarana fisik. Sebagaimana terungkap dalam kajian proses persidangan walaupun hanya mengungkapkan kondisi yang ada di Jawa Barat, namun kenyataan tersebut tidak akan jauh berbeda dengan kondisi yang ada di seluruh Indonesia. Kondisi yang demikian itu sering kali terungkap karena kurang penekanan dalam menindak lanjuti ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam suatu undang-undang. Kekurangan tersebut meliputi jumlah personil, bangunan gedung, anggaran yang tersedia, fasilitas kantor, maupun alat transportasi.

Walaupun saat ini pemerintah sudah banyak merekrut Hakim dan Jaksa namun demikian tidak satupun adanya hakim atau jaksa yang secara khusus dipersiapkan untuk menangani perkara anak. Lain halnya dengan petugas BISPA walaupun lingkup pekerjaannya secara khusus menangani masalah anak namun jumlah personil yang telah ada tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang begitu berat dan kompleks. Sebagai contoh persoalan yang dihadapi BISPA yang ada di Bandung saat ini begitu berat, sekali. Dengan hanya personil

<sup>198</sup> Din Syamsudin, *Profil Sumber Daya Manusia Indonesia Ideal: Prespektif Nilai Agama dan Demokrasi*, (Makalah pada Seminar “Bentuk Dan Format Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Ideal”), UNISBA, 2 Nopember 1993, hal.6.

yang jumlahnya dapat dihitung dengan sebelah tangan harus menangani jumlah perkara yang relatif banyak, di samping wilayah kerja yang cukup luas bahkan tidak jarang harus menempuh sampai ke pelosok-pelosok. Begitu juga dalam hal penyediaan bangunan/gedung, walaupun sudah banyak gedung Pengadilan yang telah dibuat, namun adanya sejumlah gedung tersebut masih kurang memperhatikan sarana yang secara khusus diperuntukan bagi penanganan pelaku tindak pidana anak. Sama halnya juga dengan bangunan-bangunan tempat penahanan sementara, selain masih menyatu dalam bangunan orang dewasa bentuk dan kondisinya pun masih tetap mempertahankan kondisi dan situasi kepenjaraan.

Sarana pendukung lain yang juga dirasakan masih minim adalah perlengkapan administrasi, anggaran serta sarana transportasi yang masih belum memadai. Dengan jumlah anggaran yang dirasakan sangat minim menyebabkan kurang memadainya penyediaan fasilitas keperluan administrasi serta pelayanan transportasi.

#### 4. Aspek Budaya Masyarakat

Satu hal yang juga sangat besar pengaruhnya terhadap proses penegakan hukum adalah persoalan sosial kemasyarakatan. Masalah ini meliputi perilaku manusia yang tidak hanya mempunyai muatan biologis, melainkan juga sosial dan kultural. Dilihat dari penglihatan sosiologis, perilaku manusia adalah perilaku dalam masyarakat dan oleh sebab itu dibentuk oleh nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat serta oleh pengalaman-pengalaman.<sup>199</sup>

<sup>199</sup>. Satjipto Rahardjo, *Pembinaan Kesadaran Dan Perilaku Hukum*, (Makalah Seminar Hukum Nasional ke-VI BPHN-DEPKEH, Jakarta, 25-29 Juli 1994, hal.5-6.

Persoalan yang menyangkut perilaku ini merupakan persoalan yang sangat kompleks serta memerlukan waktu yang tidak sedikit. Dikatakan kompleks karena di samping beraneka ragamnya budaya masyarakat yang telah mengakar kuat, juga ditunjang oleh pengalaman hidup yang demikian pahit setelah mengalami menjadi masyarakat kelas dua (marginal). Dalam suasana masyarakat yang berada pada masa transisi seperti sekarang ini membawa dampak kepada pergeseran pentaatan masyarakat terhadap hukum. Perubahan ini terjadi oleh karena berbagai bidang segi kehidupan masyarakat yang tengah mengadakan penyesuaian untuk mencari bentuk yang tepat dalam upaya memenuhi tuntutan yang baru, baik tuntutan kebutuhan fisik maupun idiil. Suasana peralihan yang sangat menonjol adalah adanya keinginan untuk meninggalkan pola dan ikatan hidup asli menuju kepada tata kehidupan modern. Di satu pihak masyarakat ingin mempertahankan kebiasaan lama yang sudah diakui sesuai dengan nialai-nilai moral masyarakat, dilain pihak ingin menyesuaikan dengan kondisi kemajuan jaman yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai moral yang dianut. Dalam kondisi demikian semakin diperburuk oleh keadaan-keadaan dengan melihat perilaku-perilaku yang bertentangan dengan moral positif masyarakat yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menjadi panutan masyarakat.

Perkembangan kehidupan yang demikian telah membawa kepada kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum yang ada. Kenyataan demikian merupakan karakteristik yang dialami oleh setiap negara yang sedang



berkembang yang menurut Satjipto Rahardjo,<sup>200</sup> karakteristik tersebut menyangkut baik pihak rakyat yang menjadi sasaran pengaturan maupun aktivitas pelaksana hukum, yang meliputi:

1. Pengabaian atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan, keharusan-keharusan yang elementer.
2. Menjadikan pekerjaan-pekerjaan di sektor publik sebagai tempat untuk mencari keuntungan pribadi.
3. Inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum.

Dengan melihat gambaran tersebut upaya melakukan pembinaan kesadaran hukum pada masyarakat nampak demikian luasnya, disamping harus merubah watak serta pola pikir yang telah mendarah daging, juga menyangkut pembinaan segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu garapan yang demikian luas dan besar ini bukan hanya dapat diatasi melalui pendidikan formal, melainkan harus dibarengi dengan pendidikan informal dan non formal.

---

<sup>200</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, cetakan pertama tahun 1977, hal. 170.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis sebagaimana dipaparkan pada uraian-uraian sebelumnya:

1. Dilihat dari segi peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai alas hukum dalam proses persidangan perkara pidana anak hanya diatur dalam Pasal 45, 46 dan Pasal 47 KUHP. Sedangkan dalam hukum acaranya diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983. Dengan demikian ketentuan-ketentuan lain yang tidak memberikan pengaturan secara khusus pada umumnya masih berorientasi kepada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi orang dewasa.

Adanya peraturan di bawah undang-undang yang secara khusus mengatur tata cara persidangan perkara pidana anak, seperti SEMA No. 3 Tahun 1959, SE. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, PERMENKEH No. M06-UM.01.06 Tahun 1983, di samping hanya berupa himbauan atau petunjuk pelaksana bagi hakim, sesungguhnya hanya sebatas prosedur formal yang belum mengatur secara khusus hukum acara yang benar-benar memberikan perlindungan hukum atas hak-hak anak. Sedangkan munculnya Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak yang diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan yang sering kali muncul dalam praktik sidang anak, ternyata masih menampakkan adanya masalah-masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Permasalahan yang sangat substansial, antara lain:

a. Dalam hal batas umur minimum, RUUPA mengatur batas umur minimum yang dapat diajukan ke sidang anak dan batas umur minimum untuk dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Dalam penentuan batas umur minimum ini terdapat perbedaan dengan konsep RKUHP, dimana anak antara umur 8-12 tahun masih dimungkinkan untuk diajukan ke sidang anak walaupun sanksi yang diancamkan berupa tindakan. Bahkan anak di bawah umur 8 tahunpun dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

b. Masalah jenis sanksi yang diancamkan terhadap anak.

Walaupun adanya dua jenis sanksi yang berupa pidana dan tindakan (Pasal 23-24), namun dalam memformulasikan bentuk sanksi masih berpola kepada sistem pemidanaan aliran klasik. Bentuk demikian di samping sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern, juga inkonsistensi dengan tujuan yang sesungguhnya melandasi dilaksanakannya sidang anak. Di samping itu, adanya sanksi yang berupa tindakan, dalam pengaturannya tidak memberikan petunjuk dengan jelas (*lex certa*). Pengaturan demikian sangat berbeda dengan apa yang ada dalam konsep RKUHP

c. Dari segi hukum acara, walaupun secara formal sudah memberikan rambu-rambu yang dapat memberikan jaminan terhadap anak, namun ketentuan-ketentuan yang telah ada tersebut belum diberikan penekanan-penekanan yang dapat mempertegas upaya perlindungan hukum terhadap kebutuhan akan hak-hak anak.

2. Dalam hal proses persidangan, upaya penanganan terhadap anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dalam praktik selama ini belum menampakkan

adanya karakteristik yang dapat membedakan dengan penanganan persidangan orang dewasa. Hal tersebut terungkap dari 78 perkara pidana anak yang ditangani di PN I Bandung maupun PN Bale Bandung selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Dilihat dari pola pikir hakim pada umumnya masih berorientasi kepada pemikiran legalitas formal. Kenyataan tersebut disebabkan karena lambannya merespon perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia dalam hal penanganan perkara pidana anak. Adanya pandangan yang masih mempertahankan legalitas formal tersebut membawa kepada sikap kurang memahami tujuan hukum yang hendak dicapai. Dengan demikian dilaksanakannya sidang perkara pidana anak bukan memberikan arah terhadap kebutuhan anak bermasalah, melainkan memperburuk kondisi perkembangan anak itu sendiri.

Data yang dapat menunjukkan kondisi yang demikian teridentifikasi dari fakta yang terungkap dimana baik masalah penanganan, bantuan hukum, maupun vonis yang dijatuhkan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspek individualisasi anak. Walaupun dilibatkannya orang tua dan BISPA dalam persidangan sesungguhnya belum dapat membantu kepentingan anak, apalagi tidak adanya peran serta penasihat hukum yang pada hakikatnya mempunyai tujuan untuk membela aturan hukum agar tidak terjadi kesalahan atau ketidakadilan dalam penerapan hukum. Orang tua pada kondisi menanggung beban atas perbuatan anaknya berada pada posisi yang sangat lemah bila berhadapan dengan hakim. Begitu juga peran BISPA yang hanya diwajibkan untuk membantu hakim, tersisihkan oleh otoritas hakim yang sangat tinggi.

Dengan melihat kenyataan seperti itu, proses persidangan perkara pidana anak yang selama ini berjalan masih menampakkan tujuan untuk mengadili anak, sehingga belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Atas dasar hal tersebut karena pemanfaatan penggunaan sanksi pidana dalam mengatasi masalah kejahatan diakui ketidak efektifannya, maka dalam menanggulangi timbulnya tindak pidana anak dipandang perlu memadukan kebijakan yang integratif antara sarana penal dengan nonpenal.

Namun demikian, tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan, agar adanya jaminan bahwa penyelesaian terhadap anak yang dalam kualifikasi tertentu dianggap telah melakukan tindak pidana, maka penyelesaian melalui proses persidangan harus benar-benar ditujukan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu maka pelaksanaan persidangan harus berlandaskan kepada:

- a. Tersedianya sarana hukum yang mampu memberikan landasan yuridis yang dibentuk dengan memenuhi alasan politis, sosiologis, praktis, dengan tidak meninggalkan alasan adaptif.
- b. Setiap aparat yang terlibat harus mampu memberikan pelayanan secara individual dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal serta fasilitas yang dapat menjamin hak-hak anak serta hakikat kebutuhan anak dan masyarakat.
- c. Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga anak terhidar dari sikap serta tindakan yang dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.

- d. Adanya kewajiban untuk didampingi orang tua, Bispa, serta penasihat hukum sebagai salah satu syarat syahnya persidangan, serta sebagai penunjang untuk menjunjung tinggi prinsip sidang yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- e. Sidang dilaksanakan dengan hakim tunggal yang ditangani oleh seorang wanita yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, yang secara khusus disediakan untuk menangani perkara anak.
- f. Sidang dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan tata ruang yang disediakan secara khusus.
- g. Hakim, jaksa maupun pihak-pihak lain yang terlibat tidak mengenakan toga/seragam.
- h. Tindakan penahanan sementara dilakukan demi kepentingan anak dengan tidak memisahkan anak dari lingkungannya.
- i. Penjatuhan sanksi pidana pembatasan kemerdekaan yang singkat merupakan upaya terakhir yang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan anak dan masyarakat.
- j. Penjatuhan sanksi pidana didasarkan kepada motivasi perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian pembinaan bukan hanya untuk menyadarkan anak dari semua perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan dapat menunjukkan pula jalan ke luar dari latar belakang yang mendorong perbuatannya.
- k. Di samping mempunyai motivasi, dedikasi, serta berbudi pekerti yang luhur, penguasaan ilmu hukum, psikologi anak, psykatri, sosiologi, sosial pedagogi, andrologi serta ilmu pengetahuan kemasyarakatan lainnya, merupakan syarat

yang harus dipenuhi oleh setiap aparat yang menangani proses persidangan perkara pidana anak.

3. Persoalan yang merupakan kendala yang dihadapi dalam upaya membentuk model sidang anak yang ideal meliputi:

a. Faktor kondisi peraturan perundang-undangan

Bahwa pengaturan sidang pengadilan anak yang ada masih bersifat fragmentaris, padahal yang dibutuhkan dengan segera adalah adanya undang-undang peradilan anak yang menyangkut aspek struktural yang dilandasi oleh suatu kultur "*individual justice*" yang mengandung sifat "*socio-legal court*". Dengan demikian hukum dan ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan (*behavioral sciences*) dapat bekerja sama mengenai aspek-aspek kejiwaan yang paling dasar dari manusia, insting manusia, nafsu dan kebutuhan personal yang kesemuanya merupakan komoditi yang tidak dapat diubah dengan mudah. Oleh karena itu suatu sistem konsolidasi, studi-studi kasus sosial merupakan bagian dari aspek prosedural tersebut. Adanya indikasi ke arah tersebut diperlukan adanya perhatian terhadap dokumen-dokumen internasional yang merupakan perumusan kesepakatan dunia tentang perlindungan hukum bagi anak.

b. Faktor kondisi sumber daya manusia

Masih kuatnya para penegak hukum mempertahankan pola pendidikan pada masanya dimana masih adanya sikap mental yang meremehkan mutu, suka memberantas, sikap tidak percaya diri, tidak disiplin murni, serta suka

mengabaikan tanggung jawab membendung pola pemikiran inovatif-kritis terhadap perkembangan masyarakat.

Tidak adanya persamaan persepsi baik yang berkenaan dengan struktur, substansi maupun kultur yang ada pada masing-masing sub-sistem sebagai akibat tidak adanya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang hukum terutama yang berkecimpung dalam sistem peradilan. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada belum mampu mengantisipasi kemajuan bidang teknologi, informasi dan transpormasi yang sangat pesat sebagai akibat dengan semakin meningkatnya mobilitas serta arus manusia dan informasi.

c. Faktor kondisi sarana/fasilitas

Dalam kondisi negara yang sedang membangun, kebutuhan sumber dana yang sangat besar lebih diarahkan kepada pembiayaan terhadap sektor-sektor yang dapat memberikan keuntungan/laba yang lebih besar pula. Sehingga anggaran yang disediakan bagi proses penegakan hukum tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan demikian baik jumlah personil, gedung, alat transportasi, serta perlengkapan administrasi yang lainnya memaksa untuk memanfaatkan sarana-sarana yang ada yang dapat menghambat terselenggaranya sidang anak yang lebih memadai.

d. Kondisi budaya masyarakat

Kondisi masyarakat yang harus menyesuaikan nilai-nilai yang sudah berakar dengan nilai-nilai baru merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kritis. Dalam masyarakat yang memegang teguh adat tradisi lama sering kali merasa tabu untuk menerima hal-hal baru yang dianggap dapat merusak



keutuhan masyarakat yang telah ada. Oleh karena itu untuk merubah perilaku hukum yang ada dalam masyarakat diperlukan pendekatan serta waktu yang tidak sedikit. Demikian luasnya pekerjaan membina kesadaran dan perilaku hukum masyarakat, bukan hanya dapat ditangani oleh lembaga pendidikan semata melainkan sampai kepada turut sertanya tanggung jawab keluarga.

Atas dasar hal tersebut pembinaan perilaku dan kesadaran hukum tidak bisa dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri melainkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang menyangkut kesejahteraan ekonomi. Mentargetkan pembinaan kesadaran dan perilaku di tengah-tengah kesulitan ekonomi hanya merupakan program menjaga-jaga semata.

## **B. Saran-Saran**

Dengan berpijak kepada kenyataan seperti tersebut di atas, maka upaya-upaya yang harus ditempuh dalam menciptakan sidang anak yang ideal, antara lain:

1. Dalam proses pembentukan undang-undang Peradilan Anak, hendaknya selalu melibatkan peran aktif para akademisi (pakar hukum maupu kriminologi), praktisi maupun tokoh masyarakat, sehingga undang-undang yang dihasilkan betul-betul dapat memenuhi aspek politis, sosiologis, praktis, maupun aspek adaptif. Di samping patut dipertimbangkannya rumusan-rumusan yang dihasilkan dari berbagai pertemuan-pertemuan ilmiah.
2. Walaupun dalam setiap pembentukan undang-undang harus selalu berpijak kepada nilai-nilai sosial-kultur masyarakat, namun sebagai negara yang turut aktif dalam percaturan dunia internasional, memperhatikan instrumen-instrumen internasional yang sudah diakui oleh bangsa-bangsa di dunia untuk dijadikan bahan rujukan

merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan demikian adanya undang-undang yang diharapkan dapat mengatasi anak bermasalah tidak menimbulkan berbagai permasalahan baru (handicap).

3. Dalam kondisi adanya keterbatasan ketentuan hukum acara yang mengatur proses persidangan perkara pidana anak, hendaknya para hakim maupun jaksa selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang diakui sebagai hukum positif. Dengan demikian dilaksanakannya persidangan anak betul-betul dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian.
4. Dalam menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat tujuan yang hendak dicapai dalam persidangan perkara pidana anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan persoalan yang patut dikedepankan. Oleh karena itu melakukan pendidikan dan pelatihan yang bersifat lintas sektoral serta inter dan multidisipliner merupakan kebutuhan yang harus ditangani dengan segera.
5. Karena anak yang melakukan suatu tindak pidana hakikatnya lebih banyak dipengaruhi kondisi lingkungan sosial kemasyarakatan, maka usaha untuk mengatasinya tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan hukum pidana melainkan harus ditunjang pula dengan perencanaan yang matang dari kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.
6. Upaya yang paling baik dan bijaksana dalam mengantisipasi semakin meningkatnya gejala kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, di samping perlu menciptakan lingkungan masyarakat yang baik (memeratakan kesejahteraan masyarakat, menciptakan sarana kebutuhan anak, dll), juga perlu ditingkatkannya peran lembaga-lembaga sosial maupun tokoh agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989: *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presido, Jakarta.
- , 1986: *Pengembangan Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*; (Beberapa Catatan), Rajawali, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994: *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Ananta, Semarang.
- , 1996: *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penulisan Buku Kerjasama Indonesia-Belanda Bidang Hukum, 1995-1996.
- , 1996: *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak (Makalah pada Seminar Nasional "Peradilan Anak")*, Fakultas Hukum UNPAD.
- , 1994: *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- , 1984: *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- B. Simanjuntak, 1977: *Pengantar Kriminologi Dan Sosiologi*, Tarsito, Bandung.
- BPHN (DEPKEH) dan Fakultas Hukum UNDIP, 1977: *Peradilan Anak (Lokakarya)*, Binacipta, Bandung.
- Bimo Walgito, 1982: *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- B. Kepper Hazel and J. Israel, 1979: *Introduction to the Criminal Justice System*, Second Edition.
- BAKIN, 1971: *Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan*. Inpres No. 6/71.
- BPHN Departemen Kehakiman, 1984: *Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Binacipta, Bandung.
- Bagir Manan, 1996: *Pemikiran-Pemikiran Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak (Makalah pada Seminar Nasional "Peradilan Anak")*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.
- B. Costin Lela, 1972: *The Child and the Court*, McGraw-Hill Book Company, New York.

- Biro Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 1900-2000*, Pusat Informasi BPS, Jakarta.
- Dirjosisworo, 1988: *Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- D.Y. Ataa, 1979: *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Di Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta*, Binacipta, Bandung.
- Din Syamsudin, 1993: *Profil Sumber Daya Manusia Indonesia Ideal: Prespektif Nilai Agama dan Demokrasi* (Makalah pada Seminar Nasional "Bentuk Dan Format Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Ideal"), UNISBA, Bandung.
- E.Th. Lydia V. William, William G.D, 1964: *Delinquency And Justice*, Second Edition, Random House, New York.
- Hulsman L.H.C (Wonosutanto penerjemah), 1995: *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- I.S. Susanto, 1995: *Kajian Sosiologis Terhadap Lembaga Pengadilan* (Makalah pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum PTN-PTS se Jawa dan DIY, Kudus).
- Irma Setyowati Soemitro, 1990 : *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ida Z Fahrudin, 1961: *Beberapa Catatan Mengenai Pendidikan Anak-Anak di Bandung*; Skripsi FH Unpad.
- Jefferson to Latin, 1982: *The Encyclopedia Americana*, International Edition, Vol. 16, Glolier Incoporated.
- Kartini Kartono, 1979 : *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung.
- , 1992: *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- K. Merton Robert & Nisbet, *Contemporary Social Problems*, New York, Harcourt, France & world Inc.
- Koentjaraningrat, 1984: *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Leobby Loqman, 1995: *Perkembangan Kebijakan Legislatif Tentang Peradilan Anak*; Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

- , 1996: *Hukum Pidana Anak*; Bahan Kuliah pada Program Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- , 1993: *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL\_CO, Jakarta.
- Lamintang, 1990: *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sianar Baru, Bandung.
- Muladi, 1995: *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1990: *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- , 1992: *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mardjono Reksodipoetro, 1993: *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1987: *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1983: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ministry of Justice Japan, 1986: *Criminal Statutes I*.
- Mohtar Kusumaatmadja, 1975: *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penerbit Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum UNPAD, Binacipta, Bandung.
- Muslimin Nasution, 1993: *Bentuk Dan Format Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Ideal* (Makalah pada Seminar Nasional " Bentuk Dan Format Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Ideal"), UNISBA, Bandung.
- Noersjamsoe Yustham, 1979: *Peradilan Anak Dewasa Ini Di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- O.W. Mueller Gerhard (Editor-in-Chief), 1960: *The Corean Criminal Code*. Fred B. Rothman & Co. South Hackensack. N.J. Sweet & Maxsell Limited, London, Ner York University, New York.
- Oemar Seno Adji, 1977: *Lokakarya Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung.

- Peter G. Hoefnagels, 1969: *The Other Side of Criminology. An Inversion of the Concept of Crime*; Revised edition of Begin Selen van Crimionologie. Lhuwer-Deventer, Holland.
- R. Hanskell Martin & Lewis Yoblonksy, 1974: *Criminology, Crime and Criminality*, Rand McHally College Publishing Company, Chicago.
- Roeslan Saleh, Tanpa Tahun, *Mengadili Adalah Proses Yang Terjadi antara Manusia dan Manusia*; Bahan Kuliah Kapita Selektta Hukum Pidana pada Program Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- , 1971: *Mencari Asas-Asas Umum Yang sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana.
- Romli Atmasasmita, 1996: *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- , 1984: *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- , 1989: *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- R. Haskell Martin & Lewis, 1974: *Criminology, Crime And Criminality*, Rand McHally College Publishing Company, Chicago.
- Ronny Hanitidjo Soemitro, 1990: *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995: *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor.
- Resolusi PBB 1368 (XIV), *Declaration on the Rights on the Child*, 20 November 1958.
- Resolusi PBB A/RES/40/33, 1986: *The Beijing Rules; United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice*, Departement of Public Information, New York..
- Resolusi PBB Nomor 44/25 20 November 1989: *Convention On The Rights Of The Child*, United National Children's Fund (UNICEF).
- Resolusi PBB (Draft Resolution No. A/Con/169/L.5) Ninth UN Congres on the Prevention of Crime on the Treatment of Offenders, Kairo, Mesir.
- Report, United Nation. Six United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, New York, 1980.

- Satjipto Rahardjo, 1980: *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1991: *Ilmu Hukum* (Edisi revisi), Citra Aditya, Bandung.
- , 1994: *Pembinaan Kesadaran Dan Perilaku Hukum* (Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke-VI), BPHN-DEPKEH, Jakarta.
- , 1977: *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soedarto, 1981: *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1977: *Pengertian Dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung.
- , 1986: *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , 1983: *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1990: *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suwantji Sisworahardjo, 1986: *Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, YLBHI & Rajawali, Jakarta.
- Safiyudin Sastrawijaya, 1977: *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soesilowindradini, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983 : *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta.
- , 1977: *Sistematika Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung.
- Schioldeger Harald (Translated), 1961: *The Norwegian Penal Code*, Fred B. Rothman & Co. South Hackensack. N.J. Swet & Maxell Limited, London, New York University, New York.
- Sutherland E. & Donald R. Cressey (Momon Martasaputra penyadur), 1969: *Principle of Criminology*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985: *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung.

-----, 1987: *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Baru ketiga), Rajawali, Jakarta.

Seminar Nasional "Pendekatan Nonpenal Dalam Penanggulangan Kejahatan,"  
Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1996.

Utrecht, 1968 : *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung.

United Nations Children's Fund (UNICEF), 1989: *Convention on the Rights of the Child*, Resolusi PBB No. 44/25.

United Nation, 1952: *Comparative Survey On Juvenile Delinquency*, Part. I. Nort America. Departement of Social Affairs Devition of Social Walfare, New York.

United Nation, 1953: *Comparative Survey on Juvenile Delincueny*, Part.IV. Asia and the Far East. Departement of Social Affairs Devition of Social Walfare, New York.

United Nation, 1953: *Comparative Survey on Juvenile Delincueny*, Part.V. Middle East. Departement of Social Affairs Devition of Social Walfare, New York.

UNAFEI, 1986: *Resource Material Series*. No. 29.

Zakiah Daradjat, 1994 : *Remaja Tantangan dan Harapan*, Ruhama, Jakarta.

-----, 1985 : *Faktor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*, Binacipta, Bandung.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

TAP.MPR-RI Nomor II/MPR/1988, Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1988.

TAP.MPR-RI Nomor II/MPR/1993, Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1993.

BPHN DEPKEH, 1983: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Terjemahan Resmi Sinar Harapan, Jakarta.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Politeia, Bogor, 1981.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.



Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, Tentang *Kesejahteraan Anak*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3143.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Cetakan ke-2, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1992.

Departemen Kehakiman, Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak, 1996.

Departemen Kehakiman, *Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru)*, 1993.

Departemen Kehakiman, *Penjelasan Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru)*, 1993.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983, tentang *Tata Tertib Persidangan dan Ruang Sidang*.

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.03-UM-1.06 Tahun 1991. Tentang Perubahan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06 Tahun 1983.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987 tanggal 17 Nopember 1987, tentang *Tata Tertib Sidang Anak*.

Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 15 Juli 1974, tentang *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta*.

#### **Media masa:**

Perum Keadilan, Edisi Juni 1995

Perum Keadilan, No.7, Edisi Juli 1995.

Pelita, 12 Juli 1995.

Suara Merdeka, 29 Desember 1995.

Kompas, 4 desember 1994.

Kompas, Mei 1995.

Kompas, 19 Juli 1995,

Kompas, 29 April 1996.